



LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH (LKj)

TAHUN ANGGARAN 2021



disnakerind
TANAH LAUT - K O M P E T I T I F

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan YME atas segala petunjuk dan bimbinganNya sehingga tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun dimaksudkan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta tanggung jawab pelaksanaan kinerja untuk Tahun 2021.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 ini masih belum sempurna, oleh karena masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan sangat kami harapkan, dan semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut di masa - masa mendatang..... Aamiin.

Pelaihari, 31 Januari 2022

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Laut,

MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut tentang capaian kinerja, sasaran selama tahun 2021 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis tahun 2018-2023 dan Rencana Kinerja Tahunan tahun 2021.

Pada Tahun 2021 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut menetapkan 8 (delapan) program yang terdiri atas 25 (dua puluh lima) kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) Sub Kegiatan dengan anggaran sebesar **Rp. 15.394.743.445,-** dan realisasi sebesar **Rp. 11.327.431.259,98-** atau tercapai **73,57 %**. Secara umum capaian kinerja sasaran tahun 2021 sudah cukup baik.

Demikian dengan disusunnya LKj ini dapat memberikan informasi dan manfaat serta evaluasi dalam pengambilan keputusan guna lebih mendorong peningkatan kinerja maupun kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Tanah Laut dimasa yang akan datang.

Pelaihari, 31 Januari 2022

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Laut,

MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iii
 BAB I LATAR BELAKANG.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
C. PRODUK DAN LAYANAN	12
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	15
 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	17
A. Visi RPJMD.....	17
B. Misi RPJMD	19
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	21
D. INDIKATOR KINERJA UTAMA	23
F. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	31
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	36
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	36
1) Sasaran RPJMD	36
2) Eselon II (Kepala Dinas).....	64
3) Eselon III (Sekretaris).....	111
4) Eselon IV (Kasubbag Umum dan Kepegawaian)	116
5) Eselon IV (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan).....	117
6) Eselon IV (Kepala Subbag Tata Usaha BLK).....	120
4. Eselon III (Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja).....	122
1) Eselon IV (Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja)	127
2) Eselon IV (Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas).....	128
3) Eselon IV (Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja)	130
4) Eselon IV (Kepala UPT. BLK)	131
5. Eselon III (Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsotek)	132
1) Eselon IV (Kepala Seksi Persyaratan Kerja)	135
2) Eselon IV (Kepala Seksi Pengupahan dan Jamsotek).....	136
3) Eselon IV (Kepala Seksi Hubungan Industrial).....	138
6. Eselon III (Kepala Bidang Perindustrian)	140
1) Eselon IV (Kepala Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri).....	141
2) Eselon IV (Kepala Seksi Sarana Prasarana Industri).....	144
3) Eselon IV (Kepala Seksi Pemberdayaan Industri).....	145
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.	145
1) Anggaran dan Realisasi APBD 2021	145
2) Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program.....	150
3) Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021	161
 BAB IV PENUTUP.....	167
A. KESIMPULAN.....	167
B. Strategi Peningkatan Kinerja	168
LAMPIRAN	169

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban dari terselenggaranya pemerintahan dan pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah juga Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan yang baik untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan Negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan Tap. MPR RI No. 11 MPR 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas tertib penyelenggaraan Negara, Asas kepentingan umum, Asas keterbukaan, Asas proporsionalitas dan Asas akuntabilitas.

Dalam penjelasan mengenai Pasal tersebut dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut disusun sebagai wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi tujuan organisasi dan sebuah tekad seluruh Aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah

Laut untuk mempertanggung jawabkan kinerja secara transparan dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

B. STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut

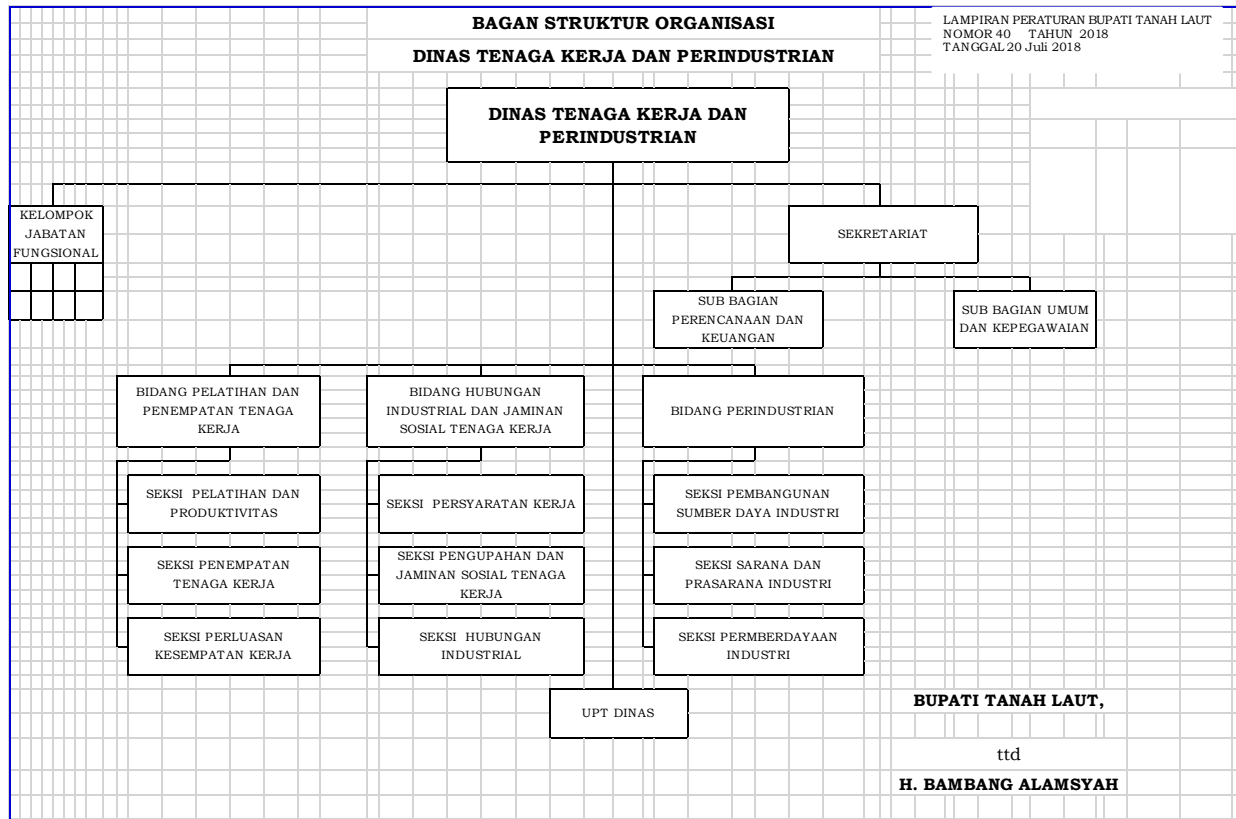
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian serta bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Laut melalui Sekretaris Daerah.

A. Gambaran Umum SKPD.

a) Struktur Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian terdiri dari :
 - a. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas;
 - 2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - 3) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri dari:
 - 1) Seksi Persyaratan Kerja;
 - 2) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - 3) Seksi Hubungan Industrial.
 - e. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Industri; dan
 - 3) Seksi Pemberdayaan Industri.

- f. UPT Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 40 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

Tugas Pokok Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 40 tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang tenaga kerja, bidang perindustrian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Tanah Laut mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria teknis bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan bidang perindustrian;
- f. pelaksanaan administrasi dinas;
- g. pembinaan UPT Dinas; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya..

Dinas Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi, yang terdiri :

- A. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- B. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari:
 - 1) Seksi Pelatihan dan Produktivitas;
 - 2) Seksi Penempatan Tenaga Kerja; dan
 - 3) Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.
- C. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri dari:
 - 1) Seksi Persyaratan Kerja;
 - 2) Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - 3) Seksi Hubungan Industrial.
- D. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Industri; dan
 - 3) Seksi Pemberdayaan Industri.
- E. UPT Dinas; dan
- F. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya, tugas pokok pada Disnakerind Kabupaten Tanah Laut diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan manajemen dan pengendalian di bidang Tenaga Kerja, dan Perindustrian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, menyelenggarakan mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sesuai dengan kewenangannya ;
- b. Memimpin, mengarahkan, merencanakan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja, dan perindustrian ;
- c. Merumuskan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja, dan perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Melaksanakan pembinaan teknis pendidikan pelatihan kerja
- e. Melaksanakan pembinaan teknis pengendalian dan pengawasan hubungan industrial dan syarat kerja
- f. Melaksanakan kemitraan dalam peningkatan kualitas keahlian tenaga kerja
- g. Melaksanakan pembinaan teknis tenaga kerja asing
- h. Melaksanakan pembinaan unit pelaksana teknis daerah
- i. Membuat laporan kinerja bidang perhubungan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya kepada sekretaris daerah
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Disnakerind Kabupaten Tanah Laut mempunyai Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan perencanaan program Bidang tenaga kerja, dan perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. penyusunan prosedur tetap dan mekanisme kerja Bidang tenaga kerja, dan perindustrian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian secara teknis Bidang tenaga kerja, dan perindustrian yang menjadi ruang lingkup tugasnya.
- d. penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- e. pengkoordinasian perencanaan program Bidang Ketenagakerjaan, dan Perindustrian dengan instansi vertikal di daerah;
- f. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait guna pengawasan dan pengevaluasian dan penilaian pelaksanaan program Bidang Ketenagakerjaan, dan Perindustrian;
- g. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan dunia usaha guna pengawasan dan pengevaluasian dan penilaian pelaksanaan program Bidang Ketenagakerjaan, dan Perindustrian;
- h. penyelenggaraan Kesekretariatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati melalui Sekretaris Daerah tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

2. Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi penyelenggaraan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - b. koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip dan dokumentasi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.

- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan Produk Hukum Daerah dibidang tenaga kerja dan perindustrian;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/ jasa;
- g. koordinasi pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Bidang PPTK

- (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dibidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pelatihan, produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

4. Bidang HIJSTK

- (1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

5. Bidang Perindustrian

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri;

- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana prasarana industri, sarana prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- f. pelaksanaan administrasi bidang perindustrian;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

A. ISU STRATEGIS

Ada beberapa isu strategis terkait pembangunan ketenagakerjaan, dan perindustrian.

Isu Strategis Bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian antara lain :

1. Peningkatan pelayanan pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan untuk kompetensi tenaga kerja untuk mewujudkan Program Unggulan 500 Orang Siap Kerja .

Pelatihan kerja sebagai keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pekerjaan. Melalui pelatihan berbasis kompetensi dan kewirausahaan menitik beratkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian perlu mendorong terbentuknya Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

swasta selain UPT BLK yang sudah ada. Lembaga-lembaga tersebut perlu program penguatan kelembagaan, standarisasi kompetensi, peningkatan kualitas instruktur dan tenaga pelatihan. Bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), lembaga pendidikan menengah dan lembaga pendidikan tinggi dalam program pemagangan.

2. Peningkatan Pelayanan penempatan tenaga kerja.

Pelayanan penempatan tenaga kerja dipandang sebagai proses kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan, sementara pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai kebutuhannya. Peningkatan pelayanan tersebut dibangun melalui pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu (SISNAKER TERPADU) sebagai kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumberdaya manusia, perangkat keras, perangkat lunak dan substansi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja, pengelolaan data dan informasi yang terpadu bidang ketenagakerjaan. Dalam pelayanan penempatan tenaga kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk menyelenggarakan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten, penerbitan ijin LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta) daerah Kabupaten, pengelolaan IPK (Informasi Pasar Kerja) dan pemberian tanda daftar BKK (Bursa Kerja Khusus).

Pembinaan terhadap LPTKS dan BKK perlu diintensifkan mengingankan urgensi dan cakupan layanan dapat diperluas, karena BKK dapat dibentuk pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan kerja.

Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sedang membahas draft Raperda tentang Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) dan retribusi perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

3. Perlindungan ketenagakerjaan melalui peningkatan jumlah peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik di dalam maupun luar

hubungan kerja, diperlukan jaminan sosial sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pemerintah daerah turut mendorong peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan kepada para pekerja formal, tenaga kerja informal (mandiri), Perangkat Desa, tenaga non ASN (PTT) dan tenaga kerja konstruksi, berdasarkan MoU antara pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut dengan BPJS Ketenagakerjaan cabang Banjarmasin.

4. Harmonisasi hubungan industrial melalui peningkatan jumlah penyelesaian kasus melalui Perjanjian Bersama (PB).

Meningkatnya jumlah sengketa atau perselisihan hubungan industrial menuntut upaya maksimal tenaga fungsional mediator HI, agar penyelesaian perselisihan dapat dicapai melalui Perjanjian Bersama (PB) sebelum pilihan terakhir melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Sampai saat ini Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut belum memiliki tenaga fungsional mediator, sehingga pelayanan penanganan perselisihan HI bekerja sama dengan tenaga mediator di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Selatan. Selain itu untuk meningkatkan harmonisasi hubungan industrial dilakukan melalui pembinaan organisasi pekerja dan organisasi pengusaha, lembaga kerjasama bipartit, lembaga kerjasama tripartite, deteksi dini penanganan mogok kerja, PHK, dan penutupan perusahaan.

5. Peningkatan Industri kecil dan menengah

Kebijakan yang berpihak kepada IKM mendorong pertumbuhan sektor industri secara keseluruhan, meliputi perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas bagi IKM. Dalam rangka mewujudkan pembangunan industri daerah dilakukan melalui strategi pemanfaatan potensi bahan baku, penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan teknologi, inovasi dan kreatifitas.

Pemerintah Daerah menggalakkan program penumbuhan wirausaha baru. Dengan meningkatnya jumlah wirausaha baru, maka diharapkan juga meningkatnya jumlah IKM di Kab. Tala . tindak lanjut dari meningkatnya IKM dan jumlah perusahaan, maka jumlah IKM yang terfasilitasi TDI dan IUI juga turut bertambah.

6. Terbangunnya kawasan industri Jorong

Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Peraturan Presiden RI Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, bahwa Kawasan Industri Jorong masuk dalam proyek Strategis Nasional (PSN). Kementerian Perindustrian telah memfasilitasi dalam pembuatan master plan dan RDTR.

7. Tumbuhnya sentra IKM

Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM), berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035 bahwa di setiap wilayah Kabupaten terutama di luar Pulau Jawa memiliki minimal satu sentra IKM, yang dapat berada didalam atau di luar Kawasan Industri. Pada Tahun 2019 melalui dana DAK telah dibangun Gedung Sentra IKM di Kecamatan Tambang Ulang, dan pada Tahun 2021 direncanakan pembangunan Sentra IKM Hasil Laut di Kecamatan Panyipatan.

C. PRODUK DAN LAYANAN

Produk dan layanan yang dihasilkan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut dalam bidang Ketenagakerjaan, dan Perindustrian adalah sebagai berikut :

A. Bidang PPTK

1. Jenis Pelayanan

Pelayanan publik yang diberikan oleh Bidang PPTK berupa :

- a. Pembuatan Kartu Pencari Kerja/ AK 1
- b. Rekomendasi Penempatan TKI ke Luar Negeri
- c. Pemberian Ijin Lembaga Pendidikan Keterampilan (LPK)

2. Prosedur Pelayanan

- a. Pembuatan Kartu Pencari Kerja/ AK 1

- 1) Pencari Kerja menyerahkan persyaratan, diantaranya :
 - Fotocopy Ijazah dan Transkrip nilai dari SD s/d Pendidikan terakhir.
 - Fotocopy KTP/ keterangan domisili
 - Fotocopy sertifikat keterampilan (jika ada)
 - Fotocopy surat pengalaman kerja (jika ada)
 - Pas photo 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
- 2) Pencari kerja mengisi data (identitas) di buku agenda/ database pencari kerja sesuai dengan tingkat pendidikan.
- 3) Petugas memverifikasi berkas pencari kerja.
- 4) Petugas mewawancarai dan menginput/ mengentry data pencari kerja ke website resmi Kemenakertrans RI yaitu :
<http://www.infokerja.depnakertrans.go.id>
- 5) Petugas mengambil photo pencari kerja
- 6) Petugas mencetak kartu pencari kerja
- 7) Petugas antar kerja menandatangani kartu pencari kerja/ AK 1
- 8) Petugas melegalisir kartu pencari kerja yang sudah digandakan (fotocopy) oleh pencari kerja dan menyerahkan kembali kepada pencari kerja.
- b. Rekomendasi Penempatan TKI ke luar negeri (SISKOTKLN)
 - 1) PPTKIS dan calon TKI (CTKI) menyerahkan dokumen kelengkapan yang meliputi :
 - CTKI harus dihadirkan
 - KTP, Ijazah, Akte kelahiran/ Surat kenal lahir, Kartu keluarga (KK)
 - Surat ijin suami/ isteri, orang tua atau wali diketahui oleh RT/ Lurah/ Kades
 - Perjanjian penempatan TKI
 - Perjanjian Kerja (PK)
 - 2) Persetujuan dari Kepala Dinas
 - 3) Uji Kelayakan Keputusan CTKI yang meliputi :
 - a. Uji baca tulis bagi yang tidak tamat SD
 - b. Skill/ keterampilan yang dimiliki

- 4) Menginput data CTKI Online melalui website resmi BNP2TKI yaitu SPPTKLN atau SISKOTKLN dengan mengakses :
<http://www.bnp2tki.go.id> atau <http://siskotkln.bnp2tki.go.id>
- 5) Penandatanganan rekomendasi paspor CTKI dan berita acara CTKI oleh Kepala Dinas
- 6) Penyerahan berkas.

B. Bidang HIJSTK

Pelayanan publik yang diberikan oleh Bidang HIJSTK berupa :

- a. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
- b. Pengesahan Peraturan Perusahaan
- c. Pencatatan Perjanjian Kerja Bersama
- d. Pencatatan Pelaporan Pekerjaan Pemborongan dan Jenis Pekerjaan Penunjang
- e. Pencatatan Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh
- f. Pencatatan LKS Bipartit
- g. Pencatatan PHK
- h. Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial

C. Bidang Perindustrian

Pelayanan publik yang diberikan oleh Bidang Perindustrian berupa :

- a. Rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI)
- b. Fasilitas Standarisasi Industri (IUMK OSS, Halal, Hak Kekayaan Industri)
- c. Fasilitas Pendaftaran Program Kartu Prakerja bagi IKM Terdampak Covid-19
- d. Fasilitas Pendaftaran Program Pelatihan dan Pemberdayaan Industri yang bersumber dari Dana APBD Provinsi Kalsel melalui aplikasi Si Manis
- e. Pembinaan dan Pemberdayaan Industri melalui Program Pelatihan dan Pemagangan serta Pendampingan IKM dalam rangka mengakses Program Bantuan Permodalan melalui Gapura Karomah.

D. UPT BLK

Pelayanan publik yang diberikan oleh UPT. BLK berupa :

- a. Menerima pendaftaran dan melaksanakan Pelatihan berbasis Kompetensi di UPT. BLK.
- b. Menerima pendaftaran dan melaksanakan Pelatihan berbasis Kompetensi di desa-desa dan kecamatan.
- c. Menerima pendaftaran dan melaksanakan Pelatihan berbasis Kompetensi di Balai-Balai Besar Kementerian Tenaga Kerja.
- d. Menerima permintaan dan melaksanakan Pelatihan berbasis Kompetensi di perusahaan kerja/ kerja sama dengan pihak ketiga.
- e. Pemanggil peserta yang sudah mendaftar melalui via telp. dan sms.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

1. KATA PENGANTAR
2. IKHTISAR EKSEKUTIF
3. DAFTAR ISI

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi
- C. Isu Strategis
- D. Produk dan Layanan
- E. Sistematika Penyajian

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kerja

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan dan Sasaran Strategis
- D. Indikator Kinerja Utama
- E. Perjanjian Kinerja 2021
- F. Program dan Kegiatan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 1. Sasaran RPJMD
 2. Eselon II (Kepala Dinas)
 3. Eselon III (Sekretaris)
 - 1) Eselon IV (Kasubbag Umum)
 - 2) Eselon IV (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan)
 - 3) Eselon IV (Kasubbag Tata Usaha UPT. BLK)
 4. Eselon III (Kepala Bidang P2TK)
 - 1) Eselon IV (Kasi Penempatan Tenaga Kerja)
 - 2) Eselon IV (Kasi Pelatihan dan Produktivitas)
 - 3) Eselon IV (Kasi Perluasan Kesempatan Kerja)
 - 4) Eselon IV (Kepala UPT. BLK)
 5. Eselon III (Kepala Bidang HIJSTK)
 - 1) Eselon IV (Kasi Persyaratan Kerja)

- 2) Eselon IV (Kasi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja)
- 3) Eselon IV (Kasi Hubungan Industrial)
- 6. Eselon III (Kepala Bidang Perindustrian)
 - 1) Eselon IV (Kasi Pembangunan Sumber Daya Industri)
 - 2) Eselon IV (Kasi Sarana dan Prasarana Industri)
 - 3) Eselon IV (Kasi Pemberdayaan Industri)

C. Akuntabilitas Keuangan

- 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2021
- 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
- 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021

Bab IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN

- 1) IKU
- 2) Pernyataan Hasil Reviu Tahun 2020
- 3) Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
- 4) Pohon Kinerja
- 5) Capaian Kinerja Triwulan I s.d IV
- 6) Monev Renstra
- 7) Matrik Keselarasan
- 8) Rencana Aksi
- 9) Rencana Aksi dan Monitoring

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi Jangka Menengah, yang selanjutnya hanya disebut sebagai Visi, adalah rumusan umum mengenai kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tanah Laut, maka kondisi yang ingin dicapai (*desired future*) pada periode 2018–2023 adalah:

Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI

Kata “BERINTERAKSI” pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BERKARYA : Makna kata “berkarya” lebih tinggi daripada kata “bekerja”; yaitu merujuk pada hasil kerja. Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Secara makro, indikasi dari adanya karya dalam peningkatan taraf kesejahteraan rakyat adalah meningkatnya laju pertumbuhan PDRB perkapita, yang diiringi dengan laju inflasi di Daerah yang semakin terkendali; tingkat ketimpangan pendapatan dan ketimpangan regional yang semakin menurun; rasio kesenjangan kemiskinan serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yang semakin menurun; pembangunan manusia yang semakin baik; dan meningkatnya daya saing daerah yang semakin.

INOVASI : Inovasi adalah solusi logis terhadap adanya tekanan keterbatasan keuangan daerah dan meningkatnya harapan dan tuntutan masyarakat ter-

hadap pelayanan publik yang berkualitas. Karena itu, inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan, baik yang merupakan gagasan / ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi / modifikasi, yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam rangka inovasi tersebut, maka percepatan pembangunan inovasi pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui penjangkaran dan penumbuhan pengetahuan serta terobosan dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus kembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.

- TERTATA : Secara umum, makna “tertata” adalah *tertib administrasi dan tertib substansi*. Artinya, aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.
- RELIGIUS : Pada aspek religius ini, peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan.
- AKTUAL : Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- SINERGI : Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi

baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Upaya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi di tingkat perangkat daerah juga harus ditingkatkan melalui penjenjangan akuntabilitas kinerja sehingga dapat memberi kontribusi yang nyata pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

B. Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah.

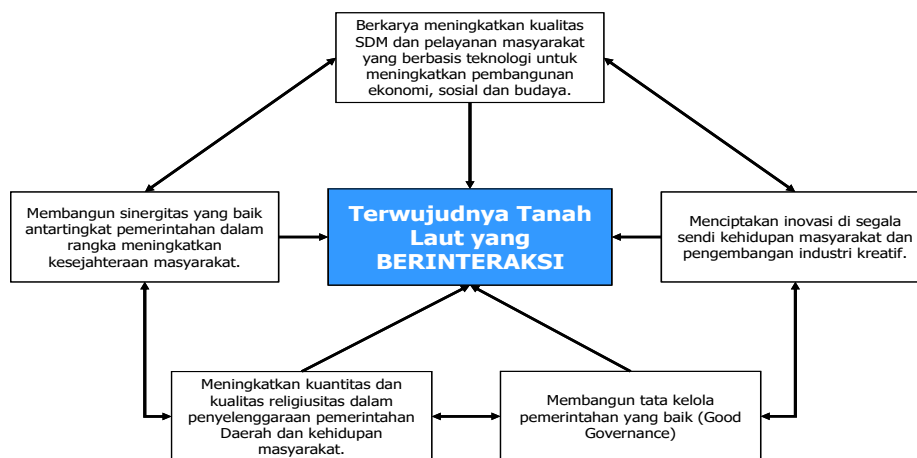
Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “**Tanah Laut yang BERINTERAKSI**”, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aspek BERKARYA diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut. Aspek INOVASI diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat

dan pengembangan industri kreatif. Aspek TERTATA diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Aspek RELIGIUS diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat. Sedangkan aspek AKTUAL dan SINERGI diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara grafis, hubungan antara Visi dengan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah seperti yang ditunjukkan pada Gambar dan Tabel di bawah ini.

Gambar Keterkaitan Visi dengan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023



Tabel

Keterkaitan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

VISI : Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI	
Pokok-Pokok Visi	MISI
BERKARYA	1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
INOVASI	2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
TERTATA	3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).
RELIGIUS	4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
AKTUAL SINERGI	5. Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian memiliki keunggulan-keunggulan atau kelebihan-kelebihan dan daya saing yang tinggi menuju “ **Tanah Laut yang BERINTERAKSI**”.

Keunggulan ini dapat diwujudkan mempersyaratkan adanya potensi dan kompetensi untuk bisa lebih produktif, memiliki daya kreatif dan inovatif yang tinggi sesuai tuntutan lingkungan strategi yang senantiasa terus mengalami perubahan dan tumbuh kembang yang semakin dinamis dan komplek. Lebih produktif berarti menghasilkan sesuai dengan yang diharapkan, dan memiliki daya kreasi dan inovasi produk secara berkelanjutan yang tinggi, serta memiliki daya saing, baik daya saing komparatif maupun daya saing manfaat (*comparative and advantage competitive*) untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tanah Laut menjadi masyarakat yang sejahtera dari segi ekonomi, serta rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat yang dilandasi dengan meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berkembangnya kehidupan demokrasi dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat.

Kompetensi ini merupakan kemampuan yang berupa pengetahuan, keahlian, dan ketrampilan, sikap dan perilaku serta etika yang diperlukan untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi dan peran yang dimainkannya. Karenanya menuntut adanya “*Sense of responsibility and professionally*” dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan peran masing-masing. *Sense of responsibility*, menghendaki setiap pelaku kepentingan memiliki rasa bertanggung jawab, yakni mau dan mampu bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan segala sikap, perilaku, tindakan dalam bingkai melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, dan kewenangan yang diamanahkan kepadanya. Sementara *professionally* lebih mengarah pada kompetensi bagi setiap pelaku kepentingan. Kompetensi merupakan kemampuan yang berupa pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya.

Tujuan ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang diserahkan kepada SKPD. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian operasional dan keterkaitan terhadap tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana berikut:

1. Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja.
2. Meningkatkan Kesempatan Kerja.
3. Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial.
4. Meningkatkan Produktivitas Sektor Industri.
5. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Keterkaitan Tujuan Renstra dengan Misi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023:

- A. Untuk tujuan 1 : Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja selaras dengan **Misi 1** yaitu Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
- B. Untuk Tujuan 2 dan 3 : Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial selaras dengan **Misi 5** yaitu Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- C. Untuk Tujuan 4 : Meningkatkan Produktivitas Sektor Industri selaras dengan **Misi 2** yaitu Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
- D. Untuk Tujuan 5 : Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat selaras dengan **Misi 3** yaitu Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dikelompokkan menurut urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah dan ditindaklanjuti dengan renstra SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja”** ditetapkan sasaran **“Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja”**.
2. Untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan Kesempatan Kerja”** ditetapkan sasaran **“Meningkatnya Kesempatan Kerja”**.
3. Untuk mencapai tujuan **Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial** ditetapkan sasaran **“Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial “**
4. Untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan Produktivitas Sektor Industri.”** ditetapkan sasaran **“Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri”**.
5. Untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat.”** ditetapkan sasaran **“Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat”**.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disnakerind dapat dilihat pada table sebagai berikut :

TABEL 4.1									
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN									
KABUPATEN TANAH LAUT									
NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69,90%	70,30%	71%	71,12%	71,90%
2	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat kesempatan kerja	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat kesempatan kerja	3%	3,5%	4%	5,5%	6,5%
3	Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentasi penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentasi penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	32,5%	35%	37,5%	40%	42,5%
4	Meningkatkan Produktivitas Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	13,50%	14,17%	14,87%	15,57%	16,35%
5	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key performance indicators (KPI)* dapat diartikan sebagai ukuran atau Indikator yang akan memberikan informasi sejauh mana kita telah berhasil mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan sehingga dalam penyusunan jelas, spesifik dan terukur (measurable) dan harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur. Komitmen dan

dukungan pimpinan dan stakeholder lainnya tetap menjadi kunci utama bertemunya persepsi yang sama antara dua komponen dalam menentukan sasaran dan tujuan, merupakan modal untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan Indikator Kinerja Utama, yaitu :

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Pe-nanggung g Jawab / Sum-ber Data
1	Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk 15 >}} \times 100\%$	Bidang PPTK dan UPT. BLK / BPS
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	$\frac{\text{Jumlah penduduk bekerja}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	Bidang PPTK/BP S
3	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentase Penurunan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	$\frac{\text{Jumlah kasus perselisihan HI tahun } n-1 - (\text{jumlah kasus perselisihan tahun } n)}{\text{Jumlah kasus perselisihan HI tahun } n-1} \times 100\%$	Bidang HJSPTK
4	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	$\frac{\text{PDRB tahun } N - \text{PDRB tahun } N-1}{\text{PDRB Tahun } N} \times 100\%$	Bidang Perin-dustri-an/ BPS
5	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Sekretar-iat

E. PERJANJIAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan mencapai target kinerja, sebagaimana

yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan maka pada tahun 2021 ditetapkan target kinerja tahunan yang telah di tandatangani oleh Bupati Tanah Laut, Kepala Dinas dan Para Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71 %
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat kesempatan kerja	4 %
3	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	37,5 %
4	Meningkatnya produktivitas sektor industri	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	14,87 %
5	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik

2. Sekretaris

No	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi.	Nilai Sakip Disnakerind	Baik
		Nilai Reformasi Birokrasi	Sangat Baik

3. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

No	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Melaksanakan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja SKPD yang Akuntabel	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja	5 Laporan
		Jumlah Kegiatan	2 Pameran

4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tertib Adminstrasi Barang milik daerah	Jumlah Jasa Penjamin Barang Milik Daerah dan Jumlah Orang	3 Orang dan 6 Jenis
2	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Jumlah Orang	91 Stel 8 Orang/Tahun
3	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Jenis Bahan bacaan Jumlah Tamu yang difasilitasi Jumlah Peserta dan Perjalanan Dinas.	178 Buah 19 Jenis dan 4 Jenis 4 Jenis 2 Jenis 278 Tamu 500 Orang dan 295 Orang/Kali
4	Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Meubel Jumlah Sarpras Gd Kantor	6 Buah 24 Buah
5	Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Orang, Surat masuk dan keluar Jumlah Jenis Jasa dan Alat komunikasi Pemeliharaan Sisten Informasi Jumlah jenis dan Orang	1500 Surat dan 3 Orang 6 Jenis dan 2 Unit Aplikasi/Tahun 3 Aplikasi/Tahun 16 Jenis dan 1 Orang

5.Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

No	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya perlindungan lembaga ketenagakerjaan untuk harmonisasi hubungan industrial	Cakupan kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	27 %

6.Kasi Persyaratan Kerja

No	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Memfasilitasi perlindungan hukum dan jamsostek	Jumlah Peraturan Perusahaan yg disahkan	8 Dokumen

7.Kasi Hubungan Industrial

No	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Menyelenggaraan Hubungan Industrial yang Baik	Jumlah Kasus	9 Kasus

8.Kasi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

No	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Memfasilitasi perlindungan hukum dan jamsostek	Jumlah Peserta BPJS	16000 Orang

9. Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

No	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase peserta latih yang kompeten	65%
2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	6 %

10.Kasi Pelatihan dan Produktifitas

No	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Melaksanakan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Pencari kerja yang di-magangkan	10 Orang
2	Melaksanakan Pembinaan Lembaga pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Dokumen dan Orang	1 Dokumen dan 70 Orang
3	Melaksanakan Konsultasi Produktifitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Orang/ Pelaku Perusahaan Kecil, Mikri dan Menengah	20 Orang

11. Kasi Penempatan Tenaga Kerja

No	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Melaksanakan Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/kota	1.1 Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	180 Orang
		1.2 Jumlah Pencari Kerja yang mendapat Bimbingan dan Penyuluhan	100 Orang
2	Melaksanakan Penerbitan LPTKS dalam 1 daerah	Banyaknya monitoring ke LPTKS	4 Kali
3	Mengelola Informasi Pasar Kerja	Jumlah Job Fair di Tanah Laut	1 Kali

12.Kasi Perluasan Kesempatan Kerja

No	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Melaksanakan Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Orang wirausaha baru	160 Orang
2	Melaksanakan Perlindungan PMI di Daerah Kab/Kota	Jumlah Orang	40 PMI Purna & 60 CPMI
3	Melaksanakan Penyusunan Dokumen Rencana	Jumlah Dokumen RTKD	1 Dokumen

13.Kabid Perindustrian

NO	Sasaran Strategis Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya teknologi, inovasi dan	Persentase IKM yang mengem-	100 %

	keaktivitas pelaku industri	bangkan inovasi dan kreativitas industri	
2	Menguatnya struktur industri	Cakupan fasilitasi tahapan pengembangan kawasan peruntukkan industri	50 %

14. Kasi Pembangunan Sumber Daya Industri

No	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Mengoptimalkan Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Industri	1.1 Jumlah pelatihan dan Pemagangan IKM	1.1 84 IKM
		1.2 Jumlah IKM yang meningkatkan kreatifitas desain produknya	1.2 20 IKM
		1.3 Jumlah IKM yang menggunakan inovasi teknologi dalam kegiatan produksi	1.3 10 IKM

15.Kasi Sarana dan Prasarana Industri

No	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Mengoptimalkan Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Industri	1.1 Jumlah Kebijakan Industri	1.1 1 Laporan
		1.2 Jumlah Klaster Industri	1.2 2 Klaster industri
2	Memfasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri lingkup kabupaten	Jumlah IKM dan Industri Besar	3300 IKM & 50 Industri besar

16. Kasi Pemberdayaan Industri

No	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Mengoptimalkan Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Industri	1.1 Jumlah Pameran	1.1 3 Kali
		1.2 Jumlah Mobil Toko	1.2 1 Unit
		1.3 Jumlah Rumah Kemasan	1.3 1 Unit
		1.4 Jumlah Laporan	1.4 2 Laporan

17.Kepala UPT. BLK

No	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Melaksanakan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetisi	Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih	500 Orang

18.Kasubbag Tata Usaha BLK

No	Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Tertib Adminstrasi Barang milik daerah	Jumlah orang tenaga petugas penjaga malam	1 Orang
2	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.1 Jumlah Jenis komponen instalasi/penerangan bangunan kantor 2.2 Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan 2.3 Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan 2.4 Jumlah Jenis Bahan bacaan dan Peraturan perundang Undangan 2.5 Jumlah Tamu 2.6 Jumlah Orang yang melakukan Perjalanan Dinas dan Mengikuti Rapat	2.1 6 Jenis 2.2 27 Jenis 2.3 4 Jenis 2.4 1 Jenis 2.5 82 Orang 2.6 75 Orang dan 34Orang/Kali
3	Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah	3.1 Jumlah Mebeleur 3.2 Jumlah Perlengkapan	3.1 4 Jenis 3.2 2 Jenis
4	Melaksanakan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	4.1 Jumlah Orang Tenaga Pelayanan administrasi terpadu dan Surat masuk dan keluar 4.2 Jumlah Jenis Jasa komunikasi ,Sumber daya air dan listrik 4.3 Jumlah orang tenaga petugas Kios 3 in 1 4.4 Jumlah Tenaga Kebersihan dan Jenis Alat Penunjang Kebersihan kantor	4.1 300 Surat dan 1 Orang 4.2 3 Jenis 4.3 3 Orang 4.4 10 Jenis dan 2 Orang
5	Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik daerah	5.1 Jumlah jasa/unit pemeliharaan dan perizinan 5.2 Jumlah Jenis Peralatan Kerja	5.1 7 Unit 5.2 4 Jenis

		5.3 Jumlah Jaringan listrik dan gedung	5.3 3 Gedung dan 5 Unit
		5.4 Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana gd kantor	5.4 11 Jenis

F. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam mendukung visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang dijabarkan dalam sasaran strategis maka untuk mencapai sasaran tersebut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah :

Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan :

1) PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH

a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b) Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor :
3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5. Fasilitas Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

c) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran : Rp.

d) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

e) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

1. Pengamanan Barang Milik Daerah

f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Pengadaan Mebel
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

h) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

2) PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

a) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro

3) PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA :

a) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
2. Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja

b) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

1. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

c) Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil

1. Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil

4) PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

a) Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota

1. Pelayanan antar Kerja
2. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
3. Perluasan Kesempatan Kerja

b) Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengawasan dan Pengendalian LPTKS

c) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

1. Job Fair/Bursa Kerja

d) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

1. Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan

5) PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

a) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
2. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

b) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

1. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota

UPT. BLK

1) PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH

a) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

b) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

1. Pengamanan Barang Milik Daerah

c) Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
5. Fasilitas Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Pengadaan Mebel

e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya
4. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Urusan Pilihan Bidang Perindustrian :

1) PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

a) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

5. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

2) PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

- a) Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**
1. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1) Sasaran RPJMD

Target dan capaian Sasaran RPJMD yang diampu oleh Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian pada Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran RPJMD)	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2020			Tahun 2021		
			Target	Real- isasi	Ca- paian	Target	Re- alisa si	Ca- paian
1	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,00	3,57	84%	4,0	3,52	113%
2	Meningkatnya Kontribusi Industri Kreatif dalam perekonomian	Jumlah Industri Kreatif yang tumbuh dan berkembang (unit)	10 Unit Usaha	25 Unit Usaha	250 %	78 Unit Usaha	103 Unit Usaha	132 %

A. Penjelasan Tentang Meningkatnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

$$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$$

Keterangan :

TPT : Tingkat pengangguran terbuka (%)

PP : Jumlah pengangguran (orang)

PAK : Jumlah angkatan kerja (orang)

(Sumber data oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut)

Merujuk pada *Buku Rencana Tenaga Kerja (RTK) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021-2024* pada Bab 5, TPT menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT pada tahun 2021 sebesar 3,52 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 orang penganggur. Pada tahun 2021, TPT mengalami penurunan sebesar 0,05 persen poin dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 3,57 persen. Jika kita perhatikan capaian 3,52 persen ini dibawah angka target yang diharapkan oleh Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 yaitu 4,0 persen. Namun di sisi lain, angka TPT kabupaten Tanah Laut masih di bawah angka TPT Provinsi Kal-Sel yaitu 4,95 persen.

TPT yang mengalami penurunan walaupun sangat tipis ini masih dipengaruhi oleh dampak Pandemi Covid-19, seperti gambaran faktor ekonomi dan faktor kemiskinan sebagai mana berikut ini:

- a. **Faktor Ekonomi**, Rilis Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan Ketenagakerjaan BPS Prov. Kal-Sel di tahun 2021, disampaikan bahwa secara umum perekonomian mulai menggeliat yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi ke arah yg positif pada seluruh kategori Lapangan Usaha Ekonomi Kalsel. Hal ini memberikan sinyal yang positif bagi perkembangan ketenagakerjaan.
- f. **Faktor Kemiskinan** masih turut menahan kemampuan daya beli masyarakat, terutama ketika ada kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Level 3 maupun level 4. Masyarakat masih bisa menjalankan kegiatan perekonomian dengan menjalankan *proses yang ketat, termasuk pem-*

batasan waktu berusaha dan mengurangi kapasitas pelayanan. Kegiatan PPKM level 3 dan 4 ini juga di dukung oleh pengawasan atau pemantauan ketat dari Tim Satgas Covid-19 Kabupaten Tanah Laut

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 3,52% pada tahun 2021 menggambarkan masih diperlukannya peran Pemerintah Daerah untuk mengayomi masyarakat. Lebih lanjut seperti dipaparkan pada *Bab 1 Buku Rencana Tenaga Kerja (RTK) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021-2024*, Peluang dan tantangan ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Laut pada tahun-tahun ke depan akan semakin kompleks dimana Kabupaten Tanah Laut akan menghadapi beberapa isu strategis sebagai berikut, yaitu :

1. ***Pasca pandemi COVID-19.*** Secara global pandemi Covid-19 melanda dunia pada tahun 2020 dan terasa dampaknya hingga sekarang ini diberbagai sektor seperti sektor ekonomi, sektor ketenagakerjaan, sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor kependudukan dan lain-lain.
2. ***Bonus demografi penduduk*** yang dimulai pada tahun 2025 dan akan mengalami masa puncak pada tahun 2030. Bonus demografi ini menggambarkan pertambahan penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif.
3. ***Era digital 4.0***, atau revolusi industri keempat yang menggambarkan dimana era dominasi mesin-mesin berteknologi canggih (komputerisasi) yang akan bersaing dengan tenaga kerja manusia.
4. ***Era society 5.0***, yang menggambarkan era inovasi teknologi informasi untuk menyelesaikan masalah sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada *Bab 6 Buku Rencana Tenaga Kerja (RTK) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021-2024* disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, *perlu menyusun perencanaan dan implementasi kebijakan yang tepat sasaran dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis diatas.* Pembinaan ketenagakerjaan harus dilakukan mulai hulu hingga hilir, sehingga tidak tepat jika ada anggapan bahwa pembinaan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan mengandalkan suatu kebijakan tunggal dan tidak mungkin apabila tanggungjawabnya hanya diletakkan pada satu atau beberapa instansi saja.

Pada tingkat Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah, masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang kompleks dan luas sehingga bersifat multi

dimensial antar berbagai sektor seperti faktor ekonomi, faktor sosial, faktor politis dan sebagainya, oleh sebab itu pembinaannya pun membutuhkan suatu kebijakan yang komprehensif dan multi dimensi pula. *Untuk itu dibutuhkan upaya-upaya yang bersifat komprehensif dari seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut termasuk upaya kebijakan, strategi dan program pembangunan di bidang ketenagakerjaan.*

Memperhatikan amanat UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2013 pasal 4, Visi, Misi, dan 7 (tujuh) program unggulan Bupati dan Wakil Bupati serta tantangan dan permasalahan sektor ketenagakerjaan pada saat ini dan di masa depan maka **tujuan pembangunan sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Laut dalam rangka menurunkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** secara lebih spesifik dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) **Meningkatkan pertumbuhan, persebaran, dan perluasan kesempatan kerja di berbagai sektor lapangan usaha** yang diampu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis lainnya, yang terdiri atas 17 sektor yaitu :
 - a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
 - b. Pertambangan dan Penggalan;
 - c. Industri Pengolahan;
 - d. Pengadaan Listrik dan Gas;
 - e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang;
 - f. Konstruksi;
 - g. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
 - h. Transportasi dan Pergudangan;
 - i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
 - j. Informasi dan Komunikasi;
 - k. Jasa Keuangan dan Asuransi;
 - l. Real Estate;
 - m. Jasa Perusahaan;
 - n. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
 - o. Jasa Pendidikan;
 - p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
 - q. Jasa Lainnya.
- 2) sehingga terjadi peningkatan pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran. Pengangguran terjadi akibat dari ketidakseim-

banagan antara tersedianya lapangan pekerjaan dengan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan

- 3) **Meningkatkan kualitas penyerapan tenaga kerja dan kompetensi tenaga kerja** sehingga mampu menghasilkan nilai tambah lebih tinggi serta menyandang status dan jenis ketenagakerjaan lebih baik. Rendahnya kualitas angkatan kerja baik dari segi pendidikan formal maupun keterampilan (kompetensi) menjadi permasalahan bagi tenaga kerja.
- 4) **Meningkatkan fleksibilitas pasar kerja dengan cara memberi kesempatan lebih luas bagi dunia usaha maupun masyarakat untuk berperan dalam pembangunan tenaga kerja.** Pemecahan permasalahan ketenagakerjaan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- 5) **Meningkatkan perlindungan keamanan, keselamatan dan kesejahteraan pekerja.** Perlindungan tenaga kerja mencakup jaminan pemenuhan hak dasar pekerja, penyediaan jaminan sosial (BPJS) bagi pekerja formal dan informal, pencegahan pekerja anak, dan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.

Untuk mencapai tujuan pembangunan ketenagakerjaan diperlukan **kebijakan umum** yang menitikberatkan pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan :

- r. *Kebijakan umum di bidang ketenagakerjaan* terutama dari sisi penguatan kebutuhan (*demand*) mencakup:
 - 1) Mempersiapkan tenaga kerja memasuki pasar tenaga kerja;
 - 2) Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan memperbaiki iklim ketenagakerjaan;
 - 3) Meningkatkan kerja kepada sumber daya produktif;
 - 4) Mendorong pengembangan ekonomi perdesaan;
 - 5) Memfungsikan pasar tenaga kerja:
- s. *Kebijakan umum pengendalian penduduk*, mencakup pembangunan di bidang kesehatan penduduk/masyarakat untuk mendorong terciptanya tenaga kerja berkualitas dan berdaya saing, dan kebijakan pengendalian tambahan angkatan kerja, termasuk upaya menahan anak untuk tetap bersekolah ketika mereka merupakan Angkatan kerja di usia sekolah. Dengan pendekatan menanamkan pentingnya nilai pendidikan bagi masa depan anak-anak dalam keluarga.

- t. Kebijakan umum Investasi. Kebijakan penanaman modal akan dapat memberi arah bagi upaya pengembangan dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Tanah Laut yang pada akhirnya akan membuka lapangan usaha dan menyerap tenaga kerja baru.

Pelaksanaan Kebijakan Umum di atas harus di dukung dengan **Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)**. Kebijakan pendidikan bertujuan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja. Tersedianya penduduk usia kerja yang terdidik dan terampil merupakan dasar perencanaan tenaga kerja yang terdidik dan terampil merupakan dasar perencanaan tenaga kerja, karena dengan demikian pada umumnya akan terbuka ketersediaan perluasan dan peluang pasar kerja yang lebih besar dan berkualitas. Tenaga kerja yang berkualitas otomatis akan dicari oleh berbagai pelaku usaha didalam maupun luar negeri. Pendidikan tidak terbatas pada pendidikan formal namun juga kegiatan-kegiatan pendidikan informal termasuk pendidikan keluarga, pendidikan agama serta kegiatan yang terkait yang dapat menumbuhkan minat belajar.

Adapun kebijakan terkait dengan pembangunan bidang ketenagakerjaan di bidang pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut:

1. Mendorong tersedianya lembaga-lembaga pelatihan yang pelatihannya berorientasi pada dunia kerja. Dengan demikian, angkatan kerja tidak langsung masuk pasar kerja, akan tetapi terserap lebih dahulu ke Lembaga pelatihan, sehingga menciptakan keluaran berupa tenaga kerja yang lebih siap pakai.
2. Revitalisasi Pelatihan Kerja (Balai Latihan Kerja) melalui perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana pelatihan yang ada, serta mendorong UPTD Balai Latihan Kerja untuk semakin mudah diakses oleh berbagai kalangan, termasuk pula melaksanakan pelatihan ke desa dengan akses dana desa, berdasarkan hasil musrembang.
3. Peningkatan Keterampilan Kerja dan Penguatan Pendidikan Orang Dewasa yang diselenggarakan baik dinas pendidikan maupun SKPD teknis lainnya;
4. Mendorong peningkatan pelatihan keterampilan kerja para santri pondok pesantren, termasuk bantuan sarana, agar dapat melakukan usaha produktif melalui BLK Komunitas;
5. Mendorong peningkatan pelatihan keterampilan kerja para pencari kerja, melalui bantuan sarana prasarana LPK Swasta.

6. Penciptaan kemudahan akses informasi pelatihan melalui IT, sertifikasi dan penempatan (kios 3 in 1) bagi calon tenaga kerja maupun tenaga kerja;
7. Peningkatan jumlah dan kualitas instruktur secara bertahap melalui up grading, uji on the job training instruktur;
8. Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi secara konsisten, didukung pengembangan TUK (Tempat Uji Kompetensi);
9. Mengarahkan Pelatihan Berbasis Masyarakat untuk mendorong terciptanya lapangan kerja usaha baru dan mendorong keberanian untuk memulai usaha baru (penumbuhan wirausaha baru) bagi pencari kerja muda, baik sarjana baru maupun non sarjana. Termasuk pengembangan pelatihan alih kerja (PAKER) atau alih profesi pekerja ter-PHK;
10. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan kerja di berbagai bidang keahlian, melalui Lembaga pelatihan kerja dengan memperhatikan jenis dan derajat kedisabilitasnya;
11. Sertifikasi kompetensi di akhir pelatihan dan pelaksanaan Uji Kompetensi bagi lulusan BLK Pemerintah, BLK Komunitas, LPK Swasta oleh lembaga Sertifikasi Profesi;
12. Membangun jejaring diantara pemangku kepentingan (stakeholders) bidang pelatihan kerja yang meliputi antara lain: dunia pendidikan (pendidikan umum kejuruan, maupun perguruan tinggi), dunia usaha dan dunia industri melalui Bursa Kerja Khusus (BKK);
13. Pengembangan program dan peningkatan kualitas kelembagaan yang setara dengan standar kebutuhan pasar kerja yang bertaraf nasional maupun internasional.
14. Mengoptimalkan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan;

Semakin meningkatnya indikator-indikator di atas diharapkan akan memperbesar kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Tanah Laut. Pada bidang ketenagakerjaan perlu suatu kebijakan yang tidak hanya memperbesar akses dalam informasi pasar kerja melainkan juga terhadap kesiapan tenaga kerja dalam daerah. Salah satu bentuk kesiapan adalah perlunya pemetaan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja yang memenuhi standar nasional maupun internasional. Dengan melakukan pemetaan kompetensi dan sertifikasi keahlian diharapkan dapat memperbesar daya saing tenaga kerja dalam daerah terhadap tenaga kerja yang berasal dari luar kabupaten/kota atau luar provinsi bahkan tenaga kerja asing.

B. PENJELASAN TENTANG INDUSTRI KREATIF

Industri Kecil Menengah (IKM) adalah industri yang memiliki skala industri kecil dan menengah. Menurut Peraturan Kementerian Perindustrian No. 64 tahun 2016, industri kecil adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, memiliki nilai investasi kurang dari 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan, yang dimaksud dengan industri menengah adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang dan nilai investasi minimal 1 miliar rupiah atau memiliki karyawan minimal 20 orang dan nilai investasi maksimal 15 miliar rupiah.

Tabel

Jumlah IKM yang Mengembangkan Inovasi dan Kreativitas Industri
di Tahun 2020 dan Tahun 2021

Tahun 2020			Tahun 2021		
No	Industri Kreatif	Alamat	No	Industri Kreatif	Alamat
1	IKM Batu Birah Sasirangan	Desa Batu Tungku, Kec. Panyipatan	1	IKM Batu Birah Sasirangan	Desa Batu Tungku, Kec. Panyipatan
2	IKM Bumi Asih Sasirangan	Desa Bumi Asih, Kec. Panyipatan	2	IKM Bumi Asih Sasirangan	Desa Bumi Asih, Kec. Panyipatan
3	IKM Rumah Sasirangan Asam - Asam	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong	3	IKM Rumah Sasirangan Asam - Asam	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong
4	IKM Sasirangan Asam-Asam Berkarya	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong	4	IKM Sasirangan Asam-Asam Berkarya	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong
5	IKM Pengolah Daging Bina Keluarga	Desa Sungai Pinang, Kec. Tambang Ulang	5	IKM Pengolah Daging Bina Keluarga	Desa Sungai Pinang, Kec. Tambang Ulang
6	IKM Pengolah Daging Sekar Kemuning	Desa Sumber Mulya, Kec. Pelaihari	6	IKM Pengolah Daging Sekar Kemuning	Desa Sumber Mulya, Kec. Pelaihari
7	IKM Asri Sasirangan	Desa Karang Rejo, Kec. Jorong	7	IKM Asri Sasirangan	Desa Karang Rejo, Kec. Jorong
8	IKM Kulit Insan Leather	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari	8	IKM Kulit Insan Leather	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari
9	IKM Karya Mulia <i>Creative</i> Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	9	IKM Karya Mulia <i>Creative</i> Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang
10	IKM Zidan Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	10	IKM Yazidan Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang
11	IKM Amanah Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	11	IKM Almanah Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang
12	IKM Kartar Sasirangan	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari	12	IKM Kartar Sasirangan	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari
13	IKM El Banjarie Eksklusif	Pelaihari	13	IKM El Banjarie Eksklusif	Pelaihari

14	IKM Kerajinan Anyaman Purun “Bunga Purun”	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati	14	IKM Kerajinan Anyaman Purun “Bunga Purun”	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati
15	IKM Sahabat Madu	Desa Sumber Makmur, Kec. Takisung	15	IKM Sahabat Madu	Desa Sumber Makmur, Kec. Takisung
16	IKM Permata Sejati Madu	Desa Telaga, Kec. Pelaihari	16	IKM Permata Sejati Madu	Desa Telaga, Kec. Pelaihari
17	IKM BYHAF Minuman Herbal	Desa Tirta jaya, Kec. Bajuin	17	IKM BYHAF Minuman Herbal	Desa Tirta jaya, Kec. Bajuin
18	IKM Faeyza RNH Collection	Desa Takisung, Kec. Takisung	18	IKM Faeyza RNH Collection	Desa Takisung, Kec. Takisung
19	IKM Cisyl Collection	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang	19	IKM Cisyl Collection	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang
20	IKM Lenn Made Collection	Desa Sungai Jelai, Kec. Tambang Ulang	20	IKM Lenn Made Collection	Desa Sungai Jelai, Kec. Tambang Ulang
21	IKM NJH Minuman Herbal	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap	21	IKM NJH Minuman Herbal	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap
22	IKM Minuman Herbal Mama Wulan	Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari	22	IKM Minuman Herbal Mama Wulan	Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari
23	IKM Pondok Jahit	Pelaihari	23	IKM Pondok Jahit	Ds. Beramban, Kec. Pelaihari
24	IKM Novie Konveksi	Pelaihari	24	IKM Novie Konveksi	Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari
25	IKM LuwesCollection	Pelaihari	25	IKM LuwesCollection	Ds. Bumi Jaya, Kec. Pelaihari
			26	IKM Radita Sasirangan	Martadah Baru, Kec. Pelaihari
			27	IKM Kambit Jaya Collection	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap
			28	IKM KA'MCE Sasirangan	Martadah Baru, Kec. Pelaihari
			29	IKM Bungas Sasirangan	Desa Tambang Ulang, Kec. Tambang Ulang
			30	IKM HAYAART	Desa Tampang, Kec. Pelaihari
			31	IKM Yeni Souvenir	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati
			32	IKM Karya Mandiri Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang
			33	IKM Arthadeva Sasirangan	Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang
			34	IKM Ferariaputri Sasirangan	Desa Tambang Ulang, Kec. Tambang Ulang

			35	IKM Ari Collection	Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari
			36	IKM 3 Srikandi	Desa Sungai Cuka, Kec. Kintap
			37	IKM Kunyit Sasirangan	Desa Kunyit, Kec. Bajuin
			38	IKM Blok D Sasirangan	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap
			39	IKM Maswara Sasirangan	Desa Jorong, Kec. Jorong
			40	IKM MIMI Collection	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari
			41	IKM Penjahit Hafiz	Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati
			42	IKM Berkah Sasirangan	Desa Bajuin, Kec. Bajuin
			43	IKM Rumah Jahit Septia	Karang Jawa, Kec. Pelaihari
			44	IKM Calap Baimbai	Desa Jorong, Kec. Jorong
			45	IKM Iyan Jahit	Pasar Tapandang Berseri, Kec. Pelaihari
			46	IKM Sasirangan Markisa	Desa Kebun Raya, Kec. Kintap
			47	IKM Comel Sasirangan	Desa Tebing Siring, Kec. Bajuin
			48	IKM Pondok Cobek	Desa Kandungan Lama, Kec. Panyipatan
			49	IKM Pengolah Limbah Botol Plastik Jailani	Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari
			50	IKM Bunga Artifisial Sri Wulandari	Desa Ketapang, Kec. Bajuin
			51	IKM Miniatur Kapal by SKN	Desa Bajuin, Kec. Bajuin
			52	IKM Kerajinan Paket Hantaran Shavana	Kel. Angsau, Kec. Pelaihari
			53	IKM Bunga Artifisial Esi Lukas	Desa Asam-Asam, Kec. Jorong
			54	IKM Gerah Polo Art Galery	Desa Gunung Makmur, Kec. Takisung
			55	IKM Perbengkelan Makmur Berkarya	Desa Gunung Makmur, Kec. Takisung
			56	IKM Kreanov POLITA-LA	Desa Panggung, Kec. Pelaihari

			57	IKM Hangit Craft	Desa Bingkulu, Kec. Tambang Ulang
			58	IKM Perbengkelan Karya Bersama Teknologi	Desa Pandan Sari, Kec. Kintap
			59	IKM Perbengkelan Maju Jaya	Desa Asam Jaya, Kec. Jorong
			60	IKM Perbengkelan Karya Gemilang	Desa Benua Tengah, Kec. Takisung
			61	IKM NS Teknik	Desa Gunung Makmur, Kec. Takisung
			62	IKM Perbengkelan SMR	Desa Benua Tengah, Kec. Takisung
			63	IKM Perbengkelan Abdul Mu'thie	Desa Bentok Kam-pung, Kec. Bati-Bati
			64	KUB Handil Maluka Jaya	Desa Handil Maluka, Kec. Bumi Makmur
			65	IKM Al Makka Sasirangan	Desa Kayu Habang, Kec. Tambang Ulang
			66	IKM Ainun Sasirangan	Desa Handil Babirik, Kec. Bumi Makmur
			67	IKM Bintang Sasirangan	Desa Banyu Irang, Kec. Bati - Bati
			68	IKM Farid Sasirangan	Desa Banyu Irang, Kec. Bati - Bati
			69	IKM Pondok Sasirangan	Ds. Gunung Raja, Kec. Bati - Bati
			70	IKM Keramat Handi-craft	Ds. Takisung, Kec. Takisung
			71	IKM Zulfa & Yara Col-lection	Ds. Bentok Kampung, Kec. Takisung
			72	IKM Salsabila Collec-tion	Ds. Gunung Makmur, Kec. Takisung
			73	IKM Art Collection	Ds. Sumber Makmur, Kecamatan Takisung
			74	IKM Rossy Collection	Ds. Benua Lawas, Kecamatan Takisung
			75	IKM Yeyen Shakila Collection	Kel. Karang Jawa, Kecamatan Pelaihari
			76	IKM Windy Collection	Ds. Benua Tengah, Kecamatan Takisung
			77	IKM Neyney Collec-tion	Ds. Gunung Makmur, Kec. Takisung
			78	IKM N&K Collection	Ds. Takisung, Kec. Takisung

			79	IKM Purajut	Kelurahan Angsau, Kec. Pelaihari
			80	IKM Makmur Jaya Lestari	Ds. Telaga Langsung, Kec. Takisung
			81	IKM Perbengkalan Jaya Lestari Teknik	Ds. Durian Bungkok, Kec. Batu Ampar
			82	IKM Sirajul Huda Konveksi	Kel. Karang Taruna, Kec. Pelaihari

Pada tahun 2020 dari target pertumbuhan jumlah IKM yang mengembangkan Inovasi dan Kreativitas Industri yang dicanangkan yaitu sebesar 40% dari total IKM unggulan yaitu sebanyak 25 IKM. Dan teralisasi sesuai dengan target yaitu sebanyak 25 IKM.

Sedangkan pada tahun 2021 target pertumbuhan jumlah IKM yang mengembangkan Inovasi dan Kreativitas Industri yang dicanangkan yaitu sebesar 80% dari total IKM unggulan yaitu sebanyak 50 IKM. Namun pada realisasinya, jumlah IKM yang mengembangkan Inovasi dan Kreativitas Industri sebanyak 82 IKM sebagaimana terinci pada tabel di atas.

Pertumbuhan IKM yang mengembangkan inovasi dan kreativitas industri ini terjadi dikarenakan adanya pelatihan dan pembinaan intensif dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut baik yang pendanaannya bersumber dari APBD Kab Tanah Laut, APBD Provinsi Kalimantan Selatan maupun melalui Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri (DAPATI) Kementerian Perindustrian RI. Di Tahun 2021, semenjak pandemi covid-19 melanda di seluruh wilayah Indonesia, dana - dana kegiatan pembinaan IKM yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut mengalami refocusing dalam rangka untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Oleh karenanya, sinergi kerjasama pembinaan IKM antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat diperlukan demi eksistensi keberadaan dan keberlangsungan usaha IKM.

Selain dari data pelatihan, data pertumbuhan jumlah industri yang mengembangkan inovasi dan kreativitas juga didapatkan dari Kegiatan Pendataan IKM se Kabupaten tanah Laut yang dilakukan rutin setiap tahun. Adapun pada tahun 2021 terdata sebanyak 3458 IKM dengan sebaran data sebagai berikut :

Tabel
Rekap data IKM Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021

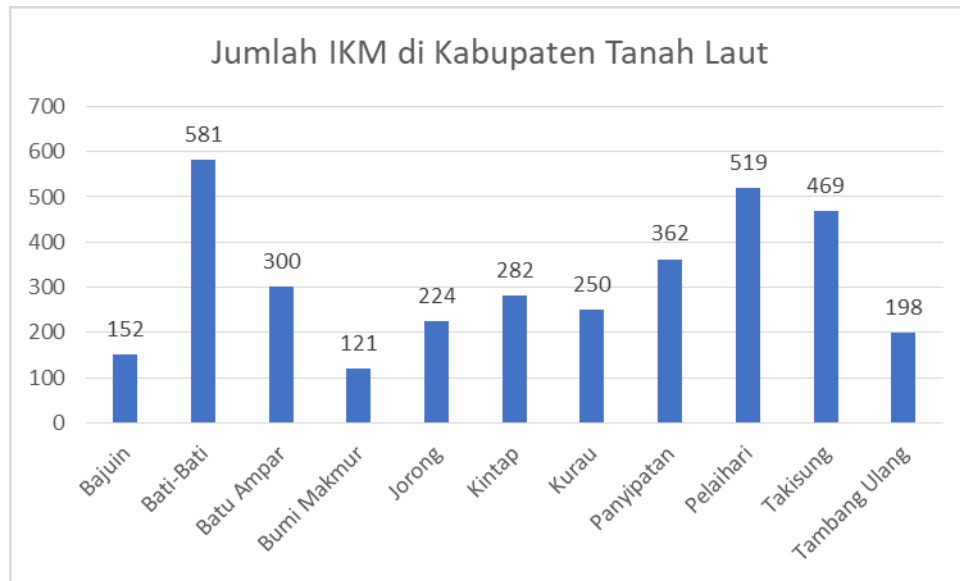
No	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah IKM
1	Kintap	Muara Kintap	25

		Sumber Jaya	11
		Sebamban Baru	19
		Mekar Sari	25
		Kebun Raya	44
		Sungai Cuka	18
		Bukit Mulya	15
		Salaman	5
		Pandan Sari	18
		Kintap Kecil	26
		Riam Adungan	4
		Pasir Putih	9
		Kintap	12
		Kintapura	21
		TOTAL	252
2	Bati-Bati	Banua Raya	17
		Bati-Bati	46
		Padang	30
		Ujung	27
		Pandahan	37
		Nusa Indah	18
		Lianganggang	55
		Kait-Kait	28
		Ujung Baru	36
		Kait-Kait Baru	31
		Sambangan	23
		Bentok Kampung	24
		Bentok Darat	28
		Banyu Irang	30
		TOTAL	430
3	Tambang Ulang	Martadah	9
		Martadah Baru	24
		Tambang Ulang	29
		Bingkulu	13
		Kayu Abang	13
		Gunung Raja	35
		Pulau Sari	27
		Sungai Pinang	16
		Sungai Jelai	21
		TOTAL	187
4	Batu Ampar	Tajau Mulya	10
		Gunung Mas	25
		Gunung Melati	20
		Tajau Pecah	33
		Jilatan Alur	16
		Jilatan	13
		Batu Ampar	20
		Ambawang	17
		Damit Hulu	15

		Damar Lima	16
		Damit	29
		D. Bungkuk	49
		Bluru	22
		Pantai Linuh	18
		TOTAL	303
5	Takisung	Gunung Makmur	45
		Benua Tengah	35
		Sumber Makmur	39
		Pagatan Besar	65
		Takisung	66
		Tabanio	25
		Telaga Langsung	25
		Benua Lawas	26
		Ranggang	24
		Ranggang Dalam	12
		Batilai	27
		K. Tambangan	83
		TOTAL	472
6	Jorong	Alur	19
		Karang Rejo	25
		Swarangan	22
		Batalang	3
		Sabuhur	20
		Asam Jaya	27
		Asri Mulya	15
		Jorong	50
		Muara Asam-Asam	19
		Asam-Asam	15
		Simpang 4 Sei Baru	20
		TOTAL	235
7	Bajuin	Tanjung	46
		Bajuin	12
		Sungai Bakar	9
		Kunyit	24
		Ketapang	19
		Pemalongan	13
		Tebing Siring	18
		Tirta Jaya	14
		Galam	16
		TOTAL	171
8	Bumi Makmur	Bumi Harapan	9
		H. Bl. Atas	15
		H. Bl. Bawah	4
		Handil Babirik	15
		Handil Gayam	13
		Kurau Utara	52
		Handil Suruk	11
		Pantai Harapan	15

		Sungai Rasau	60
		Handil Maluka	7
		H. Labuan Amas	12
		TOTAL	213
9	Kurau	Raden	9
		Bawah Layung	11
		Tambak Karya	19
		Tambak Sarinah	14
		Maluka Baulin	10
		Sarikandi	17
		Kurau	21
		Handil Negara	72
		Kali Besar	30
		Padang Luas	15
		Sungai Bakau	13
		TOTAL	231
10	Panyipatan	Batakan	92
		Batu Tungku	31
		Kandangan Lama	33
		Kuringkit	48
		Batu Mulya	37
		Panyipatan	36
		Bumi Asih	20
		Sukaramah	38
		Kandangan Baru	51
		Tanjung Dewa	27
		TOTAL	413
11	Pelaihari	Telaga	28
		Ambungan	29
		Panggung	11
		Pemuda	37
		Guntung Besar	12
		Kampung Baru	26
		Sungai Riam	38
		Sumber Mulia	25
		Atu-Atu	11
		Bumi Jaya	48
		Tampang	19
		Panjaratan	17
		Sarang Halang	18
		Pabahanan	21
		Karang Taruna	48
		Angsau	13
		Ujung Batu	18
		Tungkaran	7
		Panggung Baru	23
		Pelaihari	22
		TOTAL	471
	Jumlah Data IKM		3378

Jumlah IKM Tahun 2021 di Kab. Tanah Laut



Sehingga melalui hasil pendataan tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah IKM dari 3.378 industri menjadi 3.458 industri atau terjadi peningkatan sebesar 2,36 % .

Selain itu, pada tahun 2021 telah disusun Dokumen Perwilayahan Industri dimana dokumen ini bertujuan untuk memetakan Kawasan Peruntukan Industri yang ada di Kab Tanah Laut serta Bantuan Fasilitasi Hak Merek, Sistem Jaminan Halal dan Bantuan Hibah Mesin dan Peralatan yang pendanaannya bersumber dari dana DID dan Dana APBD Perubahan 2021.

- a. Beberapa IKM mendapatkan bantuan Hibah, antara lain :
 - a. Kelompok Koperasi Produsen Madu Permata Sejati berupa mesin kemas madu sebanyak 1 buah
 - b. KTH Tani Jaya Makmur berupa mesin kemas madu sebanyak 1 buah
 - c. Cisyl Collection berupa mesin jahit kulit dan mesin saset kulit masing-masing 1 buah
 - d. Faeyza RNH berupa mesin jahit kulit dan mesin saset kulit masing-masing 1 buah
 - e. Insan Leather Prolita berupa mesin jahit kulit dan mesin saset kulit masingIKM-masing 1 buah
 - f. IKM Batu Balai berupa mesin kristalisator, mesin penepung gula semut, mesin pe-
rajang gula, mesin sortasi gula dan oven gula semut masing-masing sebanyak 1
buah

- g. IKM Batu Tanah Laut Manis berupa mesin kristalisator, mesin penepung gula semut, mesin perajang gula, mesin sortasi gula dan oven gula semut masing-masing sebanyak 1 buah
- h. IKM Karya Mandiri Sejahtera alat pertukangan berupa Band saw 1 buah, bor listrik 4 buah, gerinda 4 buah, jig saw 3 buah, mata bor full size 4 set, mesin katan 3 buah, mesin pemotong kayu duduk 2 buah, pahat ukir full size 3 set, scroll saw 3 buah dan mesin pemotong kayu 1 buah.
- i. KWT Bina Keluarga berupa mesin giling daging sebanyak 2 buah.

b. Dari Dana DID, ada 87 IKM yang difasilitasi Hal Merk antara lain

NO	NAMA IKM	Merek	NAMA PEMILIK	ALAMAT
1	Hangit Craft	Hangit Craft	Supian Hadi	Bingkulu, Kec. Tambang Ulang
2	Rumah Sasirangan Asam-Asam	Rumah Sasirangan Asam-Asam	Noormilasari	JL. ILIR RT 005/002 Desa Asam-Asam, Kec. Jorong
3	Azmi Snack & Cookies	Azmi Snack & Cookies	Mimin Rahayu	Komp. Multi Madya B/34, Desa Liang Anggang
4	Yogatama	Yogatama	Supatmi	Jl. A. YANI KM 3.5, Desa Pabahanan, Kec. Pelaihari
5	Bunga Purun	Bunga Purun	Enyk Sulistiyaningsih	Komp. Liang Anggang Permai RT.005/RW.002 Desa Liang Anggang, Kec. Bati-Bati
6	Jingga Orange	Jingga Orange	Fazri Kurniawan	Jl. KH. Dewantara G'G Damai RT.007/RW.003 Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari
7	Pelangi Sasirangan	Pelangi Sasirangan	Hj. Rusdiana	JL.H.Yamin RT.01 RW.01, Desa Kandangan Lama
8	Kaganangan Sasirangan	Kaganangan Sasirangan	Debi Arisanti	JL.Mangga Besar RT 9/4, Desa Sarang Halang
9	Almanah Sasirangan	Almanah Sasirangan	Sulistianah	Desa Martadah Baru, RT.02/RW.01, Kec. Tambang Ulang
10	Dapur Mas Muflih	Dapur Mas Muflih	Nursahid	Komp. Wengga, Desa Pabahanan
11	LENNMADE	LENNMADE	Leny Apriyanti	Desa Sungai Jelai, Kec. Tambang Ulang

12	YAZIDAN Sasirangan	YAZIDAN Sasirangan	Romlah	Desa Martadah Baru RT 02 RW 01, Kec. Tambang Ulang
13	Kandangan Lama Manis	Kandangan Lama Manis	Sayid Hasan	Kec. Panyipatan
14	Kerupuk Udang Mama Madan	Kerupuk Udang Mama Madan	Rusmina	Desa Bawah Layung RT. 005/RW.002 Kec. Kurau
15	KUKER SEFHIA	KUKER SEFHIA	Betty Mahdalena	Jl. Sultan Hadi Wijaya, RT.006/RW. 003, Desa Bumi Jaya, Kec. Pelaihari
16	MB-LA	MB-LA	Chalifah	Komp. Multi Madya B/34, Desa Liang Anggang
17	Nas_Chips Aneka Kripik	Nas_Chips Aneka Kripik	Maulidatun Nisa	Pondok Indah Pelaihari III Blok. B No. 07 RT. 19, Desa Panggung Kec. Pelaihari
18	yuJAVA	yuJAVA	Epi Lestari	JL. KH. A. Nawawi, Komp. Permata Jingga 3 BLOK. B NO. 50
19	KA' MCE Sasirangan	KA' MCE Sasirangan	Rini Yulia Ningsih	Ds. Martadah Baru RT.010/RW.003
20	Tala Al Plus (TAP)	Tala Al Plus (TAP)	Amrullah	Desa Panjaratan, Kec. Pelaihari
21	Kunyit Sasirangan	Kunyit Sasirangan	Marsita Emaliasani	Jl. Soepirman RT.02/RW.01 Kec. Bajuin
22	GP. ART Galery	GP. ART Galery	Dasar Puji Handoko	Jl. Jend. Sudirman RT.017/RW.007 Desa Gunung Makmur, Kec. Takisung
23	Olahan Ziah	Olahan Ziah	Fauziah	Jl. A. Yani KM. 5.5 Komp. Mahkota Panggung
24	Nejma Collection	Nejma Collection	Susanti	K.H. Ahmad Nawawi, Kel. Karang Taruna
25	Pondok Sasirangan	Pondok Sasirangan	Salmiah	JL. PADAT KARYA RT 04 RW 02, Desa gunung Raja, Kec. Tambang Ulang
26	Peyek Pa Haji	Peyek Pa Haji	Sri Wahyu Lidiana	Jl. Matah Komp. Karunia Kembar I Blok. B No.09 Kelurahan Karang Taruna, Kabupaten Tanah Laut
27	Comel Sasirangan	Comel Sasirangan	Dewi Handayani	Jln. Tebing Siring I Dusun 2 RT.006 Kec.

				Bajuin
28	AR Madu	AR Madu	Bagus Amanu	Mantiwah RT.001/RW.001 Desa Telaga, kec. Pelaiha- ri
29	Citra Sofa Man- diri (CSM)	Citra Sofa Mandiri (CSM)	Dian Nugraha	Desa Mekar Sari, Kec. Kintap
30	ZI@DUL	ZI@DUL	Santoso	Kabuau Jl. Pelaihari Takisung RT.004/RW.002 Desa Telaga, kec. Pelaiha- ri
31	SMZ Snack	SMZ Snack	Santoso	Kabuau Jl. Pelaihari Takisung RT.004/RW.002 Desa Telaga, kec. Pelaiha- ri
32	Radjamadu	Radjamadu	Muhammad Noor Kolbi	Desa Sungai Pinang RT.001/RW.001, Kec. Tambang Ulang
33	Telaga Madu	Telaga Madu	Hariyadi	Mantiwah RT.001/RW.001 Desa Telaga, kec. Pelaiha- ri
34	Madu Gunung Katunun	Madu Gunung Katunun	Abd. Basir	Katunun RT.003/RW.003 Desa Telaga, Kec. Pelaiha- ri
35	Mimi Donkent	Mimi Donkent	Fenina Noor Islami- yah	Jl. KH. Mansyur RT.015/RW.001, Kel. Angsau, Kec. Pelai- hari
36	Windi Collection	Windi Collection	Wiwin Megawati	Benua Tengah RT.001/RW.001 Desa Banua Tengah, Kec. Takisung
37	Kerupuk Udang Mama Rian	Kerupuk Udang Mama Rian	Misru Minah	Jl. Pembangunan RT.001/RW.001 Desa Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur
38	Kambit Jaya Collection	Kambit Jaya Col- lection	Suwanti Ningsih	Jl. Untung Suropati RT.003/RW.001 Desa Kebun Raya, Kec. Kintap
39	Bu Kokom	Bu Kokom	Siti Komsianah	Jl. A. Yani Rt.001/RW.001 Desa Tirta Jaya, Kec. Ba- juin

40	Madu Kelulut Bakula	Madu Kelulut Baku-la	Dani Firnadi	Komp. Anugerah Hamparan Jl. Kol Soepirman Rt.011/RW.002, Kel. Atu-Atu
41	Kripik Audit	Kripik Audit	Normiati	Jl. Panembahan Senopati RT.10B, Dusun 04 Desa Bumi Jaya
42	Sakatalu	Trigona Sakatalu	Didiyani	Jl. Wisata Air Terjun Desa Sungai Bakar, Kec. Bajuin
43	Haidar Sasirangan	Haidar Sasirangan	Abdullah Hayat	Pemukiman 36 RT. 014 Simpang Empat Sei. Baru, Kec. Jorong
44	Blok'D Sasirangan	Blok'D Sasirangan	Paulyn K.I Palendeng	JL. A. ANTASARI, Desa Kebun Raya, Kec. Kintap
45	Hanum Meubel	Hanum Meubel	Dedik Setiawan	Jl. Dahlia RT.010/RW.003 Desa Kintap Kecil, Kec. Kintap
46	Mama Nabil	Mama Nabil	Nawiyati	Jl. Datu Daim, RT.VI/RW.II No. 61, Kec. Pelaihari
47	Kemiri Kita	Kemiri Kita	Ibnu Kasim	Desa Galam RT.004/RW.002 Kec. Bajuin
48	Sugeh	Sugeh	Ernawati	Jl. Merdeka RT.006/RW.002 Desa Tirta Jaya, Kec. Bajuin
49	Yotro Teko Berkah (YTB)	Yotro Teko Berkah (YTB)	Eka Dewi Kharisman	Jl. Pangeran Antasari RT.004/RW.001 Desa Tirta Jaya, Kec. Bajuin
50	Harisma	Harisma	Suhartin	Jl, Panglima Sudirman RT.002/RW.001 Desa Tirta jaya, Kec. Bajuin
51	Mama Naura	Mama Naura	Darti Sutini	Komp. Daffa Land No. 18 RT.018/RW.001, Kelurahan Atu-Atu, Kec. Pelaihari

52	3Tri	3Tri	Srinatun	Jl. Achmad Yani RT.007 Dusun 3 Desa Sungai Cuka, Kec. Kintap
53	Berkah Sasirangan Ba- juin	Berkah Sasirangan Bajuin	Herlinawati	Jl. Bina Ilmu RT.002/RW.001, De- sa Bajuin, Kec. Ba- juin
54	Dapur Riri	Dapur Riri	Mahrita Sari	Jayau RT.009/RW.002 Desa Ambungan, Kec. Pelaihari
55	Hibak Juice	Hibak Juice	Guntur Angga Sapu- tra	Jl. HM. Djapri No. 48 RT.004/RW.005 Desa Atu-Atu, Kec. Pelai- hari
56	Vania Renata	Vania Renata	Desi Mawita	Jl. Merdeka RT.006/RW.002 Desa Tirta Jaya, Kec. Ba- juin
57	Pinus Permai	Pinus Permai	Misna Yanti	Jln. Pariwisata RT.016 Desa Ba- takan, Kec. Pa- nyipatan
58	Iqlima Bakery	Iqlima Bakery	Wardatul Firdausi	Jl. Sejahtera RT.008 Desa Atu-Atu, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut
59	Basmen	Basmen	Muhammad Abdul Khair	Jln. Sarigading RT.001/RW.001, Kecamatan Takisung, Kab. Tanah Laut
60	Dibalik Rasa	Dibalik Rasa	Inayati Humairo	Jl. A. Yani Km. 6 Desa Panggung, Komp. Mahkota Panggung, Kecama- tan Pelaihari, Kab. Tanah Laut
61	Getuk D'Tiya	Getuk D'Tiya	Syaekun	Jln. Ibunda RT.005/RW.001, De- sa Tirta Jaya, Keca- matan Bajuin, Kab. Tanah Laut
62	Ridho Jaya 88	Ridho Jaya 88	Deddy Purnomo	Jl. Basuki Rahmat No. 26, RT.026/RW.006, Ke- lurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kab. Tanah Laut

63	Ridho'Rehan	Ridho'Rehan	Sari Emi	Jl. Simpang Tiga Gerogot RT.004/RW.002, Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kab. Tanah Laut
64	Sukodadi	Sukodadi	Suwito	Jln. A. Yani RT.009 , Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kab. Tanah Laut
65	Rengginang Bajuin	Rengginang Bajuin	Ade Ratna Ningsih	Jl. Sido Rukun RT.005/RW.003, Kecamatan Bajuin, Kab. Tanah Laut
66	Madu Mongso Ellyana	Madu Mongso Ellyana	Sulistianah	Jl. Tarini RT.002/RW.001 Desa Martadah Baru, Kec. Tambang Ulang, Kab. Tanah Laut
67	NK Collection	NK Collection	Lia	Jl. Sukadamai RT.003/RW.002 Kecamatan Takisung
68	Sannas	Sannas	Mustaqimah	Jl. Majapahit RT.005/RW.002 Desa Bumi Jaya, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut
69	Syyfa	Syyfa	Sugianti	Katunun Rt.003/RW.003 Desa Telaga, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut
70	Nyai Kasnah	Nyai Kasnah	Kasnah	Jl. Pelabuhan Barat RT.005/RW.002 Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut
71	Pukaha	Pukaha	Kartini	Jl. Pelabuhan RT.005/RW.002 Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut
72	Oemiy Bakery	Oemiy Bakery	Raden Rizki Amalia	Jl. Teluk Baru No. 33 RT.008/RW.003, Kelurahan Karang Taruna, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut
73	Ferdah	Ferdah	Badri	Jl. Majapahit RT.005/RW.002 Desa Bumi Jaya, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut

74	Cap Raja Gunung	Cap Raja Gunung	Widarningsih	G'g Harapan Maju RT.005/RW.002, Desa Gunung Raja, Kab. Tanah Laut
75	Parimata	Parimata	Masitah	Jl. Pelabuhan RT.005/RW.002 Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut
76	@ni Cake	@ni Cake	Andriani Purnamasari	Jl. Kayu Manis RT.003/RW.001, Desa Panggung, Kecamatan Pelaihari, Kab. Tanah Laut
77	Madu Kelulut Gunung Birah	Madu Kelulut Gunung Birah	H. Rosmani	Desa Kandungan Lama, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut
78	Kopi Banua	Kopi Banua	Marsudi	Jl. Hutan Kintap KM. 31 RT.007/RW.003 Desa Riam Adungan, Kec. Kintap, Kab. Tanah Laut
79	Kleti'an Bu Kar	Kleti'an Bu Kar	Karsini	Jl. Soepirman RT.003/RW.002 Desa Kunyit, Kec. Bajuin
80	Harapan Bersama	Harapan Bersama	Siti	Jl. Pelabuhan Barat RT.005/RW.002 Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan, Kab. Tanah Laut
81	di'Ela	di'Ela	Ela Nurlaili	Jl. Prof. Dr. Soepomo RT.021/RW.006 Kel. Angsau, Kec. Pelaihari
82	Mama Zeva	Mama Zeva	Suhartati	Desa Maluka Baulin RT.005/RW.001, Desa Maluka Baulin, Kec. Kurau
83	M@yun	M@yun	Mawardi	Desa Ambungan RT.011/RW.001, Kec. Pelaihari
84	Protala	Protala	Heriyanto	Jl. Raya Takisung Gunung Makmur NO. 15 RT.001/RW.001

85	Ferariaputri Sasirangan	Ferariaputri Sasirangan	Winarsih	Martadah Baru RT.001/RW.001 Kelurahan Martadah Baru
86	Khusnul	Khusnul	Hamrah	Pagatan Besar RT.004/RW.002, Kelurahan Pagatan Besar
87	Rumai	Rumai	Rumai Noor	Ranggang Dalam RT.003/RW.001
88	Kulak Sayur Kode Kelas 9	Kulak Sayur	Guntur Angga Saputra	Jl. HM. Djapri No. 48 RT.004/RW.005 Desa Atu-Atu, Kec. Pelaihari
89	Kulak Sayur Kode Kelas 35	Kulak Sayur	Rumai Noor	Ranggang Dalam RT.003/RW.001

- c. Pada tahun 2021, sebanyak 22 IKM Pangan yang difasilitasi Sistem Jaminan Halal melalui Dana DID dan sebanyak 8 IKM difasilitasi melalui Dana Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian RI sebagaimana yang terinci pada table berikut :

NO	NAMA IKM	NAMA PEMILIK	ALAMAT	PRODUK YANG DIHASILKAN
1	YOGATAMA	Supatmi	Jl. A. YANI KM 3.5, RT.002/RW.001 Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari	Minuman Segar Herbal
2	DAPUR MAS MUFLIH	Nursahid	Jl. RANCAH NO. 2 Kel. Pabahanan, Kec. Pelaihari	Susu Kurma dan Madu
3	BONZEE FOOD	Zida Amaludin	SUNGAI RIAM RT.12/RW.05 JL. RAYA BATAKAN, Desa Sungai Riam, Kec. Pelaihari	Produk Makanan Frozen
4	JINGGA ORANGE	Fazri Kurniawan	Jl. A. Yani GG Telaga Budi RT. 06/Rw.03 Kel. Angsau, Kec. Pelaihari	Keripik Tempe
5	PEYEK PA HAJI	Sri Wahyuni	Komp. Kurnia Kembar Matah, Kec. Pelaihari	Peyek

6	OLAHAN_ZIAH	Fauziah	Jl. A. Yani KM. 5,5 Komp. Mahkota panggung RT.06/RW.01, Kec. Pelaihari	Keripik
7	KUKER SEFHIA	Bety Magdalena	Jln. Sultan Hadi Wija- ya RT.006/RW.003 Ds. Bumi Jaya, Kec. Pelai- hari	Aneka Kue Kering
8	KERIPIK AUDIT	Normiati	Jl. Mataram RT. 003/RW.001, Ds. Bumi Jaya, Kec. Pelaihari	Keripik Tempe dan Pisang
9	RASA PENGEN LAGI	Tumini	Bumi Jaya, RT.001/RW.001, Ds. Bumi Jaya, Kec. Pelai- hari	Keripik Usus, Talas
10	TAHU TEMPE SUMBER BERKAH 88	Deddy Purnomo	Jl. Basuki Rahmat No. 26 RT.026/RW.006 Kecamatan Pelaihari	Tahu dan Tempe
11	SYFYA	Sugianti	Katunun	Keripik Jamur
12	KERUPUK UDANG MAMA MADAN	Rusmina	Desa Bawah Layung RT.005/RW.002, Kec. Kurau	Kerupuk Ikan dan Udang
13	KERUPUK UDANG MAMA RIAN	Misru Minah	JL. PEMBANGUNAN RT.001/RW.001, Desa Sungai Rasau, Kec. Bumi Makmur	Kerupuk Udang
14	AZMI SNACK & COOKIES	Mimin Rahayu	Komp. Multi Madya, Desa Liang Anggang, Kec. Bati-bati	Aneka Kue dan Bolu
15	MB-LA (MAJU BERSAMA-LIANG ANGGANG)	Chalifah	Komp. Multi Madya, Desa Liang Anggang, Kec. Bati-bati	Aneka Kue Kering
16	PINUS PERMAI	Misna Yanti	Pantai Asmara, Desa Muara Asam-Asam, Kec. Jorong	Kerupuk Udang dan Ikan
17	LAKSMANA BA- HARI	Sari Emi	Desa Swarangan, Kec. Jorong	Kerupuk Ikan dan Udang

18	TRIGONA SA-KATALU	Didiyani	Jl. Air Terjun Bajuin RT.003/RW.001, Desa Sungai Bakar, Kec. Bajuin	Madu
19	ROJO KOYO	Moch Ansary	Pasar PTPN Kec. Pelaihari	Susu Segar
20	KERUPUK ACIL A'AH	Ahdiah	Desa Pagatan Besar, Kec. Takisung	Amplang
21	BAKULA MADU	Dani Firnadi	Komp. Anugrah Ham-paran, Jl. Kol Soefirman RT.011/RW.002, Ds. Atu-atu	Madu
22	RISMA AMPLANG	Paridatul Aina	Jl. Raya Takisung	Amplang dan Kerupuk Ikan
23	NAS_CHIPS	Maulidatun Nisa	Komp. Pondok Indah Pelaihari III Blok. B No.07 RT.19, Ds. Panggung, Kec. Pelaihari	Keripik Singkong, Keripik Tahu, Keripik Kentang, Rempeyek, dan Bawang Goreng
24	KARYA BERSAMA	Norliana	Jl. Pelabuhan, RT.005 RW.001, Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	Kerupuk Ikan dan Udag
25	Usaha Mandiri/Nyai Kasnah	Kasnah	Jl. Pelabuhan, RT.005 RW.002, Desa Tanjung Dewa, Kec. Panyipatan	Kerupuk Ikan dan Udag
26	Zona Kopi	Rijani	Jln. A. Syairani, Kel. Sarang Halang, Kec. Pelaihari	Kopi
27	Kopi Pemalangan	Paidi	Jln. Trans 50 RT.06/RW.03, Ds. Pemalangan, Kec. Bajuin	Pengolahan Kopi
28	Hasan Al-Zahra	Hasan Rumambi	Jln. Telkom Ds. Ujung Batu, Kec. Pelaihari	Madu
29	Sahabat Madu	Kuswanto	Rombongan 4, RT.08 RW.04, Ds. Sumber Makmur, Kec. Takisung	Madu

30	Radjamadu	Muhammad Noor Kolbi	Ds. Sungai Pinang RT.001/Rw.001, Kec. Tambang Ulang	Madu
30	Madu Gunung Katunun	Abd. Basir	Katunun RT.003/RW.003 Ds. Katunun, Kec. Pelaihari	Madu

Selain berupa bantuan hibah peralatan dan fasilitasi Hak Merk dan Sistem Jaminan Halal, melalui dukungan dana DID serta dana DAK Kementerian Perindustrian RI pada tahun anggaran 2021 telah diadakan Mobil Toko sebagai salah satu alternatif promosi produk IKM. Dengan adanya Mobil Toko, maka promosi akan lebih mudah dilakukan yaitu dengan cara kebersamaan ketika ada kegiatan di desa semisal Kegiatan Ma-nunggal Tuntung Pandang dan kegiatan-kegiatan daerah lainnya. Sedangkan melalui anggaran dana DAK Kementerian Perindustrian RI telah dibangun Rumah Kemasan di area Desa Ambungan, Kecamatan Pelaihari yang bertujuan untuk memudahkan dan memfasilitasi IKM untuk meningkatkan kualitas kemasan yang dimiliki agar lebih berdaya saing.

A. Adapun Kendala-kendala yang dihadapi antara lain adalah :

1. Adanya Pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada aspek pemasaran.

Adanya Covid-19 sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Masyarakat lebih mengutamakan untuk membeli bahan kebutuhan pokok. Dengan adanya pandemi ini pula, even-even promosi dan pameran yang biasanya rutin dilaksanakan oleh kabupaten/provinsi dan pusat, saat ini berkurang daripada sebelumnya, sehingga tingkat penjualan produk IKM yang biasanya naik ketika ada even kegiatan, maka ketika even tersebut ditiadakan maka penjualan produk menjadi tidak sebesar tahun sebelumnya. Demikian juga obyek wisata yang menjadi tempat penjualan produk, dengan adanya pandemi obyek wisata tersebut mengalami penurunan pengunjung sehingga tingkat penjualan produk IKM pun menjadi menurun.

2. Adanya Pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada aspek pendanaan kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi dan fasilitasi penerapan teknologi tepat guna bagi IKM

Dengan adanya refocusing anggaran kegiatan berakibat pada pencapaian target penumbuhan IKM serta peningkatan kapasitas teknologi IKM tidak mencapai target sebagaimana

na yang tertuang pada renstra. Dalam rangka menyikapi hal tersebut, dilakukan beberapa langkah kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan pelatihan industri yang diupayakan berlokasi di Kabupaten Tanah Laut

B. Solusi

Solusi untuk memecahkan masalah tersebut antara lain :

1. Harapan kami, even-even promosi dan pameran serta obyek wisata tetap diselenggarakan dan dibuka dengan mematuhi protokol kesehatan. Sehingga hal ini dapat meningkatkan kembali penjualan produk IKM.
2. Kami akan mendorong IKM untuk dapat mengakses Program Gapura Karomah dikarenakan IKM - IKM yang baru bertumbuh juga memerlukan stimulus bantuan permodalan yang dalam hal ini dapat ditanggulangi melalui Program Gapura Karomah yaitu program Gerakan Peningkatan Usaha Rakyat melalui Kredit Tanpa Bunga dan Rente bagi Ekonomi Lemah yang berlangsung sejak tahun 2019 dan berlanjut hingga sekarang. Pada Tahun 2019 ada 6 orang IKM yang mengajukan permohonan dan di Tahun 2020 ada 11 IKM yang mengajukan usulan pada Program Gapura Karomah. Selain dari Program Gapura Karomah, usulan peralatan dan mesin dari kelompok IKM melalui proposal maupun melalui kegiatan Musrembang juga akan kami anggarkan di Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut.
3. Diperlukan pelatihan peningkatan kompetensi keterampilan berindustri yang diiringi dengan pelatihan soft skill dalam rangka membangun jiwa enterpreur dan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan juga dengan Bidang P2TK Disnakerind. Selain hal tersebut, pemilihan peserta pelatihan oleh Kepala Desa diharapkan juga akan lebih selektif lagi agar benar-benar yang berminat yang akan diikutsertakan dalam pelatihan.
4. Dalam rangka menyikapi refocusing anggaran kegiatan pelatihan, dilakukan beberapa langkah kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan pelatihan industri serta fasilitasi penerapan teknologi bagi IKM di Kabupaten Tanah Laut

C. Rencana Aksi

1. Akan lebih giat mempromosikan Gedung Dekranasda dan Gedung Pusat Promosi Sentra IKM Tambang Ulang sebagai tempat promosi produk IKM, baik pangan maupun ke-

rajinan. Selama ini promosi dilakukan melalui Media Sosial *Facebook* dengan alamat Fb : *Dekranasda Tanah Laut dan Puspro Tambang Ulang*), melalui *Instagram* dan melalui Aplikasi *Whats App*. Promosi yang akan dilakukan ditahun depan dengan cara membuat Aplikasi *E-commerce* yaitu berupa penjualan produk IKM secara online. Selain itu, kami akan bekerjasama dengan Radio Tuntung Pandang dan juga membuat brosur mengenai kedua tempat promosi tersebut.

2. Akan berkoordinasi dengan BT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mengenai Program Gapura Karomah serta akan terus mensosialisasikan program ini ke masyarakat dan ketika ada pelatihan-pelatihan. Selain hal tersebut, kami juga mendorong IKM untuk mengusulkan mesin dan peralatan yang diperlukan melalui proposal dan melalui Kegiatan Musrembang.
3. Akan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan SKPD terkait, juga akan membangun komunikasi dengan asosiasi maupun lembaga terkait lainnya untuk bersama-sama mendorong masyarakat untuk menumbuhkan jiwa enterpreneur melalui sosialisasi maupun pelatihan teknis lainnya.

2) Eselon II (Kepala Dinas)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan I	Capaian		
1.	Meningkatnya Daya Saing Tenaga	1 Tingkat partisipasi	72,03%	71%	72,27%	101,79%	71.9%	100,51%
2.	Meningkatnya Kesempatan Kerja	1 Tingkat kesempatan kerja	96,43%	4%	96,48%	2412%	6.5%	1484,30%
3.	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial	1 Persentasi penurunan kasus perselisihan	19%	37,5%	44%	117,33%	42,5%	43,26%
4.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	1 Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	12,29%	14,87%	13,19%	89%	16,35%	80,67%
5.	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	100%	Sangat Baik	90%

Dalam rangka memperoleh informasi kinerja yang penting dan memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dapat dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara membandingkan antara nilai target terhadap realisasi, apabila target terpenuhi maka dikategorikan tercapai, dan begitu juga sebaliknya apabila nilai target tidak tercapai maka dikategorikan tidak terpenuhi.

7. Target dan Capaian IKU

Target dan Capaian IKU dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71 %	72,27 %	101,79 %
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat kesempatan kerja	4 %	96,48 %	2412 %
3	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	37,5 %	64 %	171,43 %
4	Meningkatnya Produktivitas sektor industri	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	14,87 %	13,19 %	89%
5	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	100 %

Uraian dan Analisa Capaian IKU

b. Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja

Tenaga kerja memiliki peran penting dalam proses pembangunan ekonomi. Bersama-sama dengan infrastruktur dan kebijakan pemerintah daerah berupa dukungan anggaran dan konsistensi politis untuk mengutamakan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga kerja menjadi faktor kunci yang dapat mendorong dan mempercepat naik-turunnya daya saing suatu perekonomian daerah.

Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja adalah melalui peningkatan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi, sertifikasi keahlian atau kompetensi tenaga kerja, pemagangan berbasis kompetensi serta penciptaan wirausaha baru.

Pada Tahun 2021 daya saing tenaga kerja daerah dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 72,27%, meningkat dari tahun 2020 sebesar 72,03%. Peningkatan TPAK ini menggambarkan cukup banyak penduduk yang bekerja, atau paling tidak, rajin mencari pekerjaan

dan menemukan pekerjaan baru. Hal ini terjadi karena adanya dukungan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja

Masih berlangsungnya Pandemi Covid-19 pada tahun 2021 membuat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kondisi ini membuat sektor formal mengalami keterbatasan dalam membuka lapangan kerja yang baru, sebaliknya lapangan kerja sektor informal masih terbuka luas dan sektor ini cukup mampu bertahan menghadapi tantangan dimasa pandemic Covid-19.

c. Meningkatnya Kesempatan kerja

Terjadinya peningkatan kesempatan kerja pada tahun 2021 bisa di lihat pada angka realisasi sebesar 96,48 % dari target 4%. Angka 96,43% di dapat dari jumlah penduduk bekerja sebesar 178.543 orang dan jumlah angkatan kerja sebesar 185.049 orang, Semakin tinggi TKK mengartikan bahwa kesempatan mendapatkan pekerjaan yang semakin tinggi. Hal ini terlihat dari Peningkatan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja pada tahun 2021 sebesar 19,23% dengan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan 220 orang dari 11,44 pencari Kerja yang terdaftar, cukup meningkat signifikan dari capaian tahun 2020 yang hanya 7,29% di lihat dari jumlah tenaga kerja yang ditempatkan 182 orang dari 2496 pencari Kerja yang terdaftar.

d. Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial ditandai dengan persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial sebesar 44 % atau tercapai 119 %, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 19 % atau dengan capaian 51,43 %.

e. Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri mengalami kenaikan ditandai dengan Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 13,19 %, yang meningkat dibandingkan capaian tahun lalu sebesar 12,29%.

- f. **Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat** ditandai dengan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2021 sebesar 87,72 (Baik) meningkat dari Tahun 2020 sebesar 81,59 (Baik)

Capaian Sasaran Strategis

Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dikelompokkan menurut urusan pemerintahan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah dan ditindaklanjuti dengan renstra SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja”** ditetapkan sasaran **“Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja”**.
2. Untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan Kesempatan Kerja”** ditetapkan sasaran **“Meningkatnya Kesempatan Kerja”**.
3. Untuk mencapai tujuan **Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial** ditetapkan sasaran **“Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial “**
4. Untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan Produktivitas Sektor Industri.”** ditetapkan sasaran **“Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri”**.
5. Untuk mencapai tujuan **“Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat.”** ditetapkan sasaran **“Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat”**.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disnakerind dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TANAH LAUT

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN DAN SASARAN PADA TAHUN KE-				
					1	2	3	4	5
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69,90%	70,30%	71%	71,12%	71,90%

2	Meningkatkan Kesempatan Kerja	Tingkat kesempatan kerja	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tingkat kesempatan kerja	3%	3,5%	4%	5,5%	6,5%
3	Meningkatkan Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	32,5%	35%	37,5%	40%	42,5%
4	Meningkatkan Produktivitas Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	13,50%	14,17%	14,87%	15,57%	16,35%
5	Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

Uraian dan Analisa Capaian Sasaran Strategis (Perjanjian Kinerja Eselon II)

Capaian Sasaran organisasi diukur berdasarkan capaian SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD, adapun capaian sasaran organisasi mewujudkan sasaran strategis yang telah kita tetapkan sehingga dalam penyusunan jelas, spesifik dan terukur (measurable) dan harus dinyatakan secara eksplisit dan rinci sehingga menjadi jelas apa yang diukur. Komitmen dan dukungan pimpinan dan stakeholder lainnya tetap menjadi kunci utama bertemunya persepsi yang sama antara dua komponen dalam menentukan sasaran dan tujuan, merupakan modal untuk meningkatkan kinerja dalam suatu organisasi. Berikut uraian dan analisa sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut tahun 2021.

i. Sasaran 1 (Meningkatnya daya saing tenaga kerja)

Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja ditandai dengan Indikator “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)”. Tingkat partisipasi angkatan kerja (*labor force participation rate*) adalah proporsi angkatan kerja terhadap populasi usia kerja. Angkatan kerja terdiri dari individu yang saat ini sedang bekerja dan mereka yang belum bekerja namun secara aktif mencari pekerjaan. Sementara

itu, definisi populasi usia kerja mencakup individu yang berusia antara ≤15 dan 64 tahun.

$$TPAK = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Keterangan:

a = Jumlah Angkatan Kerja

b = Jumlah penduduk 15thn keatas

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2021 ini mencapai 72,27% atau naik 0,3% dari tahun 2020 sebesar 72,03%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

INDIKATOR	2020	2021
ANGKATAN KERJA (Orang)	181.827	185.049
BEKERJA (Orang)	175.337	178.543
PENGANGGURAN (Orang)	6.490	6.506
TPAK (%)	72,03	72,27
TPT (%)	3,57	3,52
PENDUDUK USIA 15th ke atas (orang)	-	256.054
TINGKAT KESEMPATAN KERJA (%)	96,43	96,48

TPAK yang cukup besar menggambarkan cukup banyak penduduk yang bekerja, atau paling tidak, rajin mencari pekerjaan dan menemukan pekerjaan baru, baik di sekto formal dan sektor informal. Pandemi Covid-19 pada tahun 2021 membuat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), kondisi ini membuat sektor formal mengalami keterbatasan dalam membuka lapangan kerja yang baru, sebaliknya lapangan kerja sektor informal masih terbuka luas dan sektor ini cukup mampu bertahan menghadapi tantangan dimasa pandemic Covid-19.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian melalui Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dan mengusung Program Unggulan Bupati Tanah Laut yaitu 500 orang siap kerja per tahun berhasil meningkatkan kompetensi 704 orang pencari kerja dari 44 paket pelatihan yaitu Juru las SMAW 3G, Service Sepeda Motor Konvensional, Service Sepeda Motor Injeksi, Pemasangan Instalasi Otomasi Listrik Industry, Instalasi Penerangan, Finishing Teknik Semprot, Juru Gambar, Menjahit Pakaian Sesuai Style, Pengolahan Hasil Perikanan, Perawatan Ac Split, Operator Basic Office, Desain Grafis, Video Editing, Pembuatan Roti dan Kue, Tata Rias Kecantikan Rambut yang dilaksanakan oleh BLK Kabupaten Tanah Laut.

Selain itu BLK Komunitas Ubudiyah Bati-Bati dan BLK Komunitas Darussalim juga berhasil meningkatkan kompetensi 64 orang pencari kerja dari 4 paket pelatihan dengan Kejuruan Komputer sedangkan 15 LPK Swasta dengan peserta yang lulus sebanyak 716 orang pencari kerja.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian juga telah melaksanakan kegiatan Pemagangan (Pelatihan Berbasis Kompetensi/ On The Job Training) bagi 30 pencari kerja yang terdiri dari Pemagangan Dalam Negeri bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 20 orang, dan Pemagangan Dalam Negeri Berbasis Pengguna oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut sebanyak 10 orang. Pada kegiatan ini peserta yang dimagangkan di perusahaan mendapatkan keterampilan dan dilatih serta mendapatkan bimbingan oleh instruktur dari perusahaan yang bersangkutan sesuai dengan jabatannya. Peserta magang yang lulus dan kompeten nantinya akan direkrut dan ditempatkan di perusahaan yang diikuti.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dalam memaknai memaknai persentase TPAK yang tinggi perlu memperhatikan :

1. Pendidikan.

Implementasi dari program pendidikan dasar 9 tahun serta semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan meningkatkan kualitas angkatan kerja secara umum.

2. Usia.

Berdasarkan usia, maka TPAK untuk kelompok usia 15-19 tahun perlu diperhatikan supaya tetap rendah karena kelompok usia ini termasuk usia sekolah dan kategori anak.

3. Jenis kelamin.

Umumnya laki-laki lebih banyak terjun ke dunia kerja dibandingkan perempuan, dimana perempuan lebih mempertimbangkan pilihan sebagai ibu rumah tangga dibanding sebagai wanita karir.

Untuk mendukung capaian sasaran diatas dilaksanakan beberapa program dan kegiatan yang disajikan dengan ulasan singkat sebagai berikut:

A. Program dan Kegiatan

1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (APBD) dengan didukung kegiatan :

a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi dengan 2 sub kegiatan yaitu :

- 1). Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dengan capaian 26 Paket kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di Desa-Desa dari jumlah dana Rp. 399.989.900,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 380.588.060,- atau 95.15%.
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja dengan capaian 1 paket pemagangan sebanyak 10 orang yang dilaksanakan oleh PT. Panen Embun Kemakmuran dengan kejuruan Produksi dari jumlah dana sebesar Rp. 95.852.800,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 78.695.900,- atau 82.10%.

b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kera Swasta dengan 1 sub Kegiatan yaitu :

- 1) Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan capaian 20 orang Pengelola Lembaga Pelatihan Kerja dalam Pelatihan Manajemen Peningkatan Mutu Kelembagaan dan 60 orang Instruktur

dan Tenaga Latih dalam Pelatihan Peningkatan Peningkatan Profesionalisme Instruktur dan Tenaga Latih Lembaga Pelatihan Kerja dari jumlah dana Rp. 150.430.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 94.569.700,- atau 62.87%.

c. Kegiatan Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil dengan 1 sub Kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi kepada Perusahaan Kecil dengan capaian 18 orang pelaku usaha kecil, mikro dan menengah dalam pelatihan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penguatan Daya Saing Perusahaan dari jumlah dana Rp. 95.097.676,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 42.870.450,- atau 45.08%.

2. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (APBN), dengan kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja dengan capaian 18 paket pelatihan berbasis kompetensi dengan Rp. 2.186.640.000 yang kemudian di refocusing sebesar 80,58% menjadi Rp. 1.776.170.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.637.627.100,- atau 92.20%

Pada masing – masing kegiatan memiliki fokus keluaran dan hasil yang berbeda – beda, dapat tergambar pada tabel di bawah ini :

No.	Nama Keg/Sub Kegiatan	Indikator	Target	Jumlah Pagu
1.	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih	500 orang	Rp. 399.989.900,-
2.	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan In-	Jumlah pencari kerja yang dimagangkan	10 orang	Rp. 95.852.800,-

	struktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja			
3.	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah orang Jumlah Dokumen	70 orang 1 dokumen	Rp. 150.430.000,-
4.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Orang/Pelaku Perusahaan Kecil, Mikro dan Menengah	20 Orang	Rp. 95.097.676,-
5.	Kegiatan Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja	Jumlah Pencari kerja yang dilatih	304 Orang	Rp. 1.762.180.000,-
Total				Rp. 2.503.550.376;

B. Realisasi Anggaran

- b. Pada tahun 2021 untuk mendukung capaian di atas dilaksanakan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan capaian meningkatnya kompetensi tenaga kerja sebesar 38.65% dari target 65% yang didukung dari dana APBD sebesar Rp. 741.370.376,- dengan realisasi sebesar Rp. 596.724.110,- atau 80.49% dan melalui dana APBN sebesar 2.186.640.000 yang kemudian di refocusing sebesar 80,58% menjadi Rp. 1.776.170.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.637.627.100,- atau 92.20%

Sebagaimana yang dapat disimak pada tabel di bawah ini :

NO.	SUB KEGIATAN	OUTPUT DALAM DPA	TARGET KINERJA	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI			
					FISIK	%	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih	500 orang	399.989.900,-	416 orang	83.2	380.588.060,-	95.15
2.	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah pencari kerja yang di- ma- gangkan	10 orang	95.852.800,-	10 orang	100	78.695.900	82.10
3.	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah orang Jumlah Dokumen	70 Orang 1 Dokumen	150.430.000	80 Orang	114.29	94.569.700	62.87
4.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi kepada Perusahaan Kecil, Mikro dan Menengah	Jumlah Orang/Pelaku Perusahaan Kecil, Mikro dan Menengah	20 Orang	95.097.676,-	18 orang	90	42.870.450,-	45.08
5.	Kegiatan Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Pelatihan Kerja	Jumlah Pencari kerja yang di- latih	304 Orang	1.776.170.000	304 orang	98,68	1.637.627.100	92,20

C. Sumber Daya Manusia

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja tahun 2021 memiliki tim kerja yang cukup minim dimana hanya ada 21 (dua puluh satu) orang Aparatur Sipil

Negara (ASN) dan dibantu tenaga honorer sebanyak 9 (sembilan) orang, masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kepala Bidang	Pembina (IV/a)	1 orang
2. Kepala Seksi		
❖ Pelatihan dan Produktivitas	Penata TK I (III/d)	1 Orang
❖ Penempatan Tenaga Kerja	Penata Muda TK I (III/b)	1 orang
❖ Perluasan Kerja	Penata Muda TK I (III/b)	1 orang
3. Kepala UPT	Penata TK I (III/d)	1 orang
4. Kasubag TU UPT	Penata (III/c)	1 orang
5. Instruktur		
❖ Instruktur Pelaksana Lanjutan	Penata Muda TK I (III/b)	4 orang
❖ Instruktur Muda	Penata TK I (III/d)	3 orang
❖ Instruktur Pertama	Penata Muda TK I (III/b)	1 orang
❖ Instruktur Penyelia	Penata Muda TK I (III/b)	1 orang
6. Analis bahan penempatan tenaga kerja	Penata TK I (III/d)	1 orang
7. Pengadministrasi Keuangan	Pengatur (II/d)	1 orang
8. Pengadministrasi umum	Penata Muda TK (III/b)	1 orang
9. Pengadministrasi umum	Pengatur (II/d)	1 orang
10. Pengelola informasi pasar kerja online	PTT/ tenaga honorer	2 org
11. Tenaga Pendamping Pelatihan dan Produktivitas	PTT/ tenaga honorer	1 org
12. Pengadministrasi umum	Juru (I/c)	1 orang
13. Pengelola Kios 3 in 1	PTT/ tenaga honorer	2 org
14. Petugas Kebersihan	PTT/ tenaga honorer	2 org
15. Penjaga Malam	PTT/ tenaga honorer	1 org
16. Administrasi Kantor	PTT/tenaga honorer	1 org

D. Analisis Kendala

Pada tahun 2021 Kabupaten Tanah Laut masih terdampak pandemi Covid-19, sehingga salah satu dampaknya adalah pelambatan perekonomian. Beberapa hal yang perlu dicermati dalam memaknai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang tinggi karena dipengaruhi oleh factor sebagai berikut :

- ❖ Demografi yaitu pertambahan jumlah penduduk.
- ❖ Perubahan cuaca yang mempengaruhi hasil panen petani.

- ❖ Jumlah lulusan sekolah cukup tinggi sehingga pencari Kerja cukup banyak akan tetapi lapangan pekerjaan baik dari informal dan formal belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga Kerja.
- ❖ Kebijakan perusahaan dalam menyikapi pandemi Covid-19 dimana menurunnya sektor lapangan usaha pertambangan dan penggalian, serta sektor lapangan usaha pertanian dan industri, dengan tujuan supaya perusahaan tidak gulung tikar diantaranya dengan merumahkan karyawan, mengurangi jam kerja karyawan, menunda perekrutan karyawan baru serta memberlakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

E. Saran dan Solusi

Menanggapi kendala di atas, maka perlu dilakukan :

1. Pemagangan yang di biyai oleh pemerintah pusat, propinsi maupun daerah.
2. Mendorong pemagangan mandiri yang dilakukan oleh perusahaan .
3. Pelatihan berbasis kompetensi, berbasis masyarakat maupun kewirausahaan kepada pencari kerja.
4. Meningkatkan produktivitas LPK untuk melatih pencari kerja.
5. Meningkatkan kerjasama kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendapatkan paket-paket kegiatan dengan sumber dana APBN yang tujuan nya untuk mempersiapkan pencari kerja terjun ke lapangan kerja.
6. Meningkatkan kerjasama kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalsel untuk mendapatkan paket-paket kegiatan dengan sumber dana APBD propinsi yang tujuan nya untuk mempersiapkan pencari kerja terjun ke lapangan kerja.

F. Rencana Aksi Tahun 2022

Pada Tahun 2022 akan dilaksanakan beberapa langkah strategis sebagai berikut :

1. Mengirimkan peserta pelatihan ke-5 Balai Besar di bawah Kementerian Ketenagakerjaan.
2. Melaksanakan pelatihan kewirausahaan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat di desa baik melalui kegiatan Manunggal Tuntung Pandang maupun BLK komunitas.
3. Melaksanakan pemagangan dalam negeri yaitu pemagangan di perusahaan baik melalui dana APBN maupun APBD.

4. Mendukung BLK Komunitas untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan.

ii. Sasaran 2 (Meningkatnya Kesempatan Kerja)

Salah satu Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah Tingkat Kesempatan Kerja. Peningkatan kesempatan kerja di lihat dari persentase sebesar 96,48% dari target 4%, di dapat dari jumlah penduduk bekerja sebesar 178.543 orang dan jumlah angkatan kerja sebesar 185.049 orang dengan rumus sebagai berikut :

$$TKK = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Dimana:

a = Jumlah Penduduk Bekerja

b = Jumlah Angkatan Kerja

(Sumber data oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut)

Semakin tinggi TKK mengartikan bahwa kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal maupun sektor informal terbuka luas di Kabupaten Tanah Laut. Peningkatan TKK pada tahun 2021 TKK juga hasil dari meningkatnya pelayanan penempatan kerja diperoleh dari jumlah tenaga kerja yang ditempatkan (pada sektor formal) dari 182 orang pada tahun 2020 menjadi 220 orang pada tahun 2021 dengan persentase sebesar 19,23%.

Untuk mendukung capaian sasaran ini dilaksanakan beberapa program dan kegiatan yang disajikan dengan ulasan singkat sebagai berikut:

A. Program dan Kegiatan :

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja tahun 2021 telah menyelesaikan kegiatan – kegiatan berkenaan dengan kinerja dibidang ketenagakerjaan melalui Program Penempatan Tenaga Kerja, Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan di dukung melalui 2 (dua) kegiatan di Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Seksi Perluasan Kesempatan Kerja yaitu :

1. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota dan kegiatan Pen-erbitan izin Lembaga Penempatan Tenga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu)

Daerah Kabupaten/ Kota dilaksanakan 15 paket pelayanan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pelayanan pencatatan pencari kerja sebanyak 1.144 orang (1 Paket);
 - b. Penyuluhan dan bimbingan jabatan kepada 100 orang pencari kerja dalam rangka memasuki dunia kerja. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui bakat, minat, keahlian, keterampilan, disamping mengetahui tentang dunia Kerja dan karakteristik jabatan yang sesuai bagi dirinya (5 Paket);
 - c. Sosialisasi Mekanisme Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Bagi Perusahaan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan sosialisasi mengenai tahapan-tahapan dalam proses penempatan tenaga kerja (3 Paket).
 - d. Sosialisasi Peningkatan dan Pelindungan CPMI bagi Aparat Desa dan Masyarakat Pencari Kerja dalam rangka Persiapan Bekerja ke Luar Negeri. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan informasi mengenai prosedur yang benar mengenai keberangkatan bekerja ke luar negeri sehingga dapat mengurangi terjadinya CPMI non prosedural (3 Paket)
 - e. Sosialisasi Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas dan Perusahaan Pengguna Penyandang Disabilitas.(2 paket)
 - f. Sosialisasi Pembinaan Bursa Kerja Khusus (1 Paket);
2. Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja pada capaian realisasi kegiatan di tahun 2021 dan pencapaian target indikator pada subkegiatan perluasan kesempatan kerja telah tercapai jumlah 160 orang calon Wirausaha baru yang tercakup juga dalam kegiatan sinergitas mitra tala preneur pada manunggal tuntung pandang, pada sub kegiatan penyusunan rencana tenaga kerja makro daerah Kabupaten Tanah Laut telah selesai disusun dan berlaku pada tahun 2021 s.d 2024, serta tercapainya subkegiatan pemberdayaan PMI Purna Penempatan telah tercapainya indikator jumlah PMI (Pra & Purna) yang mendapatkan perlindungan dan pelatihan keterampilan sebanyak 40 Orang PMI Purna yang pelaksanaannya di Kecamatan Bati-Bati dan Kecamatan Panyipatan.

Pada masing – masing kegiatan memiliki fokus keluaran dan hasil yang berbeda – beda, dapat tergambarkan pada tabel di bawah ini :

No.	Nama Kegiatan	Keluaran	Hasil	Jumlah Pagu
1.	Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota dan kegiatan Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah pencari kerja yang ditempatkan ➤ Jumlah peserta sosialisasi ➤ Jumlah monitoring LPTKS 	Meningkatnya peluang kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja.	Rp. 251.036.196;
2.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK), Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota dan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Orang wirausaha baru ➤ Jumlah Orang ➤ Jumlah Dokumen RTKD 	Terciptanya peningkatan wira usaha baru	Rp. 293.167.176
Total				Rp. 544.203.372

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2021 Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja merealisasikan anggaran sebesar Rp. **1.016.295.126,-** atau 79,05 % yang mana pada kegiatan fisiknya telah dilaksanakan dengan capaian sebesar 228,75%. Sebagaimana yang dapat disimak pada tabel dibawah ini :

NO.	KEGIATAN	OUTPUT DA- LAM DPA	TARGET KINERJA	ANG- GARAN 2021 (Rp)	REALISASI			
					FISIK	%	KEU- ANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota dan kegiatan Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi pelayanan antarkerja di Kab. Tanah Laut	180 Orang 100 orang 4 kali	251.036.196	220 orang 100 orang 4 kali	122,22 100 100	173.399.066	69,07
2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK), Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota dan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terciptanya peningkatan wira usaha baru	10 Orang 0 dok 70 org 20 org	293.167.176	10 org 0 dok 80 org 18 org	100 0 114,29 90	246.171.950	83,97

C. Sumber Daya Manusia

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja tahun 2021 memiliki tim kerja yang cukup minim dimana hanya ada 21 (dua puluh satu) orang Aparatur Sipil

Negara (ASN) dan dibantu tenaga honorer sebanyak 9 (sembilan) orang, masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1.	Kepala Bidang	Pembina (IV/a)	1 orang
2.	Kepala Seksi		
	❖ Pelatihan dan Produktivitas	Penata TK I (III/d)	1 Orang
	❖ Penempatan Tenaga Kerja	Penata Muda TK I (III/b)	1 orang
	❖ Perluasan Kerja	Penata Muda TK I (III/b)	1 orang
3.	Kepala UPT	Penata TK I (III/d)	1 orang
4.	Kasubag TU UPT	Penata (III/c)	1 orang
5.	Instruktur		
	❖	Instruktur Pelaksana Lanjutan	Penata
	Muda TK I (III/b)	4 orang	
	❖	Instruktur Muda	Penata TK I
	(III/d)	3 orang	
	❖	Instruktur Pertama	Penata Mu-
	da TK I (III/b)	1 orang	
	❖	Instruktur Penyelia	Penata Muda
	TK I (III/b)	1 orang	
6.	Analisis bahan penempatan tenaga kerja	Penata TK I (III/d)	1 orang
7.	Pengadministrasian Keuangan	Pengatur (II/d)	1 orang
8.	Pengadministrasian umum	Penata Muda TK (III/b)	1 orang
9.	Pengadministrasian umum	Pengatur (II/d)	1 orang
10.	Pengelola informasi pasar kerja online	PTT/ tenaga honorer	2 org
11.	Tenaga Pendamping Pelatihan dan Produktivitas	PTT/ tenaga honorer	1 org
12.	Pengadministrasian umum	Juru (I/c)	1 orang
13.	Pengelola Kios 3 in 1	PTT/ tenaga honorer	2 org
14.	Petugas Kebersihan	PTT/ tenaga honorer	2 org
15.	Penjaga Malam	PTT/ tenaga honorer	1 orang
16.	Administrasi Kantor	PTT/ tenaga honorer	1 orang

D. Analisis Kendala

Pada Tahun 2021 semua kegiatan pada Program Perencanaan Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja dan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena masih adanya pandemi covid-19 dimana mengakibatkan pula terjadinya

pemberlakuan PPKM sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri yang pada akhirnya berdampak pula ke daerah serta meningkatnya terkonfirmasi positif covid-19 di Kabupaten Tanah Laut sehingga semua Program dan Kegiatan di Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja tahun 2021 pun mengalami kendala dalam pelaksanaan kegiatan dapat diterangkan masing – masing kegiatan di bawah ini :

1. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota, kegiatan Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota meliputi pelayanan pembuatan AK I, Penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja, pengendalian penggunaan tenaga kerja asing (TKA) dalam bentuk laporan rutin setiap bulan nya, pendataan lowongan kerja dan mekanisme penempatan nya, tata kelola penempatan dan perlindungan CPMI. Pelaksanaan kegiatan di atas belum secara maksimal dikarenakan masih adanya pandemi covid-19 dimana mengakibatkan pula terjadinya pemberlakuan PPKM sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri yang pada akhirnya berdampak pula ke daerah serta meningkatnya terkonfirmasi positif covid-19 di Kabupaten Tanah Laut
2. Kegiatan Perluasan Kesempatan kerja dengan capaian kegiatan Pelatihan Berbasis Kewirausahaan (Entrepreneur), selain itu penumbuhan wirausaha baru dilaksanakan melalui Pendampingan Kewirausahaan oleh Tim Mitra Tala Prenuer pada Manunggal Tuntung Pandang. Di daerah pesisir banyak bermunculan perusahaan yang bergerak di bidang penangkapan ikan yang tentunya membutuhkan pekerja dibawah pengawasan Disnaker dan Pemerintah Daerah. Perluasan Kesempatan Kerja Diluar Hubungan Kerja Pasal 40 UU Nomor 13 Tahun 2003 memberikan arahan tentang perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja, yakni :
(1) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna. (2) Penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja. Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja ini membutuhkan kerjasama antara pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan sektor swasta. Pasal 8 PP Nomor 33 Tahun 2013 menetapkan bahwa pembinaan ini dapat dilakukan dalam bentuk program kewirausahaan dengan pola pembentukan

dan pembinaan tenaga kerja mandiri, sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, pendayagunaan tenaga kerja sukarela, dan/atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan pola tersebut dengan : Permodalan; Penjaminan; Pendampingan; . Pelatihan; Konsultasi; Bimbingan Teknis; Penyediaan Data dan/atau Informasi. Peran serta lembaga keuangan juga diharapkan dapat membantu penciptaan program perluasan kesempatan kerja dengan memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam bentuk fasilitas kredit dan/atau fasilitas penjaminan kredit.

E. Saran dan Solusi

Berdasarkan kendala yang telah diterangkan di atas dapat disimpulkan dan disarankan beberapa hal sebagai solusi agar capaian terhadap kinerja utama yang telah ditargetkan sesuai indikator yang ditetapkan ditahun – tahun yang akan datang menjadi lebih baik, yaitu sebagai berikut :

- a. Meminta tambahan formasi CPNS Pengantar Kerja untuk memperkuat fungsi layanan Informasi Pasar Kerja Daerah.
- b. Diadakan nya sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Penempatan tenaga Kerja bagi pemberi kerja. Sosialisasi ini dalam rangka memberikan informasi tentang kewajiban pelaporan adanya informasi lowongan pekerjaan, proses rekrutmen, proses Penempatan hingga pada pelaporan Penempatan
- c. Diharapkan Pemerintah Pusat dan Daerah akan memberikan kemudahan kesempatan kepada para pemberi kerja atau investor dalam berinvestasi yang kemudian akan menetapkan program perluasan kesempatan kerja dengan tujuan akan menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran
- d. Menetapkan pembinaan yangt dilakukan dalam bentuk program kewirausahaan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, pendayagunaan tenaga kerja sukarela, dan/atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.

E. Rencana Aksi Tahun 2022

Pada Tahun 2022 akan dilaksanakan beberapa langkah strategis sebagai berikut :

1. Setiap perusahaan yang membuat izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus mencantumkan informasi lowongan pekerjaan.
2. Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Penempatan tenaga Kerja bagi perusahaan dan pemberi kerja perseorangan. Sosialisasi ini dalam rangka memberikan informasi tentang kewajiban pelaporan adanya informasi lowongan pekerjaan, proses rekrutmen, proses Penempatan hingga pada pelaporan Penempatan. Kegiatan ini juga dalam rangka mempersiapkan perusahaan dalam partisipasinya mengikuti pelaksanaan pameran kesempatan Kerja/*job fair* yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021.
3. Memperkuat layanan Informasi Pasar Kerja Daerah.
4. Melakukan kerjasama dengan UPT BP2MI di Banjarbaru serta Kantor Imigrasi kelas I Banjarmasin dalam upaya meningkatkan kesadaran akan layanan Pekerja Migran Indonesia sampai tingkat kelurahan/desa.
- e. Pada Sub kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja ditargetkan melaksanakan kegiatan Pelatihan Soft Skill berbasis penumbuhan wirausaha yang bertujuan memicu minat serta mindset pemuda pemudi Kab.Tanah Laut untuk berwirausaha, dengan menghadirkan narasumber dari tingkat nasional. Yang nantinya pelaksanaannya akan diikutkan pada kegiatan Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut.

iii. Sasaran 3 (Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial)

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut memiliki kinerja utama untuk menciptakan hubungan industrial harmonis dan kondusif dengan persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial sebesar 44 % dari 9 (sembilan) kasus pada Tahun 2020 menjadi 5 (lima) kasus di tahun 2021.

Meningkatnya harmonisasi hubungan industrial sebagai salah satu kinerja utama dengan indikator persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial merupakan sasaran strategis dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut yang didapat dari jumlah pengurangan kasus tahun berjalan dibanding dengan jumlah kasus tahun sebelumnya dibagi jumlah kasus tahun sebelumnya dikali 100% :

$$\frac{\text{Jumlah kasus perselisihan HI tahun } n - 1 - (\text{jumlah kasus perselisihan tahun } n)}{\text{Jumlah kasus perselisihan HI tahun } n - 1} \times 100\% = \text{Penurunan Kasus}$$

Pada tahun 2020 terdapat 9 kasus masuk sedangkan ditahun 2021 terdapat 5 kasus masuk, berikut dapat dilihat melalui tabel :

**DATA TAHAPAN KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2020**

NO.	PARA PIHAK		TAHAPAN			KETERANGAN
	PELAPOR	TERLAPOR	BIPARTIT	TRIPARTIT (MEDIASI)	PHI	
1	Sdr. Bahri Sdr. Normansyah	PT. Patriot Intan Abadi		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama
2	Sdr. Joko Subandrio dkk	PT. Adidaya Alam Borneo PT. Surya Sakti Darma Kencana		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama
3	Sdr. Mustamin	PT. Pribumi Citra Megah Utama			V	Selesai dengan Anjuran Mediator
4	Sdr. Yoyok Rudianto	PT. Darma Henwa			V	Selesai dengan Anjuran Mediator
5	Sdr. Rusmadi dkk.	PT. Karya Wijaya Utama			V	Selesai dengan Anjuran Mediator
6	Sdr. Agus Rohendi dkk	PT. Gawi Makmur Kalimantan Kebun Tengah		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama
7	Sdr. Chepy Eko Wahyudi	PT. Karya Wijaya Utama		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama
8	Sdr. Fathorahman dkk	PT. Sinar Surya Jorong		V		Selesai dengan Anjuran Mediator
9	Sdr. H. Ismail, SE, dkk.	PD. Baratala Tuntung Pandang		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama

**DATA TAHAPAN KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2021**

NO.	PARA PIHAK		TAHAPAN			KETERANGAN
	PELAPOR	TERLAPOR	BIPARTIT	TRIPARTIT (MEDIASI)	PHI	
1	Sdr. Muhammad Abror (Kuasa) Sdri. Bariyah (Yang dikuasakan)	PT. Fresh On Time Seafood		V		Dicabut
2	Sdri. Suharti Sdr. Yusuf Ramadhan (Pengacara)	CV. Bintang Mulia Bara Group			V	Putusan PHI
3	Sdri. Heni Setyowati Sdr. Hermanus Palapessy (Pengacara)	PT. Sukses Wijaya Adimakmur		V		Perjanjian Bersama
4	Sdr. Suhardi	PT. Sinar Nirwana Sari	V			Perjanjian Bersama
5	Sdr. Hendra Giri DPP Pelaut Borneo Bersatu (SP/SB)	PT. Trans Coal Pasific		V		Mediasi Ke-2

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa tahun 2020 terdapat 9 kasus yang diselesaikan dan tahun 2021 terdapat 5 kasus yang diselesaikan sehingga ada penurunan sebanyak 4 kasus pada tahun 2021, dari data tersebut kemudian dimasukkan kedalam rumus sebagai berikut :

$$\frac{9 \text{ kasus} - 5 \text{ kasus}}{9 \text{ kasus}} \times 100\% = 44,44\%$$

Upaya peningkatan harmonisasi hubungan industrial juga menjadi sasaran utama bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang lebih memfokuskan pada meningkatnya perlindungan lembaga ketenagakerjaan untuk harmonisasi hubungan industrial. Hal ini terlihat dengan 5 (lima) kasus yang masuk untuk dibantu penyelesaiannya dapat dieksekusi dengan baik oleh Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sehingga yang pada tahun 2021 mencapai 40% cakupan kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama. Sasaran ini disajikan dengan ulasan singkat sebagai berikut:

**DATA TAHAPAN KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2021**

NO.	PARA PIHAK		TAHAPAN			KETERANGAN
	PELAPOR	TERLAPOR	BIPARTIT	TRIPARTIT (MEDIASI)	PHI	
1	Sdr. Muhammad Abror (Kuasa) Sdri. Bariyah (Yang dikuasakan)	PT. Fresh On Time Seafood		V		Dicabut
2	Sdri. Suharti Sdr. Yusuf Ramadhan (Pengacara)	CV. Bintang Mulia Bara Group			V	Putusan PHI
3	Sdri. Heni Setyowati Sdr. Hermanus Palapessy (Pengacara)	PT. Sukses Wijaya Adimakmur		V		Perjanjian Bersama
4	Sdr. Suhardi	PT. Sinar Nirwana Sari	V			Perjanjian Bersama
5	Sdr. Hendra Giri DPP Pelaut Borneo Bersatu (SP/SB)	PT. Trans Coal Pasific		V		Mediasi Ke-2

A. Program dan Kegiatan

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tahun 2020 telah menyelesaikan kegiatan – kegiatan berkenaan dengan kinerja dibidang ketenagakerjaan terutama pada Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Harmonisasi Hubungan Industrial yang kemudian di eksekusi melalui 3 (tiga) kegiatan di Seksi Persyaratan Kerja, Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Seksi Hubungan Industrial, yaitu :

1. Fasilitasi Pelayanan Sistem Pengupahan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
2. Fasilitasi Pelayanan Persyaratan Kerja;
3. Fasilitasi dan Pelayanan Kelembagaan Serta Penyelesaian Penelitian Hubungan Industrial.

Pada masing – masing kegiatan memiliki fokus keluaran dan hasil yang berbeda – beda, dapat tergambar pada tabel di bawah ini :

No.	Nama Sub-Kegiatan	Keluaran	Hasil	Jumlah Pagu
1.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Orang	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	Rp. 32.499.830
2.	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	Rp. 62.499.860
3.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	Rp. 98.999.896
Total				Rp. 193.999.586

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2021 Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja merealisasikan anggaran sebesar Rp. **149,254,546,-** atau 76,94 % dari pagu sebesar Rp. **193,999,586,-** yang mana pada kegiatan fisiknya telah dilaksanakan secara maksimal atau 83,66%. Sebagaimana yang dapat disimak pada tabel dibawah ini :

NO.	SUB-KEGIATAN	OUTPUT DALAM DPA	TARGET KINERJA	ANG-GARAN 2021 (Rp)	REALISASI			
					FISIK	%	KEU-AN-GAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Orang	16.000 orang	32.49 9.830	19.14 0 orang	12 0	17.22 5.900	53
2	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan	8 doku- men	62.49 9.860	6 doku- men	75	50.95 7.400	81,5 3
3	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus	9 kasus	98.99 9.896	5 ka- sus	56	81.07 1.246	81,8 9

C. Sumber Daya Manusia

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tahun 2021 dalam melaksanakan program dan kegiatannya dibantu sumber daya manusia (SDM) yang efektif dan efisien namun tetap solid dalam menghadapi tantangan. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja memiliki tim kerja yang cukup minim dimana hanya ada 5 (lima) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dibantu tenaga honorer sebanyak 1 (satu) orang, masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan
1.	Maria Ulfah, S.Psi. NIP. 19791113 200501 2 008	Pembina / IV a	Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

2.	I r h a m, S.AP. NIP. 19660810 199002 1 002	Penata Tk. I / III d	Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
3.	Fadly Fauzan, S.H. NIP. 19870708 201402 1 001	Penata / III c	Kepala Seksi Hubungan Industrial
4.	Rani Yasodhara, SKM. NIP. 19810322 200903 2 004	Penata Muda Tk. I / III b	Kepala Seksi Persyaratan Kerja
5.	Akhmad Nashar, S.H. NIP. 19901025 202012 1 009	Penata Muda / III a	Mediator Hubungan Industrial
6.	Arief Firmanto	PTT/Honoror	Tenaga Pengadministrasian Umum Mediator Perselisihan Hubungan Industrial

D. Analisis Kendala

Pada Tahun 2021, selain masih terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang mempengaruhi pada perekonomian Indonesia, peraturan perundangan-undangan tentang ketenagakerjaan juga mengalami perubahan yang signifikan sehingga ada penyesuaian pola kerja yang dilakukan pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menurunkan beberapa Peraturan Pemerintah yang mempebaharui tata cara pelaksanaan aturan ketenagakerjaan yang masing-masing Kepala Seksi memformulakan rumusan untuk dapat menyesuaikan kegiatan, maka dapat diterangkan masing – masing Seksi di bawah ini :

1. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pada Tahun 2021 Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja sejak terjadi perubahan nomenklatur pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut di Tahun 2019. Kinerja utama Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja membantu meningkatkan jumlah kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta kepatuhan Pelaku HI terhadap Peraturan Per UU. Pada pelaksanaannya secara fisik telah terlaksana 120% atau 19.140 orang dari target sebesar 16.000 orang, hal ini berkat dukungan dan kerjasama yang baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan BPJS Ketenagakerjaan KCP Pelaihari.

Pada tahun 2021 ini pula Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja menginisiasi pembentukan DPKab. dengan Keputusan Bupati Tanah Laut

Nomor 188.45/1301-KUM/2021 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021-2023 tanggal 3 Desember 2021, dengan tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati Tanah Laut dalam rangka :
 1. Pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan
 2. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan Sistem Pengupahan Kabupaten
- b. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Tanah Laut melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

Dan unsur-unsur dalam Susunan Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Tanah Laut adalah Unsur Pemerintah, unsur Akademisi, unsur Pengusaha, unsur Pekerja dan unsur Buruh.

Tentang kepesertaan BPJS Tenaga Kerja selain Instruksi Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Proyek Jasa Konstruksi di Kabupaten Tanah Laut juga optimalisasi percepatan kepesertaan BPJS Tenaga Kerja.

Baik DPKab dan optimalisasi kepesertaan BPJS Tenaga Kerja merupakan langkah strategis pemerintah kabupaten Tanah Laut dalam meningkatkan harkat dan martabat tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera dimana akan terpenuhinya hak-hak dan perlindungan mendasar bagi tenaga kerja dan keluarga sekaligus memberi dampak positif bagi pengembangan dunia usaha di Kabupaten Tanah Laut.

2. Seksi Hubungan Industrial

Pada kinerja utama seksi Hubungan Industrial, dimana Sub-Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota menargetkan pelayanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit masing-masing capaiannya sebesar 56% dan 100%.

Terlihat bahwa adanya penurunan layanan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang pada tahun 2020 mencapai 100% menjadi hanya 56% ditahun 2021, hal ini masih merupakan dampak dari *Corona Virus Disease 2019*

(COVID-19) sehingga tidak banyak aktivitas ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perusahaan dan pelaksanaan mediasi pun masih terkendala belum adanya pejabat fungsional mediator di Kabupaten Tanah Laut sehingga masih memerlukan kerjasama dengan Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.

Terlebih lagi dengan adanya aturan baru tentang perhitungan pesangon yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja mempersempit celah hukum dimana sering menjadi penyebab perselisihan hubungan industrial.

3. Seksi Persyaratan Kerja

Kinerja utama seksi Persyaratan Kerja adalah kepatuhan terhadap penerapan norma syarat – syarat kerja yang memiliki indikator jumlah perusahaan yang melakukan pencatatan PKWT. Pada tahun 2021 terdapat 2516 (Dua ribu lima ratus enam belas) tenaga kerja yang kontrak kerjanya tercatat.

Hal-hal yang berpengaruh dari tingkat kepatuhan terhadap pemenuhan norma syaker ini diantaranya durasi lama bekerja pekerja kontrak yang tidak terlalu lama sehingga Perusahaan enggan melakukan pencatatan kontrak. Selain daripada itu terdapat juga faktor lain yaitu berupa implikasi atau dampak terhadap tinggi rendahnya pengawasan di lapangan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Ketenagakerjaan di Provinsi terhadap para pelaku usaha di Kabupaten. Semakin tinggi ketidakpatuhan yang ditemukan oleh pengawas ketenagakerjaan berbanding lurus dengan semakin tingginya pencatatan kontrak kerja dilaksanakan.

Kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut berkurang sehubungan dengan terbitnya surat nomor : 566/204/Disnakertrans tanggal 1 Februari 2017 tentang penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan, sesuai Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga hal – hal yang berkaitan dengan penegakan hukum yang salah satunya misalnya adalah pengecekan terhadap pelaksanaan pencatatan kontrak kerja.

E. Saran dan Solusi

Berdasarkan kendala yang telah diterangkan di atas dapat disimpulkan dan disarankan beberapa hal sebagai solusi agar capaian terhadap kinerja utama yang telah ditargetkan sesuai indikator yang ditetapkan ditahun – tahun yang akan datang menjadi lebih baik, yaitu sebagai berikut :

1. Harus membuka informasi kepada para pihak terkait akan pentingnya pencatatan kontrak kerja;
2. Harus memiliki alat yang berfungsi sebagai rekam jejak digital yang dikemas dalam bentuk register. Selain itu software ini juga berfungsi sebagai pengingat terhadap perusahaan ketika masa kontrak kerja akan berakhir;
3. Terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial pejabat fungsional mediator perlu segera melaksanakan diklat mediator;
4. Memaksimalkan fungsi aplikasi siManja untuk memberikan layanan ketenagakerjaan yang lebih baik;
5. Memaksimalkan fungsi aplikasi wajib lapor online yang saat ini belum semua perusahaan di Kabupaten Tanah Laut mendaftarkan perusahaannya di aplikasi ini;
6. Pembentukan dan mengoptimalisasian Lembaga Hubungan Industrial seperti Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit.

F. Rencana Aksi Tahun 2022

Bahwa sesuai dengan saran dan solusi yang kami ajukan maka harapan kami kedepan pada tahun 2022 akan melaksanakan sebagai berikut :

1. Meminta kepada Badan Kepegawaian terkait untuk segera memfasilitasi pejabat fungsional mediator untuk melaksanakan diklat mediator;
2. Memanfaatkan dan mengolah data wajib lapor perusahaan di Kabupaten Tanah Laut;
3. Membuat sosialisasi ketenagakerjaan dengan nomenklatur terkait urgensi pencatatan PKWT yang dilaksanakan dan didanai penganggarnya melalui APBD tahun berjalan;
4. Memaksimalkan software Sistem Manajemen Norma Kerja (siManja) untuk mempermudah kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut;
5. Mengoptimalisasikan kinerja Dewan Pengupahan dan Lembaga Kerjasama Tripartit di Kabupaten Tanah Laut.

iv. Sasaran 4 Pada Perjanjian Kerja (Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri)

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut memiliki kinerja utama pada Kontribusi pada Sektor Industri. Dari data BPS terlihat adanya kenaikan kontribusi di sektor Perindustrian. Kenaikan kinerja sektor industri ditandai dengan naiknya Persentase Peranan Industri pengolahan, dimana share PDRB tahun 2020 sebanyak 12,29, naik 0,9 poin menjadi 13,39 di Tahun 2021. Hal ini terjadi dikarenakan mulai stabilnya harga komoditas CPO di Dunia. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa sub kategori yang mendominasi kinerja industri di tanah laut adalah industri makanan dan minuman. Produksi industri makanan dan minuman rata-rata mencapai dari 60 persen dari total produksi industri pengolahan secara keseluruhan di Tanah Laut. Komoditas utama dari Industri Makanan minuman di tanah laut adalah Crude Palm Oil (CPO). Oleh karena itu, kinerja industri makanan dan minuman tanah laut tidak terlepas dari pengaruh dinamika perekonomian global. Di Tanah Laut Kinerja Industri CPO ini di dukung oleh Kinerja Subkategori perkebunan komoditas kelapa sawit yang terkonsentrasi di beberapa wilayah sentra produksi utama (Kecamatan Pelaihari, Jorong dan Kintap).

Upaya peningkatan Kontribusi Sektor Industri yang telah dilaksanakan antara lain disajikan pada uraian singkat sebagai berikut :

G. Program dan Kegiatan

Pada Bidang Perindustrian, ada 2 program dan 6 sub kegiatan antara lain sebagai berikut :

A.1 Program Pembangunan Sumber Daya Industri yang diampu oleh Seksi Pembangunan Sumberdaya Industri, dimana pada seksi ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan, seperti tergambar pada tabel dibawah ini :

No.	Nama Sub Kegiatan	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Output dalam DPA	Target Kinerja	Jumlah Pagu	Realisasi	Fisik	Keu
1.	Koordina-	Per-	Jumlah IKM	10 IKM	Rp.	Rp.	240	91,29

	si, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	sensitas Kontribusi Sektor Industri	yang menggunakan inovasi teknologi dalam kegiatan produksi		388.670.546,-	354.805.804,-	%	%
			Jumlah IKM yang mengikuti pelatihan dan pemagangan bagi pelaku IKM Pangan dan Industri Kreatif	84 IKM			100 %	
			Jumlah IKM yang meningkatkan kreativitas desain produknya	20 IKM			140 %	

A.2 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri yang diampu oleh Seksi Sarana Prasarana Industri, dimana pada seksi ini terdiri dari 2 kegiatan, seperti tergambar pada tabel dibawah ini :

No.	Nama Sub Kegiatan	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Output dalam DPA	Target Kinerja	Jumlah Pagu	Realisasi	Fisik	Keu
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta	Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Jumlah IKM Jumlah Industri	3378 IKM 50 IB	Rp. 124.999.750	113.741.600	100 %	68%

	Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)							
sub	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Jumlah Laporan	1 laporan	76.000.000	32.731.300		52%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Jumlah Klaster Industri Jumlah IKM penerima Hibah	2 klaster 9 IKM	788571809	627.660.915	100 %	66%

A.3 Program Pemberdayaan Industri Unggulan Daerah, dimana pada seksi ini terdiri dari 2 kegiatan, seperti tergambar pada tabel dibawah ini :

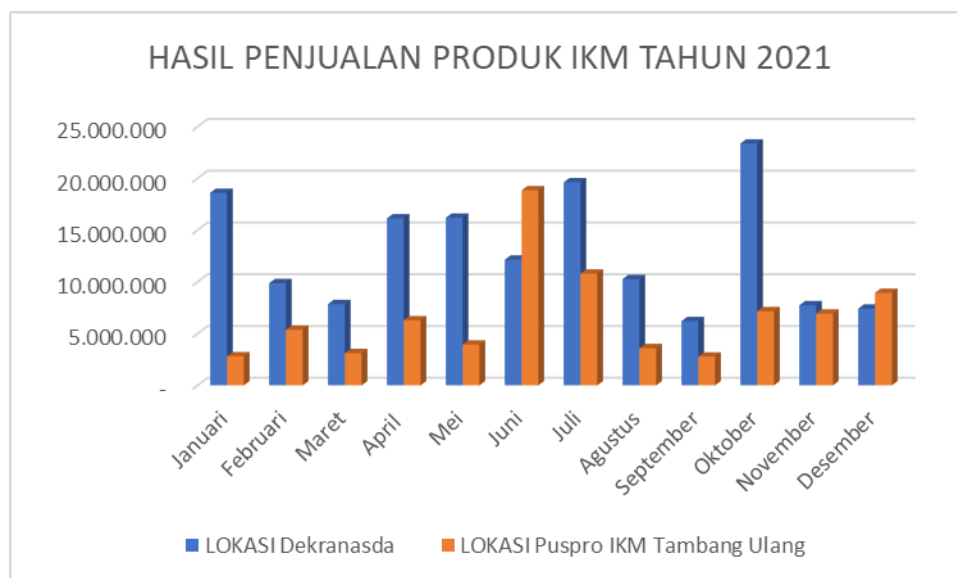
No.	Nama Kegiatan	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Output dalam DPA	Target Kinerja	Jumlah Pa- gu	Re- alisa si	Fisi k	Keu
Sub	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Persen-tase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB		Jumlah laporan 2 laporan	8484800	458 1.00 0		
sub	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persen-tase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB		Jumlah Pameran 3 kali Rumah Kemasan 1 unit Moko 1 unit	191513620 9	181 180 754 2		

Dapat kami informasikan bahwa di bawah Bidang Perindustrian, khususnya berkaitan dengan Promosi Produk IKM, kami memiliki 2 tempat promosi yaitu Dekranasda dan Pusat Promosi Sentra IKM Tambang Ulang. Pada kedua tempat promosi ini, sistem yang dipakai adalah titip jual, dimana IKM menitipkan produknya untuk dijual dan dipromosikan. Adapun penjualan produk IKM di kedua tempat tersebut selama Tahun 2021 adalah sbb :

No.	Bulan	LOKASI	
		Dekranasda	Puspro Tambang Ulang
1.	Januari	18.605.000	Rp2.815.000
2.	Februari	9.875.000	Rp5.369.000

3.	Marer	7.850.000	Rp3.114.000
4.	April	16.132.000	Rp6.290.000
5.	Mei	16.195.000	Rp3.947.000
6.	Juni	12.143.000	Rp18.852.000
7.	Juli	19.621.000	Rp10.802.000
8.	Agustus	10.263.000	Rp3.592.000
9.	September	6.202.000	Rp2.784.000
10.	Oktober	23.362.000	Rp7.162.000
11.	November	7.733.000	Rp6.928.000
12.	Desember	7.408.000	Rp8.942.000
	TOTAL	155.389.000	80.597.000

Rata-rata penjualan di Dekranasda Rp. 12.950.000/ bulan dan di Puspro rata-rata penjualan Rp. 6.716.000/bulan.



H. Kinerja Sektor Industri dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel Pertumbuhan Peningkatan Jumlah Industri

	Tahun 2020	Tahun 2021 (SiiNas)
Jumlah Industri Besar dan menengah	50	50
Jumlah Industri Kecil	3378	3458

Tabel Pertumbuhan Peningkatan Industri Formal

	Tahun 2020	Tahun 2021
Jumlah Industri Formal	47	82

I. Sumberdaya Manusia

Bidang Perindustrian Tahun 2020 dalam melaksanakan program dan kegiatan dibantu oleh 6 (enam) orang Aparatur Sipil Negara dan 7 (tujuh) orang tenaga PTT serta 3 (tiga) orang Tenaga Ahli. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Nama/Nip	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Nurmaya Savitri, ST, MT NIP. 19820529 200903 2 007	Penata TK.I / III d	Kabid Perindustrian
2.	Andhika Putri Paramita, ST NIP. 19870129 201101 2 001	Penata / III c	Kasi Pembangunan SDI
3.	Yasid Arafat, SKM NIP. 19700506 199503 1 003	Penata TK.I / III d	Kasi Sarana dan Prasarana Industri
4.	Aditya Nugraha, SH NIP. 19810307 200803 1 001	Penata TK.I / III d	Kasi Pemberdayaan Industri
5.	Drs. Mahdiani, MT NIP. 19660518 199602 1 004	Pembina TK.I / IV b	Analisis Fasilitas Litbang Teknologi
6.	Herman NIP. 19831118 200701 1 001	Pengatur TK.I / II d	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi
7.	Sri Utami, A.Md	NON PNS	Tenaga Administrasi Penyuluh Perindustrian
8.	Nia Nurcahyati, A.Md	NON PNS	Penjaga Showroom Dekranasda
9.	Sri Ayu Wulandari	NON PNS	Penjaga Showroom Dekranasda
10.	Fadhilla	NON PNS	Penjaga Showroom Gedung Puspro
11.	Syalina	NON PNS	Penjaga Showroom Gedung Puspro
12.	M. Yasin	NON PNS	Penjaga Malam

			Dekranasda
13.	Rudi	NON PNS	Penjaga Malam Puspro
14.	Maulida Safitri, A.Md.T	Tenaga Ahli	Tenaga Ahli Penyuluh Perindustrian
15.	Mega Novitasari, A.Md.T	Tenaga Ahli	Tenaga Ahli Standarisasi Industri
16.	Danu Rizky Maulana, A. Md. Kom	Tenaga Ahli	Tenaga Ahli Promosi IKM Berbasis IT

J. Analisis Kendala

Pada Tahun 2021, seluruh bagian Dunia masih mengalami sebuah pandemi yang sangat berat yaitu *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Pandemi ini ternyata terus berlangsung sepanjang tahun 2021 dan tentu saja berdampak pada perekonomian Indonesia terutama Pariwisata dan Perindustrian. Kegiatan perindustrian dengan berbagai pertimbangan terus dilakukan diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan IOMKI (Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri). Akibat adanya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* ini seluruh pagu anggaran pada DPA kegiatan pada lembaga pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut mengalami refocusing. Namun yang menggembirakan, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian khususnya Bidang Perindustrian mendapatkan alokasi Dana Intensif Daerah sebesar Rp. 1.410.489.639,- Sehingga berdampak pada naiknya total pagu bidang Perindustrian menjadi Rp. 3.301.861.364,- maka dapat diterangkan masing – masing Seksi di bawah ini :

1. Seksi Pembangunan Sumberdaya Industri

Kondisi pandemi covid-19 yang masih terjadi di Kabupaten Tanah Laut yang mengalami puncak pada Bulan Juli dan Agustus 2021, mengakibatkan penyelenggaraan Pelatihan dan Pemagangan serta Fasilitasi pendampingan penerapan teknologi pada IKM binaan mengalami hambatan karena keterbatasan interaksi. Hal ini kemudian disiasati dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dalam setiap pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk antisipasi pencegahan penularan virus covid-19. Pelaksanaan pelatihan pun dilakukan dengan tetap melihat situasi dan kondisi terkini mengenai perkembangan dampak pandemi

sehingga banyak kegiatan yang akhirnya terlaksana tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Beberapa kegiatan pelatihan, pemagangan dan lomba kreasi desain yang telah dilaksanakan antara lain :

- Pelatihan Pengembangan Motif Sasirangan (Saringkel dan Bataringan)
- Pelatihan Teknis Pengembangan Motif Anyaman Purun
- Pelatihan Pembuatan Produk Fashion Berbahan Kulit Jagung
- Pelatihan Pengolahan Hasil Laut
- Magang Pengrajin Kulit di Balai Besar Kulit Karet dan Plastik Yogyakarta
- Lomba Kreasi Desain Inovasi Motif Sasirangan
- Lomba Kreasi Desain Inovasi Produk Berbahan Alam dan Limbah
- Lomba Kreasi Desain Inovasi Mesin TTG Penunjang Produksi IKM

Disamping itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi melalui Balai Riset dan Standarisasi Industri Banjarbaru dan Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan juga memberikan dukungan dalam bentuk Pelatihan, serta Fasilitas pendampingan penerapan teknologi pada IKM melalui Program DAPATI (Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri) 2021 serta APBD Provinsi Kalimantan Selatan melalui beberapa kegiatan pelatihan dan pendampingan teknologi antara lain :

- a. Pendampingan Teknologi Pembuatan Hydrotiller (traktor apung) bagi IKM Perbengkelan dan Permesinan di Kabupaten Tanah Laut
- b. Pelatihan Penumbuhan Wira Usaha Baru Sandang Berbasis Pondok Pesantren di Ponpes Sirajul Huda Kabupaten Tanah Laut
- c. Fasilitas Penerapan Teknologi Industri Batik Sasirangan bagi IKM Sasirangan Kabupaten Tanah Laut di Baristand Banjarbaru.
- d. Fasilitas Penerapan Teknologi Industri Pengolahan VCO bagi anggota IKM BYHAF di Desa Tirtajaya, Kecamatan Bajuin.

2. Seksi Sarana dan Prasarana Industri

Pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah IKM dari 3.378 industri menjadi 3.458 industri atau terjadi peningkatan sebesar 2,36 % .

Pada tahun 2021 di susun Dokumen Perwilayahan industry dimana dokumen ini bertujuan untuk memetakan Kawasan Peruntukan Industri yang ada di Kab Tanah Laut. Selain hal tersebut, dari Dana DID, ada 87 IKM yang difasilitasi Hal Merk dan ada 22 IKM yang difasilitasi Sistem Jaminan Halalnya. Untuk Peralatan Produksi, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut memberikan bantuan Hibah Peralatan bagi 9 IKM antara lain :

- a. Kelompok Koperasi Produsen Madu Permata Sejati berupa mesin kemas madu sebanyak 1 buah
- b. KTH Tani Jaya Makmur berupa mesin kemas madu sebanyak 1 buah
- c. Cisyl Collection berupa mesin jahit kulit dan mesin saset kulit masing-masing 1 buah
- d. Faeenza RNH berupa mesin jahit kulit dan mesin saset kulit masing-masing 1 buah
- e. Insan Leather Prolita berupa mesin jahit kulit dan mesin saset kulit masingIKM-masing 1 buah
- f. IKM Batu Balai berupa mesin kristalisator, mesin penepung gula semut, mesin perajang gula, mesin sortasi gula dan oven gula semut masing-masing sebanyak 1 buah
- g. IKM Batu Tanah Laut Manis berupa mesin kristalisator, mesin penepung gula semut, mesin perajang gula, mesin sortasi gula dan oven gula semut masing-masing sebanyak 1 buah
- h. IKM Karya Mandiri Sejahtera alat pertukangan berupa Band saw 1 buah, bor listrik 4 buah, gerinda 4 buah, jig saw 3 buah, mata bor full size 4 set, mesin katan 3 buah, mesin pemotong kayu duduk 2 buah, pahat ukir full size 3 set, scroll saw 3 buah dan mesin pemotong kayu 1 buah.
- i. KWT Bina Keluarga berupa mesin giling daging sebanyak 2 buah.

3. Seksi Pemberdayaan Industri

Seksi Pemberdayaan Industri mengalami dampak yang cukup besar akibat adanya *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Kegiatan pameran yang dilaksanakan tidak sebanyak tahun sebelu, adanya pandemic corona. Namun pada tahun ini Seksi PI mendapatkan Dana DAK berupa Pembangunan Rumah Kemasan sebanyak 1 unit yang terletak di Desa Ambungan, Kec. Pelaihari.

Selain Rumah Kemasan, Disnakerperind juga mendapatkan Mobil Angkutan Mobile Expo dari dana DID sebanyak 1 buah.

K. Saran

Berdasarkan kendala yang telah diterangkan di atas dapat disimpulkan dan disarankan beberapa hal sebagai solusi agar capaian terhadap kinerja utama yang telah ditargetkan sesuai indikator yang ditetapkan ditahun – tahun yang akan datang menjadi lebih baik, yaitu sebagai berikut :

1. Perlunya penambahan PTT untuk membantu proses pencapaian kinerja yang ditetapkan antara lain PTT pada Rumah Kemasan sebagai operator dan penjaga malam.
2. Perlunya penambahan anggaran untuk menyusun regulasi yang bisa mendorong pertumbuhan investasi industri di Kabupaten Tanah Laut, seperti anggaran Pembuatan DED Pola Pengembangan Sentra IKM di Tanjung Dewa.
3. Perlunya mesin dan peralatan serta workshop pada Rumah Kemasan untuk membantu IKM dalam memperbaiki kualitas produknya
4. Perlunya koordinasi dengan pusat mengenai pembangunan Fisik Sentra IKM Tanjung Dewa dengan menggunakan dana DAK.

A. Rencana Aksi 2022

Bahwa sesuai dengan saran yang kami ajukan maka kami pada tahun 2021 akan melaksanakan sebagai berikut :

1. Mengusulkan penambahan PTT dan Tenaga Ahli untuk membantu proses pencapaian kinerja yang ditetapkan;
2. Mengusulkan penambahan anggaran untuk menyusun regulasi yang bisa mendorong pertumbuhan investasi industri di Kabupaten Tanah Laut, seperti anggaran Pembuatan Deliniasi KI di Jorong dan Panyipatan, serta DED Pola Pengembangan Sentra IKM di Tanjung Dewa.
3. Mengusulkan Pengadaan Mobil Toko sebagai pusat promosi Produk IKM dan dapat untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan pemerintahan, seperti misalnya kegiatan Manunggal Tuntung Pandang.
4. Mengusulkan Rumah Kemasan untuk membantu IKM dalam memperbaiki kualitas produknya dengan menggunakan dana DAK.

5. Mengusulkan ke Kementrian Perindustrian mengenai pembangunan Fisik Sen-
tra IKM Tanjung Dewa dengan menggunakan dana DAK

v. Sasaran 5 Pada Perjanjian Kerja (Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat)

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan , Disnakerind dalam pelayanan public dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Salah satu upaya guna meningkatkann kualitas pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2009 tentang Program Pembangunan Nasional perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolak ukur untuk meningkatkan tingkat kualitas Pelayanan Publik. Sur-
vey kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari ting-
kat kinerja Disnakerind, mengetahui harapan dan kebutuhan secara kuantitatif dan kualitatif pendapat masyarakat dalam memperoleh Pelayanan Disnaker-
ind, dan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan pada Disnakerind.

*Berdasarkan hasil survey Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari 9 Unsur Pelayanan pada Disnakerind tahun 2020 Disnakerind mendapatkan Nilai 81,59 dengan kategori BAIK berada pada nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat (76,61 – 88,30). Pada tahun 2021 Disnakerind mendapatkan Nilai 87,72 dengan kategori BAIK berada pada nilai interval kon-
versi Indeks Kepuasan Masyarakat (76,61 – 88,30).*

Salah satu upaya sasaran Perjanjian Kerja sasaran pada Perjanjian Kinerja dengan meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi Disnakerind Tahun 2021, yang bearti meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan Pemerintahan terutama menyangkut aspek –aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksa-
naan dan sumber daya manusia aparatur untuk menciptakan good governance menuju clean governance.

Penilaian Reformasi Birokrasi pada tahun tahun 2021 masih dalam taha-
pan penilaian namun pada Tahun 2020 Disnakerind memperoleh nilai 34, 70 dengan Kategori **Sangat Istimewa** . Meningkatnya Nilai RB dari Tahun 2019 kategori cukup baik menjadi sangat Istimewa pada Tahun 2020 salah satunya

didukung oleh meningkatnya Pelayanan terhadap masyarakat (Pelayanan Publik). Dan Sasaran ini juga dapat dilihat pada pencapaian nilai Sakip Disnakerind, untuk tahun 2021 masih dalam tahapan penilaian/ evaluasi sedangkan untuk nilai Sakip tahun 2020 memperoleh nilai 76,16 dengan kategori BB (Sangat Baik), Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal.

Pencapaian ini didukung dengan kegiatan yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi tata kelola kesekretariatan, perkantoran, perencanaan kebutuhan, pencatatan, pemeliharaan sarana dan prasarana, pelayanan tamu, rapat-rapat dan lain-lain terkait dengan tugas dan fungsi. Tata kelola administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, terkait tugas dan fungsi.

Pada sektor perencanaan dan keuangan juga dilaksanakan kegiatan - kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan sampai dengan pembuatan laporan baik keuangan dan laporan kinerja yang telah diterbitkan yaitu : Renja Perubahan 2021, Renja 2022, Pencapaian kinerja selama 12 bulan, laporan keuangan bulanan, triwulan dan tahunan, Laporan AKIP, dan LKPJ serta LPPD tahun 2021.

Untuk menunjang pencapaian tujuan dan sasaran strategis diperlukan terobosan dan inovasi oleh unit kerja SKPD. Pada Tahun 2021 Disnakerind meluncurkan sebuah Inovasi Baru, yaitu **SOSS (Smart Office Smart Service)**.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan beberapa terobosan untuk meringankan tugas-tugas administratif yang diberikan kepada pegawai. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mempermudah berbagai proses kegiatan administratif melalui pengembangan alat kerja berbentuk aplikasi berbasis Web dan Android, yaitu Aplikasi **Smart Office – Smart Service (SOSS)**;

Aplikasi *Smart Office – Smart Service* (SOSS), merupakan alat kerja Sekretariat dalam kegiatan administrasi pemerintahan, sekaligus alat kerja Bidang untuk kegiatan pelayanan publik yang dibangun

dalam dua aplikasi berbeda yang terintegrasi (*Dual Sides App System*), yaitu Aplikasi SOSS untuk Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, dan Aplikasi SOSS untuk masyarakat Kabupaten Tanah Laut dengan mengusung motto *One Record, One Thousand Reports*.

SOSS adalah Aplikasi berbasis Web (*Web-Based App*) dan Android yang menerapkan sistem aplikasi dua arah (*Dual Sides App System*), yaitu dua aplikasi berbeda yang terintegrasi antara Pegawai DISNAKERIND, dan masyarakat Kabupaten Tanah Laut.

Fungsi Aplikasi SOSS bagi Pegawai adalah sebagai alat kerja untuk berbagai kegiatan administrasi pemerintahan, dan sebagai pengelola (Admin) untuk berbagai layanan publik DISNAKERIND.

Fungsi Aplikasi SOSS bagi masyarakat Kabupaten Tanah Laut adalah untuk mengakses berbagai informasi dan fitur layanan publik berbasis online yang dikembangkan oleh DISNAKERIND.

Registrasi pada Aplikasi SOSS untuk pegawai hanya bisa dilakukan oleh pegawai DISNAKERIND dan UPT BLK dengan merujuk pada data Nomor Identitas PNS, yaitu NIP, dan Nomor Identitas PTT, yaitu NR-PTT.

Sedangkan Registrasi Aplikasi SOSS untuk publik dapat digunakan oleh masyarakat Kabupaten Tanah Laut dengan merujuk pada Nomor Identitas Kependudukan.

Otoritas akses Aplikasi SOSS untuk pegawai diatur berdasarkan otoritas tugas dan fungsi jabatannya pada struktur organisasi DISNAKERIND.

Ruang lingkung Aplikasi SOSS untuk pegawai dibagi menjadi dua menu utama yang dibangun sesuai dengan Stuktur Organisasi DISNAKERIND, yaitu:

- a. Menu Smart Office untuk alat kerja Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Menu Umum;
 2. Sub Menu Kepegawaian;

3. Sub Menu Perencanaan; dan
4. Sub Menu Keuangan
- b. Menu Smart Service untuk alat kerja Bidang terdiri dari:
 1. Sub Menu Bidang P2TK
 2. Sub Menu Bidang HIJSTK
 3. Sub Menu Bidang Perindustrian
 4. Sub Menu UPT BLK

Ruang lingkup Aplikasi SOSS untuk publik terdiri dari tiga menu utama, yaitu:

- a. Menu promosi produk industri lokal di halaman utama;
- b. Menu berita dan informasi ketenagakerjaan dan perindustrian.
- c. Menu layanan publik DISNAKERIND dan BLK.

Menu Smart Office

- (1) Menu Smart Office berisi Sub Aplikasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DISNAKERIND, serta Sub Bagian Tata Usaha UPT BLK.
- (2) Sub Aplikasi pada Menu Smart Office terdiri dari:
 - a. Sub Menu Umum
 1. Aplikasi Register Surat Masuk
 2. Aplikasi Register Surat Keluar
 3. Aplikasi Register Nota Dinas
 4. Aplikasi Register Telaahan Staf
 5. Aplikasi Register Rekomendasi
 6. Aplikasi Register SK
 7. Aplikasi Register SPT dan SPPD (Monas)
 8. Aplikasi Register Penggunaan Mobil Dinas dan BBM (Krisna)

9. Aplikasi Register Penggunaan Rumah Dinas BLK
 - b. Sub Menu Kepegawaian
 1. Aplikasi Register Kehadiran Pegawai
 2. Aplikasi Data Pegawai
 3. Aplikasi Data Jabatan
 - c. Sub Menu Perencanaan
 1. Aplikasi Penyusunan RKA
 2. Aplikasi Renja dan Renstra
 - d. Sub Menu Keuangan
 1. Aplikasi Penatausahaan Kinerja dan Keuangan (Si Kijang).

Menu Smart Service

- (1) Menu Smart Service berisi Sub Aplikasi yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan pelayanan publik pada Bidang P2TK, Bidang HIJSTK, Bidang Perindustrian, dan UPT BLK pada DISNAKERIND.
- (2) Sub Aplikasi pada Menu Smart Service terdiri dari:
 1. Sub Menu Bidang P2TK
 - a. Aplikasi Pasar Kerja
 - b. Aplikasi Karir Hub
 2. Sub Menu Bidang HIJSTK
 - a. Aplikasi Manajemen Norma Tenaga Kerja.
 - b. Aplikasi Data Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 3. Sub Menu Bidang Perindustrian
 - a. Aplikasi Pendataan Industri
 - b. Aplikasi Pencatatan Penjualan Dekranasda dan Puspro
 4. Sub Menu UPT BLK
 - a. Aplikasi Data Peserta Pelatihan
 - b. Aplikasi Data Alumni Pelatihan

A. Realisasi Kinerja Fisik dan Keuangan

Pada tahun 2020 unit kerja Sekretariat melaksanakan 4 program yang terdiri dan 14 kegiatan dengan Pagu dengan anggaran yang sebelumnya sebesar Rp. 2.089.264.968,- setelah di Refocusing menjadi Rp.1,671,368,667 ,- dengan serapan sebesar 1.518.672.587,- atau 90,86 %. Pada tahun 2021 Kesekretariatan merealisasikan anggaran sebesar Rp. **6.553.312.899,-** atau 66 % dari pagu sebesar Rp. **9.876.109.723,-** yang mana pada kegiatan fisiknya telah dilaksanakan secara maksimal atau 97%. Sebagaimana yang dapat disimak pada tabel dibawah ini :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	ANGGARAN 2021 (Rp)	Realisasi (%)			
				Fisik	%	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	80 Nilai	9.876.109.723	87,72	109	6.553.312.899	66
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD yg Akuntabel	1 Tahun	71.755.537	12 Bulan	83	43.623.950	61
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	9.999.700	3 Dokumen	100	6.793.700	68
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	5 Laporan	34.999.676	5 Laporan	100	31.830.250	91
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	2 Pameran	26.756.161	1 Pameran	50	5.000.000	19
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan SKPD	1 Tahun	8.688.674.049	1 Tahun	100	5.481.900.082	63
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yg dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	50 Orang	8.632.506.573	38 Orang	100	5.430.499.632	63
5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Keuangan	1 Dokumen	56.167.476	1 Dokumen	100	51.400.450	92
	Jumlah Laporan Keuangan	4 Laporan		4 Laporan			
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi BMD	1 Tahun	74.934.258	1 Tahun	97	70.756.750	94
6. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Penjamin BMD	6 Jenis	74.934.258	1 Jenis	97	70.756.750	94
	Jumlah Orang	3 Orang		3 Orang			
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian SKPD	1 Tahun	39.485.160	1 Tahun	100	39.465.400	100
7. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanannya	Jumlah Pakaian	91 Stel	39.485.160	91 Stel	100	39.465.400	100
8. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang	8 Orang/Tahu	-	-	0	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	310.716.900	1 Tahun	87	289.629.670	93
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor	178 Buah	12.319.400	178 Buah	100	12.277.900	100
10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK	19 Jenis	42.303.700	19 Jenis	100	35.678.595	84
	Jumlah Jenis Peralatan & Perlengkapan Kantor	4 Jenis		4 Jenis			

11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	4 Jenis	10.949.800	4 Jenis	100	9.343.500	85
12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Jenis	6.965.600	1 Jenis	31	1.800.000	26
13. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	278 Tamu	23.183.400	263 Tamu	95	22.008.400	95
14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas	295 Orang/Kali	214.995.000	288 Orang	98	208.521.275	97
	Jumlah Peserta Rapat	500 Orang		488 Orang			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Administrasi Pengadaan BMD SKPD	1 Tahun	141.751.720	1 Tahun	100	134.581.363	95
15. Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	6 Buah	45.148.620	6 Buah	100	44.000.000	97
16. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	24 Buah	96.603.100	24 Buah	100	90.581.363	94
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	1 Tahun	253.151.668	1 Tahun	112	207.372.486	82
17. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Orang	3 Orang	28.433.076	3 Orang	148	25.637.701	90
	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	1500 Surat		2225 Surat			
18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Alat Komunikasi	2 Unit	187.895.916	2 Unit	100	145.241.435	77
	Jumlah Jenis Jasa	6 Jenis		6 Jenis			
19. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Sistem Informasi (Aplikasi)	3 Aplikasi/Tahun	5.445.000	3 Aplikasi/Tahun	100	5.280.000	97
20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis	16 Jenis	31.377.676	16 Jenis	100	31.213.350	99
	Jumlah Orang	1 Orang		1 Orang			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan BMD	1 Tahun	295.640.431	1 Tahun	99	285.983.197	97
21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	8 Unit	109.673.376	7 Unit	97	106.616.300	97
	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	2 Unit		3 Unit			
	Jumlah Orang	1 Orang		1 Orang			
22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	4 Jenis	22.445.000	4 Jenis	100	19.600.000	87
23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung	1 Buah	143.281.115	1 Buah	100	140.936.237	98
24. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor	1 Buah	20.240.940	1 Buah	100	18.830.660	93
			9.876.109.723	-	97	6.553.312.899	66

B. Sumberdaya Manusia

Kesekretariatan Tahun 2021 dalam melaksanakan program dan kegiatan dibantu oleh 7 (tujuh) orang Aparatur Sipil Negara dan 7 (tujuh) tenaga PTT. Ditambah Tenaga Administrasi IT 2 (dua) orang. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sekretaris	Pembina (IV/b)	1 orang
2. Kepala Sub Bagian		
❖ Umum dan Kepegawaian	Penata Tk.I (III/d)	1 Orang
❖ Perencanaan dan Keuangan	Penata (III/c)	1 orang
3. Pengelola Sarpras Kantor	Penata TK I (III/d)	1 orang
4. Analis Tata Laksana	Penata Muda (III/a)	1 orang
5. Bendahara Pengeluaran	Penata Muda (III/a)	1 orang
6. Pengelola Keuangan	Pengatur TK I (II/d)	1 Orang
7. Pengadministrasi Umum	Pengatur TK I (II/d)	1 Orang
8. Tenaga Administrasi Front Office	PTT/ tenaga honorer	1 orang
9. Tenaga Administrasi RK	PTT/ tenaga honorer	2 orang
10. Petugas Teknologi dan Informasi	PTT/ tenaga honorer	1 orang
11. Tenaga Administrasi IT	PTT/ tenaga honorer	1 orang
12. Tenaga Administrasi IT	PTT/ tenaga honorer	1 orang
13. Sopir	PTT/ tenaga honorer	1 orang
14. Petugas Kebersihan	PTT/ tenaga honorer	1 orang
15. Penjaga Malam	PTT/ tenaga honorer	1 orang

C. Analisis Kendala

Beberapa Kendala yang dihadapi dan menjai tanggungjawab di Kesekretariatan adalah :

1. Sarana Prasarana Gedung yang sangat terbatas dalam memberikan pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian
2. Jumlah armada Kendaraan Bermotor Roda 4 yang masih terbatas.
3. Tidak adanya Tenaga ASN sebagai Verifikator
4. Alokasi anggaran yang masih sangat terbatas dalam menunjang Belanja urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian

F. Saran dan Solusi

Berdasarkan kendala yang telah diterangkan di atas dapat disimpulkan dan disarankan beberapa hal sebagai solusi agar capaian terhadap kinerja yang telah ditargetkan sesuai indikator yang ditetapkan ditahun – tahun yang akan datang menjadi lebih baik, yaitu sebagai berikut :

1. Adanya Gedung Kantor yang lebih representatif dalam memberikan pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian
2. Penambahan Armada Kendaraan Bermotor Roda 4 untuk mendukung operasional pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian
3. Penambahan Tenaga ASN Verifikator untuk mengoptimalkan tertib administrasi keuangan.
4. Penambahan pagu anggaran dalam menunjang Belanja urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian khususnya dalam program-program pemulihan ekonomi dampak Pandemi dan pasca bencana banjir dan longsor.

E. Rencana Aksi Tahun 2022

Pada Tahun 2022 akan dilaksanakan beberapa langkah strategis sebagai berikut :

1. Meminta pembangunan Gedung Kantor yang lebih representatif dalam memberikan pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian di area samping Gedung Kantor yang ada.
2. Mengajukan Penambahan Armada Kendaraan Bermotor Roda 4 untuk mendukung operasional pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian melalui pengadaan pada APBD maupun pengalihan asset dari armada lama SKPD lain yang masih layak pakai.
3. Meminta Penambahan Tenaga ASN Verifikator pada BKPSDM untuk mengoptimalkan tertib administrasi keuangan.
4. Mengajukan Penambahan pagu anggaran dalam Renja SKPD untuk menunjang Belanja urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian khususnya dalam program-program pemulihan ekonomi dampak Pandemi dan pasca bencana banjir dan longsor.

3) Eselon III (Sekretaris).

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2021 Terhadap Target
				Target	Realisasi s.d Triwulan I	Capaian		
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD.	1 Nilai Sakip Disnakerind	BB	BB	-	0%	A	90%
		2 Nilai Reformasi Birokrasi	A	A	-	0%	AA	90%

Sasaran I (Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja)

Sasaran ini dicapai dengan melihat nilai daripada Sakip Disnakerind dan Nilai Reformasi Birokrasi.

Untuk Nilai Sakip tahun 2021 masih dalam tahapan penilaian/ evaluasi sedangkan untuk nilai Sakip tahun 2020 memperoleh nilai 76,16 dengan kategori BB (Sangat Baik), Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal.

Pencapaian ini didukung dengan kegiatan yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi tata kelola kesekretariatan, perkantoran, perencanaan kebutuhan, pencatatan, pemeliharaan sarana dan prasarana, pelayanan tamu, rapat-rapat dan lain-lain terkait dengan tugas dan fungsi. Tata kelola administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, terkait tugas dan fungsi.

Pada sektor perencanaan dan keuangan juga dilaksanakan kegiatan - kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan sampai dengan pembuatan laporan baik keuangan dan laporan kinerja yang telah diterbitkan yaitu : Renja Perubahan 2021, Renja 2022, Pencapaian kinerja selama 12 bulan, laporan keuangan bulanan, triwulan dan tahunan, Laporan AKIP, dan LKPJ serta LPPD tahun 2021.

Penilaian Reformasi Birokrasi pada tahun tahun 2021 masih dalam tahapan penilaian namun pada Tahun 2020 Disnakerind memperoleh nilai 34, 70 dengan Kategori **Sangat Istimewa** . Meningkatnya Nilai RB dari Tahun 2019 kategori cukup baik menjadi sangat Istimewa pada Tahun 2020 salah satunya didukung oleh meningkatnya Pelayanan terhadap masyarakat (Pelayanan Publik).

Capaian Realisasi Keuangan

Pada tahun 2020 unit kerja Sekretariat melaksanakan 4 program yang terdiri dan 14 kegiatan dengan Pagu dengan anggaran yang sebelumnya sebesar Rp. 2.089.264.968,- setelah di Refocusing menjadi Rp.1,671,368,667 ,- dengan serapan sebesar 1.518.672.587,- atau 90,86 %. Pada tahun 2021 unit kerja Sekretariat melaksanakan 1 program yang terdiri, 8 kegiatan dan 24 Sub kegiatan dengan Pagu dengan anggaran sebesar Rp. 9.876.109.723,- dengan serapan sebesar

6.553.312.899,- atau 66 %. Untuk capaian fisik dan keuangan Tahun 2021 dapat dilihat secara lengkap pada table berikut :

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	ANGGARAN 2021 (Rp)	Realisasi (%)			
					Fisik	%	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM	80 Nilai	9.876.109.723,00	87,72	109,00	6.553.312.898,54	66,36
	I. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD yg Akuntabel	1 Tahun	71.755.537,00	12 Bulan	83,33	43.623.950,06	60,80
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	9.999.700,00	3 Dokumen	100,00	6.793.700,00	67,94
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	5 Laporan	34.999.676,00	5 Laporan	100,00	31.830.250,06	90,94
	3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	2 Pameran	26.756.161,00	1 Pameran	50,00	5.000.000,00	18,69
	II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan SKPD	1 Tahun	8.688.674.049,00	1 Tahun	100,00	5.481.900.082,06	63,09
	4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yg dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	50 Orang	8.632.506.573,00	38 Orang	100,00	5.430.499.632,00	62,91
	5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Keuangan	1 Dokumen	56.167.476,00	1 Dokumen	100,00	51.400.450,06	91,51
		Jumlah Laporan Keuangan	4 Laporan		4 Laporan			
	III. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi BMD	1 Tahun	74.934.258,00	1 Tahun	97,00	70.756.750,18	94,43
	6. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Penjamin BMD	6 Jenis	74.934.258,00	1 Jenis	97,00	70.756.750,18	94,43
		Jumlah Orang	3 Orang		3 Orang			
	IV. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian SKPD	1 Tahun	39.485.160,00	1 Tahun	100,00	39.465.400,00	99,95
	7. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian	91 Stel	39.485.160,00	91 Stel	100,00	39.465.400,00	99,95
	8. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang	8 Orang/Tahu	0,00	-	0,00	0,00	0,00
	V. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	310.716.900,00	1 Tahun	87,20	289.629.670,00	93,21
	9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor	178 Buah	12.319.400,00	178 Buah	100,00	12.277.900,00	99,66
	10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK	19 Jenis	42.303.700,00	19 Jenis	100,00	35.678.595,00	84,34
		Jumlah Jenis Peralatan & Perlengkapan Kantor	4 Jenis		4 Jenis			
	11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	4 Jenis	10.949.800,00	4 Jenis	100,00	9.343.500,00	85,33
	12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 Jenis	6.965.600,00	1 Jenis	31,00	1.800.000,00	25,84
	13. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	278 Tamu	23.183.400,00	263 Tamu	94,60	22.008.400,00	94,93
	14. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas	295 Orang/Kali	214.995.000,00	288 Orang	97,61	208.521.275,00	96,99
		Jumlah Peserta Rapat	500 Orang		488 Orang			
	VI. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Administrasi Pengadaan BMD SKPD	1 Tahun	141.751.720,00	1 Tahun	100,00	134.581.363,00	94,94
	15. Pengadaan Mebel	Jumlah Meubel	6 Buah	45.148.620,00	6 Buah	100,00	44.000.000,00	97,46
	16. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	24 Buah	96.603.100,00	24 Buah	100,00	90.581.363,00	93,77

VII. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Kinerja SKPD	1 Tahun	253.151.668,00	1 Tahun	112,06	207.372.486,18	81,92
17. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Orang	3 Orang	28.433.076,00	3 Orang	148,24	25.637.701,06	90,17
	Jumlah Surat Masuk dan Keluar	1500 Surat		2225 Surat			
18. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Alat Komunikasi	2 Unit	187.895.916,00	2 Unit	100,00	145.241.435,06	77,30
	Jumlah Jenis Jasa	6 Jenis		6 Jenis			
19. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemeliharaan Sistem Informasi (Aplikasi)	3 Aplikasi/Tahun	5.445.000,00	3 Aplikasi/Tahun	100,00	5.280.000,00	96,97
20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jenis	16 Jenis	31.377.676,00	16 Jenis	100,00	31.213.350,06	99,48
	Jumlah Orang	1 Orang		1 Orang			
VIII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pemeliharaan BMD	1 Tahun	295.640.431,00	1 Tahun	99,25	285.983.197,06	96,73
21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	8 Unit	109.673.376,00	7 Unit	97,00	106.616.300,06	97,21
	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	2 Unit		3 Unit			
	Jumlah Orang	1 Orang		1 Orang			
22. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	4 Jenis	22.445.000,00	4 Jenis	100,00	19.600.000,00	87,32
23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung	1 Buah	143.281.115,00	1 Buah	100,00	140.936.237,00	98,36
24. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor	1 Buah	20.240.940,00	1 Buah	100,00	18.830.660,00	93,03
JUMLAH			9.876.109.723,00	-	97,00	6.553.312.898,54	66,36

Permasalahan

1. Sarana Prasarana Gedung yang sangat terbatas dalam memberikan pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian
2. Jumlah armada Kendaraan Bermotor Roda 4 yang masih terbatas.
3. Tidak adanya Tenaga ASN Pengelola Gaji dan Verifikator
4. Alokasi anggaran yang masih sangat terbatas dalam menunjang Belanja urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian.

Rencana aksi

1. Melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan Pemerintahan terutama menyangkut aspek –aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur untuk menciptakan good governance menuju clean governance. Penilaian Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 Disnakerind memperoleh nilai 34, 70 dengan Kategori *Sangat Istimewa*. Meningkatnya Nilai RB

dari kategori cukup baik menjadi sangat Istimewa salah satunya didukung oleh meningkatnya Pelayanan terhadap masyarakat (Pelayanan Publik).

2. Mengusulkan Penambahan SDM guna peningkatan Kualitas dan kuantitas kinerja terutama Gaji dan Verifikator pada BKPSDM untuk mengoptimalkan tertib administrasi keuangan.
3. Mengusulkan penambahan Perluasan gedung guna peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana kantor untuk memaksimalkan pelayanan public terhadap masyarakat yakni pembangunan Gedung Kantor yang lebih refresentatif dalam memberikan pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian di area samping Gedung Kantor yang ada.
4. Mengajukan Penambahan Armada Kendaraan Bermotor Roda 4 untuk mendukung operasional pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan dan Perindustrian melalui pengadaan pada APBD maupun pengalihan asset dari armada lama SKPD lain yang masih layak pakai.
5. Mengajukan Penambahan pagu anggaran dalam Renja SKPD untuk menunjang Belanja urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian

4) Eselon IV (Kasubbag Umum dan Kepegawaian)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Tahun 2021 Terhadap Target Akhir
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1	Tertib Adminstrasi Barang milik daerah	1 Jumlah Jasa Penjamin Barang Milik Daerah dan	3 Orang	dan 6 Jenis	3 Orang dan 1 Jenis	97%		
2	Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Jumlah Pakaian	-	91 Stel	91 Stel	100%		
		2 Jumlah Orang	16 Orang	8 Orang/1	0	0%		
3	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Jumlah Komponen Instalasi Listrik		178 Buah	178 Buah	100%		
		2 Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan	35 Jenis	19 Jenis dan 4	19 Jenis dan 4 Jenis	100%		
		3 Jumlah Jenis Barang Cetak dan		4 Jenis	4 Jenis	100%		
		4 Jumlah Jenis Bahan		2 Jenis	1 Jenis	31%		
		5 Jumlah Tamu yang difasilitasi	-	278 Tamu	263 Tamu	94%		
		6 Jumlah Peserta dan Perjalanan Dinas	741 Orang	500 Orang	288 Orang dan 488	97%		
4	Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Jumlah Meubel		6 Buah	6 Buah	100%		
		2 Jumlah Sarpras Gd Kantor	4 Jenis	24 Buah	24 Buah	100%		
5	Melaksanakan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Jumlah Orang, Surat masuk dan keluar	1 Orang	1500 Surat	1.350 Surat dan 3 Orang	90%		
		2 Jumlah Jenis Jasa dan Alat komunikasi	6 Jenis	6 Jenis dan 2	Unit & 6 Jen	100%		
		3 Pemeliharaan Sistem Informasi	2 Aplikasi	3 Aplikasi/	3 Aplikasi/Ta	100%		
		4 Jumlah jenis dan Orang		16 Jenis dan 1 Orang	16 Jenis dan 1 Orang	100%		
6	Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik daerah	1 Jumlah Kendaraan dinas Roda 2, Roda 4 dan		8 Unit, 2 Unit dan	7 Unit, 3 Unit dan 1	97%		
		2 Jumlah Pemeliharaan Per	15 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%		
		3 Jumlah Gedung Kantor		1 Buah	1 Buah	100%		
		4 Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana gd		1 Buah	1 Buah	100%		

Subbag Umum dan Kepegawaian melaksanakan 3 program yang terdiri dari 11 kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp .1.650.373.007,- . Pada tahun 2021 melaksanakan 1 program yang terdiri dari 6 kegiatan dan 19 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran Rp. 1.115.680.137,-. Dengan realisasi sebesar Rp. 1.030.786.339,- atau 92 %, untuk capaian fisik sebagaimana table di atas.

Permasalahan

- Akibat dari refocusing adanya pengurangan target kegiatan bahkan ada yang tidak bisa dilaksanakan sehingga pencapaian tidak 100%.
- Kurangnya SDM pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian sehingga perlu kerja maksimal dengan beban kerja yang tinggi.
- Sarana dan prasarana yang belum memadai.

Rencana Aksi

- Untuk melaksanakan kegiatan dengan Penerapan E-Government dengan system pemerintah berbasis elektronik (SPBE) program/ kegiatan bisa dilaksanakan secara online.
- Mengusulkan penambahan ASN yang sesuai dengan Peta Jabatan yang masih belum terisi.
- Membuat TS Pengusulan gedung kantor guna peningkatan sarana dan prasarana dalam menunjang Pelayanan terhadap masyarakat.

5) Eselon IV (Kasubbag Perencanaan dan Keuangan)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2021 Terhadap Target
				Target	Realisasi s.d Triwulan I	Capaian		
1.	Melaksanakan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja SKPD yang Akuntabel	1 Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	60%
		2 Jumlah Laporan Capaian Kinerja	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100%	5 Laporan	60%
		3 Jumlah Kegiatan	-	2 Pameran	1 Pameran	50%	8 Pameran	60%
2.	Tertib Administrasi Keuangan SKPD	1 Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan	36 Orang	50 Orang	38 Orang	76%		
		2 Jumlah Dokumen dan Laporan	1 Dokumen & 4 Laporan	1 Dokumen & 4 Laporan	1 Dokumen & 4 Laporan	100%	2 Dokumen & 18 Laporan	60%

Subbag Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2021 melaksanakan 2 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian sebagai berikut :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, terdiri dari 3 Sub Kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 3 dokumen perencanaan dan tercapai 100 % dengan output Dokumen Revisi Renstra Tahun 2018-2023, Dokumen Rencana Kerja Tahun 2022 dan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan tercapai 100 % dengan output 5 Laporan yaitu Lkj, LKPJ dan LPPD Tahun 2020 serta Laporan Kinerja/ Statistik Bulanan Tahun 2021 dan Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan Tahun 2021
 - c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 2 Kegiatan Pameran dan terealisasi 50 % yaitu 1 Pameran Anggrek (Orchid Show), untuk Tanah Laut Expo tidak dapat dilaksanakan karena terkendala kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) oleh Satgas Covid 19.
2. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, terdiri dari 2 Sub Kegiatan sebagai berikut :
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 50 Orang ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan nya tercapai 100 %.
 - b. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dengan output 1 Buah Dokumen CALK Tahun 2020 dan 4 Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Tahun 2020, Laporan Keuangan Bulanan Tahun 2021, Laporan Keuangan Triwulan Tahun 2021 dan Laporan Keuangan Semesteran tahun 2021).

Untuk anggaran dan realisasi fisik serta keuangan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Output dalam DPA	Target Kinerja	ANGGARAN 2021 (Rp)	Realisasi (%)			
				Fisik	%	Keuangan	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja SKPD yg Akuntabel	1 Tahun	71.755.537	12 Bulan	83	43.623.950	61
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	9.999.700	3 Dokumen	100	6.793.700	68
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja	5 Laporan	34.999.676	5 Laporan	100	31.830.250	91
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan	2 Pameran	26.756.161	1 Pameran	50	5.000.000	19
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan SKPD	1 Tahun	8.688.674.049	1 Tahun	100	5.481.900.082	63
4. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yg dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	50 Orang	8.632.506.573	38 Orang	100	5.430.499.632	63
5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Keuangan	1 Dokumen	56.167.476	1 Dokumen	100	51.400.450	92
	Jumlah Laporan Keuangan	4 Laporan		4 Laporan			
			8.760.429.586	-	95	5.525.524.032	63

Permasalahan

1. Tidak adanya Tenaga ASN Pengelola Gaji dan Verifikator
2. Alokasi anggaran yang masih sangat terbatas dalam menunjang Belanja urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian sehingga sedikit menyulitkan dalam proses perencanaan dan pencapaian target kinerja Renstra dan Renja yang sudah ditetapkan.

Rencana Aksi

1. Mengusulkan Penambahan SDM guna peningkatan Kualitas dan kuantitas kinerja terutama Gaji dan Verifikator pada BKPSDM untuk mengoptimalkan tertib administrasi keuangan.
2. Mengajukan Penambahan pagu anggaran dalam Renja SKPD untuk menunjang Belanja urusan Ketenagakerjaan dan Perindustrian khususnya dalam program-program pemulihan ekonomi dampak Pandemi dan pasca bencana banjir dan longsor serta penguatan pencapaian target kinerja Renstra dan Renja yang sudah ditetapkan.

6) Eselon IV (Kepala Subbag Tata Usaha BLK)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1	Tertib Adminstrasi Barang milik daerah	1 Jumlah orang tenaga petugas penjaga malam	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1	99,29%	
2	Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Jumlah Jenis komponen instalasi/penerangan		6 Jenis	6 Jenis	6	100%	
		2 Jumlah Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor		27 Jenis	27 Jenis	26	96%	
		3 Jumlah Jenis Barang Cetak	25 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	4	93%	38 Jenis
		4 Jumlah Jenis Bahan bacaan dan Peraturan		1 Jenis	1 Jenis	1	95,34%	
		5 Jumlah Tamu	-	82 Orang	82 Orang	82	59,52%	
		6 Jumlah Orang yang melakukan Perjalanan Dinas	91 Orang	75 Orang dan 34	75 Orang dan 34	64	96,54%	300 Orang
3	Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Jumlah Mebeleur		4 Jenis	4 Jenis	4	100%	
		2 Jumlah Perlengkapan	1 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2	100%	6 Jenis
4	Melaksanakan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	1 Jumlah Orang Tenaga Pelayanan administrasi	1 Orang	300 Surat	300 Surat dan 1	1	98,96%	
		2 Jumlah Jenis Jasa komunikasi	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3	47,22%	
		3 Jumlah orang tenaga petugas Kios 3 in 1	2 Orang	3 Orang	3 Orang	3	96,28%	
		4 Jumlah Tenaga Kebersihan dan Jenis	2 Orang	10 Jenis dan 2	10 Jenis dan 2	12	100,00%	
5	Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik daerah	1 Jumlah jasa/unit pemeliharaan dan		7 Unit	7 Unit	7	100,00%	
		2 Jumlah Jenis Peralatan Kerja		4 Jenis	4 Jenis	3	70%	
		3 Jumlah Jaringan listrik dan	40 Jenis	3 Gedung	3 Gedung dan 5 Unit	11	100%	60 Jenis
		4 Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana gd		11 Jenis	11 Jenis			

Capaian

- g. Untuk kegiatan administrasi umum perangkat daerah yang meliputi : 1) Penyediaan komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor sebesar 88,8%, 2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor sebesar 74,5%, 3) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 92,9%, 4) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 95,3%, 5) Fasilitas Kunjungan Tamu 59,5% dan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar 96,5% pada Tahun 2021 dan pada Tahun 2020 tercapai 59,8%.

- h. Pengadaan barang milik daerah terdiri dari pengadaan mebel tercapai 84,5% dan pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya sebesar 79,8%.
- i. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah meliputi : 1) Penyediaan jasa surat menyurat tercapai 99%, 2) Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar 41%, 3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor tercapai 96,3%, 4) Pelayanan umum kantor tercapai 99,6% sedangkan pada Tahun 2020 tercapai 100%.
- j. Pemeliharaan Barang Milik Daerah untuk 1) penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan tercapai 97,7%, 2) pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebesar 70,1%, 3) Pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya tercapai 84,5% dan 4) Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya sebesar 92,3% pada tahun 2020 sebesar 62,5%.

Permasalahan/ Kendala

Kegiatan yang ada pada Balai Latihan Kerja Tahun 2021 dengan Jumlah Pagu Rp. 737.199.344,- dengan 1 program 5 kegiatan 17 sub kegiatan dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 676.588.459,- atau 91,8%. Adapun untuk kegiatan 1) Fasilitas Kujungan Tamu hanya tercapai 59,5 dikarenakan kegiatan untuk souvenir/cendera mata tidak bisa di pertanggungjawabkan dampak covid-19 tidak diperbolehkannya kunjungan tamu yang berasal dari luar Kal-Sel dan pada penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tercapai 41% dimana pagunya sebesar Rp. 103.199.476,- realisasi keuangan Rp. 42.284.570,- secara fisik realisasi 100%.

Rencana Aksi

1. Untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik nantinya bisa menghitung sesuai dengan kebutuhan dan kelebihan anggaran bisa di pergunakan untuk kegiatan yang prioritas.

4. Eselon III (Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja dan kesempatan kerja	1 Persentase peserta latih yang berkompeten	66,19%	65%	38,65%	59,46%	75,0%	51,53%
2	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	1 Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	7,29%	6%	19,23%	320,50%	6,5%	295,84%

Indikator I (Persentase Peserta Latih yang Kompeten)

Penjelasan Indikator Persentase Peserta Latih yang Kompeten.

Rumus :

$$PK = \frac{\sum a}{\sum b} \times 100\%$$

Keterangan:

PK : Peserta yang Kompeten

a : Jumlah Peserta Latih yang Lulus Uji Kompetensi

b : Jumlah Latih Seluruh Paket Kejuruan

Capaian

Pada tahun 2021 realisasi capaian persentase peserta latih yang kompeten adalah 38,65%. Angka 38,65% tersebut masih dibawah *angka realisasi capaian tahun 2020 yaitu 66,19%.* **Tahun 2021 dimaknai sebagai tahun *new normal*** dimana pada tahun 2020 Indonesia dan negara lainnya mengalami Pandemi global covid-19, sedangkan tahun 2021 kita diharapkan dapat beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan kebiasaan baru, sambil berusaha mengatasi pandemi covid-19 yang imbasnya sangat besar diberbagai bidang seperti bidang kesehatan, investasi, ekonomi, pariwisata dan tentunya ketenagakerjaan.

Imbas atau efek dari Pandemi Covid-19 juga terasa pada paket pelatihan yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) Pelaihari, maupun yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas serta di Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta, dengan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Ketenagakerjaan RI dan juga paket pemagangan dengan sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Kabupaten Tanah Laut. Secara keseluruhan paket kegiatan pelatihan dan uji kompetensi yang diselenggarakan jumlahnya menurun dibandingkan dengan tahun 2020.

Angka capaian tahun 2021 terhadap target akhir renstra sebesar **38,65%** ini menggambarkan masih banyak peserta latih maupun pemagangan yang tidak mendapatkan kesempatan untuk Tes Uji Kompetensi kemampuan mereka. Sebagai gambaran, dari 1.079 peserta pelatihan dan pemagangan, hanya 417 orang yang mengikuti dan lulus tes uji kompetensi. Hal ini disebabkan biaya tes uji kompetensi yang diselenggarakan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Bekasi, bersumber dari APBN termasuk dana yang difokuskan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI, sementara *APBD Kabupaten Tanah Laut **tidak** menyediakan dana pendampingan untuk tes uji kompetensi peserta pelatihan dan pemagangan*

Kendala

Akibat terbatasnya dana anggaran APBN dan APBD dalam mengalokasikan dana kegiatan tes uji kompetensi bagi peserta pelatihan maupun pemagangan *menyebabkan mereka tidak memiliki sertifikat kemampuan kompetensi keterampilan dirinya setelah mengikuti pelatihan maupun pemagangan*. Padahal sertifikat ini merupakan bukti otentik bagi peserta untuk masuk ke dunia kerja bahwa dia kompeten pada keterampilan atau jurusan pelatihan yang diikutinya sebagai salah satu bukti kemampuan diri untuk memasuki dunia kerja.

Rencana aksi.

Untuk mengatasi kendala/permasalahan ketiadaan dana tes uji kompetensi, maka ***Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, dapat menyediakan dana/anggaran tes uji kompetensi*** sebagai dana pendampingan pelatihan yang dibiayai oleh APBN Kementerian Ketenagakerjaan RI. Dengan melakukan pemetaan kompetensi dan sertifikasi keahlian diharapkan dapat memperbesar daya saing tenaga kerja dalam daerah terhadap tenaga kerja yang berasal dari luar kabupaten/kota atau luar provinsi bahkan tenaga kerja asing.

Pada Bab 6 Buku Rencana Tenaga Kerja (RTK) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021-2024, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut mendorong

kebijakan terkait dengan pembangunan bidang ketenagakerjaan di bidang pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut:

15. Mendorong tersedianya lembaga-lembaga pelatihan yang pelatihannya berorientasi pada dunia kerja. Dengan demikian, angkatan kerja tidak langsung masuk pasar kerja, akan tetapi terserap lebih dahulu ke Lembaga pelatihan, sehingga menciptakan keluaran berupa tenaga kerja yang lebih siap pakai.
16. Revitalisasi Pelatihan Kerja (Balai Latihan Kerja) melalui perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana pelatihan yang ada, serta mendorong UPTD Balai Latihan Kerja untuk semakin mudah diakses oleh berbagai kalangan, termasuk pula melaksanakan pelatihan ke desa dengan akses dana desa, berdasarkan hasil musrembang.
17. Peningkatan Keterampilan Kerja dan Penguatan Pendidikan Orang Dewasa yang diselenggarakan baik dinas pendidikan maupun SKPD teknis lainnya;
18. Mendorong peningkatan pelatihan keterampilan kerja para santri pondok pesantren, termasuk bantuan sarana, agar dapat melakukan usaha produktif melalui BLK Komunitas;
19. Mendorong peningkatan pelatihan keterampilan kerja para pencari kerja, melalui bantuan sarana prasarana LPK Swasta.
20. Penciptaan kemudahan akses informasi pelatihan melalui IT, sertifikasi dan penempatan (kios 3 in 1) bagi calon tenaga kerja maupun tenaga kerja;
21. Peningkatan jumlah dan kualitas instruktur secara bertahap melalui up grading, uji on the job training instruktur;
22. Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi secara konsisten, didukung pengembangan TUK (Tempat Uji Kompetensi);
23. Mengarahkan Pelatihan Berbasis Masyarakat untuk mendorong terciptanya lapangan kerja usaha baru dan mendorong keberanian untuk memulai usaha baru (penumbuhan wirausaha baru) bagi pencari kerja muda, baik sarjana baru maupun non sarjana. Termasuk pengembangan pelatihan alih kerja (PAKER) atau alih profesi pekerja ter-PHK;
24. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan kerja di berbagai bidang keahlian, melalui Lembaga pelatihan kerja dengan memperhatikan jenis dan derajat kedisabilitasnya;

25. Sertifikasi kompetensi di akhir pelatihan dan pelaksanaan Uji Kompetensi bagi lulusan BLK Pemerintah, BLK Komunitas, LPK Swasta oleh lembaga Sertifikasi Profesi;
26. Membangun jejaring diantara pemangku kepentingan (stakeholders) bidang pelatihan kerja yang meliputi antara lain: dunia pendidikan (pendidikan umum kejuruan, maupun perguruan tinggi), dunia usaha dan dunia industri melalui Bursa Kerja Khusus (BKK);
27. Pengembangan program dan peningkatan kualitas kelembagaan yang setara dengan standar kebutuhan pasar kerja yang bertaraf nasional maupun internasional.
28. Mengoptimalkan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan

Indikator II (Indikator Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan)

Penjelasan Indikator Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan

Rumus indikator adalah besaran dari tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota.

Rumus :

$$\text{Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan} = \frac{\Sigma a}{\Sigma b} \times 100\%$$

Keterangan:

a : Jumlah Pencari Kerja ditempatkan

b : Jumlah Pencari Kerja terdaftar

Capaian

Pada tahun 2021, angka capaian persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme Layanan Antar Kerja sebesar 19,23% meningkat dibandingkan tahun 2020 yaitu 7,29%. Data ini diperoleh berdasarkan perhitungan internal Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut. Data ini menggambarkan bahwa terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di sektor formal pada tahun 2021 dibandingkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di sektor formal tahun 2020. Salah satu faktor yang menyebabkan tren peningkatan ini antara lain adanya pejabat fungsional pengantar kerja sebanyak satu orang di Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2021 sehingga fungsi perantaraan kerja mulai berjalan sebagaimana mestinya.

Kendala

1. Dengan adanya pejabat fungsional pengantar kerja pada tahun 2021, dapat dilihat bahwa jumlah lowongan kerja terdaftar, pencari kerja terdaftar, dan pencari kerja ditempatkan mulai mengalami peningkatan. Meski terjadi peningkatan besaran penempatan di sektor formal, namun kepatuhan/kewajiban perusahaan mengenai pelaporan lowongan kerja juga perlu ditekankan/di dorong lebih jauh. Penyampaian lowongan kerja kepada Dinas Tenaga Kerja, akan membantu tenaga kerja di Kabupaten Tanah Laut untuk mendapatkan informasi yang disebarluaskan oleh Dinas Tenaga Kerja melalui media online (medsos) maupun media offline (papan pengumuman lowongan kerja).
2. Salah satu upaya yang dilakukan Kabupaten Tanah Laut untuk memperluas akses para pencari kerja terhadap lapangan kerja adalah dengan menyelenggarakan bursa kerja. Pada periode tahun 2014-2020, penyelenggaraan bursa kerja swasta (Bursa Kerja Khusus/BKK) di Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan dua tahun saja, yakni sebanyak satu kali pada tahun 2016 dan tujuh kali pada tahun 2017. Sedangkan, untuk penyelenggaraan bursa kerja pemerintah belum ada.

Rencana Aksi.

- 1) Mendorong perusahaan untuk menyampaikan lowongan kerja dengan terbitnya peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2018 tentang Penempatan Tenaga Kerja **pasal 38 ayat (1)** bahwa “Pemberi Kerja yang membutuhkan tenaga kerja **wajib** menyampaikan informasi adanya lowongan pekerjaan secara manual atau melalui online system kepada Dinas setempat”. **Pasal 38 ayat (3)** dijelaskan bahwa “Bukti Lapor Lowongan pekerjaan ada/atau bukti wajib lapor ketenagakerjaan akan menjadi pemenuhan komitmen bagi perusahaan yang ingin memperoleh layanan perizinan pada instansi yang berwenang di bidang perizinan”. *Hal ini akan mengoptimalkan system informasi pasar kerja (IPK) daerah dimana terjadi proses penempatan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan permintaan tenaga kerja.*

- 2) Mendorong penempatan yang dilakukan di Bursa Kerja Khusus (BKK) tingkat Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Perguruan Tinggi, Lembaga Pelatihan Kerja, serta di Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (peraturan Bupati Tanah Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2018)

1) Eselon IV (Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Melaksanakan Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/kota	1 Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan 2 Jumlah Pencari Kerja yang mendapat	182 Orang 45 Orang	180 Orang 100 Orang	220 Orang 100 Orang	122,2% 100%	600 Orang	82%
2	Melaksanakan Penerbitan LPTKS dalam 1 daerah	1 Banyaknya monitoring ke	-	4 Kali	4 Kali	100%		
3	Mengelola Informasi Pasar Kerja	1 Jumlah Job Fair di Tanah Laut	-	1 Kali	0 Kali	0,00%		

Capaian

- Jumlah pencari kerja yang ditempatkan meningkat pada tahun 2021 sebanyak 220 orang dari pencari kerja yang terdaftar di bandingkan tahun 2020 sebanyak 182 orang sehingga di dapat capaian sebesar 120,88%
- Jumlah peserta sosialisasi juga meningkat pada tahun 2021 yaitu sebanyak 265 orang peserta di bandingkan pada tahun 2020 hanya 95 orang peserta.

Permasalahan

Seperti yang disebutkan pada sasaran RPJMD di atas bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan yaitu pada tahun 2021, penurunan angka TPT pada tahun 2021 meskipun masih dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19, dimana terjadi peningkatan terkonfirmasi positif covid-19 di Kabupaten Tanah Laut sehingga mengakibatkan pula terjadinya pemberlakuan PPKM. Namun pada tahun 2021 ini beberapa perusahaan sudah mulai membuka lowongan kerja dan melakukan penempatan tenaga kerja di perusahaan nya. Hal ini yang menyebabkan menurun nya jumlah pencari kerja di Tahun 2021 sebesar 1.144 orang di bandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 2.496 orang. Meskipun pencari kerja yang terdaftar menurun namun tidak mengartikan bahwa masyarakat yang mencari pekerjaan berkurang karena pada tahun 2021 ini peserta sosialisasi masih banyak yang berminat.

Rencana aksi

Melihat permasalahan pada tahun 2021 tersebut maka pada tahun 2022 akan dilaksanakan beberapa langkah strategis sebagai berikut :

- Setiap perusahaan yang membuat izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus mencantumkan informasi lowongan pekerjaan.
- Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Penempatan tenaga Kerja bagi perusahaan dan pemberi kerja perseorangan. Sosialisasi ini dalam rangka memberikan informasi tentang kewajiban pelaporan adanya informasi lowongan pekerjaan, proses rekrutmen, proses penempatan hingga pada pelaporan penempatan.
- Melakukan kerjasama dengan UPT BP2MI di Banjarbaru serta Kantor Imigrasi kelas I Banjarmasin dalam upaya meningkatkan kesadaran akan layanan Pekerja Migran Indonesia sampai tingkat kelurahan/ desa.
- Membuat aplikasi pendataan pencari kerja untuk memperkuat layanan Informasi Pasar Kerja Daerah.

2) Eselon IV (Kepala Seksi Pelatihan dan Produktivitas)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Melaksanakan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetisi	1 Jumlah Pencari kerja yang dimagangkan	90 Orang	10 orang	10 Orang	100%		0,00%
2	Melaksanakan Pembinaan Lembaga pelatihan Kerja Swasta	1 Jumlah dokumen	0 Dokumen	dokumen	0 Dokumen	0,00%	dokumen	0,00%
		2 Jumlah orang	10 Orang	70 orang	80 Orang	114,29%	310 orang	25,81%
3	Melaksanakan Konsultasi Produktifitas pada Perusahaan Kecil	1 Jumlah Orang/ Pelaku Perusahaan Kecil, Mikri dan Menegah	-	20 Orang	18 Orang	90,00%	330 Orang	5,45%

Capaian

- Jumlah pencari kerja yang dimagangkan pada tahun 2021 adalah sebanyak 10 orang dari Dana APBD dan untuk tahun 2020 sebanyak 90 orang dengan rincian 10 orang dari dana APBD dan 80 oran dari dana APBN melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.
- Jumlah Pengelola Lembaga Pelatihan Kerja yang diberikan Pelatihan Manajemen Peningkatan Mutu Kelembagaan adalah sebanyak 20 orang dan Instruktur dan Tenaga Latih dalam Pelatihan Peningkatan Peningkatan Profe-

sionalisme Instruktur dan Tenaga Latih Lembaga Pelatihan Kerja sebanyak 60 orang sedangkan pada Tahun 2020 capaian sebanyak 15 orang pengelola lembaga pelatihan yang mengikuti pelatihan Manajemen Peningkatan Mutu Kelembagaan.

- Jumlah pelaku usaha kecil, mikro dan menengah yang mengikuti pelatihan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penguatan Daya Saing Perusahaan adalah sebanyak 18 orang dari target 20 orang atau tercapai sebanyak 90%

Permasalahan

Dalam pelaksanaan program pemagangan berbasis pengguna terkendala pada proses pencairan uang saku peserta yang sering terlambat dikarenakan sistem pembayaran dan beberapa kendala teknis lainnya. Untuk pelaksanaan pelatihan peningkatan produktivitas permasalahan yang dihadapi adalah peserta tidak datang pada saat pelaksanaan pelatihan sehingga target tidak tercapai 100%.

Rencana Aksi

Melihat permasalahan pada tahun 2021 tersebut maka pada tahun 2022 akan dilaksanakan beberapa langkah strategis sebagai berikut :

1. Sosialisasi Ketenagakerjaan (Bimbingan Program Kartu Pra Kerja) bagi pencari kerja
2. Sosialisasi Program Pemagangan dalam Negeri Berbasis Pengguna kepada Perusahaan untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut baik melalui dana Pemerintah maupun secara mandiri.
3. Memberikan hibah bantuan sarana penunjang pelatihan kepada lembaga pelatihan kerja swasta.
4. Mengadakan rapat koordinasi dengan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta untuk membina dan mengevaluasi kegiatan dan kendala yang dihadapi lembaga pelatihan kerja swasta.
5. Mengadakan rapat koordinasi persiapan untuk mengikuti penilaian Sidhakarya.

3) Eselon IV (Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Melaksanakan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1 Jumlah Pencari kerja yang dimagangkan	90 Orang	10 orang	10 Orang	100%		0,00%
2	Melaksanakan Pembinaan Lembaga pelatihan Kerja Swasta	1 Jumlah dokumen	0 Dokumen	dokumen	0 Dokumen	0,00%	dokumen	0,00%
		2 Jumlah orang	10 Orang	70 orang	80 Orang	114,29%	310 orang	25,81%
3	Melaksanakan Konsultasi Produktifitas pada Perusahaan Kecil	1 Jumlah Orang/ Pelaku Perusahaan Kecil, Mikri dan Menengah	-	20 Orang	18 Orang	90,00%	330 Orang	5,45%

Capaian

Pada capaian tahun 2021 terjadi peningkatan yang signifikan baik itu dari segi perolehan anggaran serta capaian indikator diantaranya :

Sub kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja tahun 2021 memperoleh capaian anggaran 86,03% dengan target indikator jumlah Wirausaha 160 keatas, sudah mencakup perolehan dari kegiatan pelatihan berbasis

- b. kewirausahaan diluar kegiatan sinergitas Mitra Tala Preneur Manunggal Tun-tung Pandang.
- c. Subkegiatan Penyusunan dokumen rencana tenaga kerja daerah (RTKD) yang mencapai realisasi anggaran 80,80% dengan capaian output tersusunnya dokumen rencana tenaga kerja daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 s.d 2024.
- d. Subkegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Purna Penempatan dengan capaian pada tahun 2021 79,18% dan perolehan output indikator Jumlah PMI (pra dan purna) yang mendapatkan perlindungan dan pelatihan keterampilan berjumlah 40 orang PMI Purna. Yang pelaksanaannya pada 2 (dua) kecamatan yaitu kecamatan Bati-Bati dan Kecamatan Panipatan.

Permasalahan

Untuk acuan kelancaran terealisasinya kegiatan perluasan kesempatan kerja dan cakupan subkegiatan lainnya ialah yang selalu menjadi problem dari tahun ke tahun kedepannya ialah sulitnya menarik minat dan mengarahkan mindset pemuda dan pemudi Kab.Tanah Laut untuk memulai ketertarikan pada dunia kewirausahaan.

Serta membangun tingkat kepercayaan diri mereka dalam berani bersaing pada kancah industri menengah nantinya.

Rencana aksi

Diharapkan dengan memaksimalkan kegiatan penumbuhan Wirausaha Baru (WUB), peningkatan TKM, terlaksananya perusahaan yang nantinya akan menyusun rencana tenaga kerja mikro serta PMI Purna yang mendapatkan pemberdayaan pelatihan. Dirancang aksi diantaranya :

- a. Pelaksanaan pelatihan berbasis soft skill pada calon Wirausaha Baru (WUB) yang sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan kewirausahaan pada kegiatan Sinergitas Mitra Tala Preneur pada Manunggal Tuntung Pandang akan dilibatkan kembali pada pelatihan kewirausahaan yang melibatkan narasumber dari tingkat nasional pada pelaksanaan kegiatan Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.
- b. Dengan adanya kegiatan peningkatan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Melalui APBN yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan dapat membantu terlaksananya realisasi peningkatan penciptaannya Tenaga Kerja Mandiri (TKM) pada tahun 2022.

4) Eselon IV (Kepala UPT. BLK)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan I	Capaian		
1.	Melaksanakan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1 Jumlah Pencari Kerja yang Dilatih	288 Orang	500 orang	500 orang	100%	80,39%	2.500 orang

Capaian

Pelatihan berbasis kompetensi bagi pencari kerja pada tahun 2021 mencapai 94,73% dengan target 500 orang sedangkan sebelumnya tahun 2020 target 288 menurun karena adanya pengurangan anggaran, sedangkan pada tahun 2021 tercapai 100% dengan 26 Paket Kegiatan APBD sedangkan 18 paket dana APBN pelatihan dengan pada tahun 2020 capaian target 18 paket. Jadi adanya penurunan pelatihan di tahun 2021 di karenakan pengurangan anggaran/ refo-cusing pada APBN.

Permasalahan/ Kendala

Kegiatan yang ada pada Balai Latihan Kerja juga mengalami dampak Pandemi Covid-19 dimana pagu Anggaran kegiatan pelatihan tenaga kerja siap pakai tidak mengalami pengurangan dimana pada awal tahun 2021 sebesar Rp. 399.989.900,- dengan target 26 Paket pelatihan untuk dana APBD sedangkan Dana APBN Kegiatan PBK Rp. 2.186.640.000 yang kemudian di refocusing sebesar 80,58% menjadi Rp. 1.762.180.000,- . Dengan adanya pengurangan anggaran tersebut dari target 19 paket pelatihan terealisasi 18 paket pelatihan.

Rencana Aksi

Mengajukan kembali pagu anggaran pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan dan kesempatan kerja

5. Eselon III (Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jamsotek)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan ini	Capaian		
1.	Meningkatnya perlindungan lembaga ketenagakerjaan untuk harmonisasi hubungan industrial	1 Cakupan kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB)	100%	27,0%	40%	148%	35%	58,4%

Definisi Rumus

Meningkatnya perlindungan lembaga ketenagakerjaan untuk harmonisasi hubungan industrial sebagai kinerja utama dengan indikator cakupan kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama merupakan sasaran strategis dari Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang didapat dari jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama dibagi jumlah kasus yang difasilitasi dikali 100% :

$$\frac{\text{jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama}}{\text{jumlah kasus yang difasilitasi}} \times 100\% = \text{Realisasi}$$

Capaian dan Perbandingan

Pada tahun 2021 terdapat 5 kasus masuk dengan 2 kasus diselesaikan melalui Perjanjian Bersama atau capaian sebesar 40% sedangkan ditahun 2020 terdapat 9 ka-

masuk dengan 5 kasus diselesaikan melalui Perjanjian Bersama atau capaian sebesar 55,55%, berikut dapat dilihat melalui table :

**DATA TAHAPAN KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2020**

NO.	PARA PIHAK		TAHAPAN			KETERANGAN
	PELAPOR	TERLAPOR	BIPARTIT	TRIPARTIT (MEDIASI)	PHI	
1	Sdr. Bahri Sdr. Normansyah	PT. Patriot Intan Abadi		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama
2	Sdr. Joko Subandrio dkk	PT. Adidaya Alam Borneo PT. Surya Sakti Darma Kencana		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama
3	Sdr. Mustamin	PT. Pribumi Citra Megah Utama			V	Selesai dengan Anjuran Mediator
4	Sdr. Yoyok Rudianto	PT. Darma Henwa			V	Selesai dengan Anjuran Mediator
5	Sdr. Rusmadi dkk.	PT. Karya Wijaya Utama			V	Selesai dengan Anjuran Mediator
6	Sdr. Agus Rohendi dkk	PT. Gawi Makmur Kalimantan Kebun Tengah		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama
7	Sdr. Chepy Eko Wahyudi	PT. Karya Wijaya Utama		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama
8	Sdr. Fathorahman dkk	PT. Sinar Surya Jorong		V		Selesai dengan Anjuran Mediator
9	Sdr. H. Ismail, SE, dkk.	PD. Baratala Tuntung Pandang		V		Selesai dengan Perjanjian Bersama

**DATA TAHAPAN KASUS PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2021**

NO.	PARA PIHAK		TAHAPAN			KETERANGAN
	PELAPOR	TERLAPOR	BIPARTIT	TRIPARTIT (MEDIASI)	PHI	
1	Sdr. Muhammad Abror (Kuasa) Sdr. Bariyah (Yang dikuasakan)	PT. Fresh On Time Seafood		V		Dicabut
2	Sdr. Suharti Sdr. Yusuf Ramadhan (Pengacara)	CV. Bintang Mulia Bara Group			V	Putusan PHI
3	Sdr. Heni Setyowati Sdr. Hermanus Palapessy (Pengacara)	PT. Sukses Wijaya Adimakmur		V		Perjanjian Bersama
4	Sdr. Suhardi	PT. Sinar Nirwana Sari	V			Perjanjian Bersama
5	Sdr. Hendra Giri DPP Pelaut Borneo Bersatu (SP/SB)	PT. Trans Coal Pasific		V		Mediasi Ke-2

Permasalahan atau Kendala

Sebagai bidang yang memiliki 3 (tiga) seksi tetapi hanya didukung oleh 5 (lima) orang ASN dan 1 (satu) orang Non-ASN sehingga layanan yang diberikan dirasa kurang optimal namun tetap berusaha maksimal dengan keterbatasan yang ada.

Sedangkan dalam hal anggaran juga Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja diantara bidang yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut mendapatkan pagu anggaran yang paling sedikit,

maka kegiatan yang dilaksanakan pun menyesuaikan dengan kendala dan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Saran dan Solusi

Berdasarkan kendala yang telah diterangkan di atas dapat disimpulkan dan disarankan beberapa hal sebagai solusi agar capaian terhadap kinerja utama yang telah ditargetkan sesuai indikator yang ditetapkan ditahun – tahun yang akan datang menjadi lebih baik, yaitu sebagai berikut :

1. Harus membuka informasi kepada para pihak terkait akan pentingnya pencatatan kontrak kerja;
2. Harus memiliki alat yang berfungsi sebagai rekam jejak digital yang dikemas dalam bentuk register. Selain itu software ini juga berfungsi sebagai pengingat terhadap perusahaan ketika masa kontrak kerja akan berakhir;
3. Terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial pejabat fungsional mediator perlu mengikuti diklat mediator yang dilaksanakan di Kementerian Ketenagakerjaan;
4. Memaksimalkan fungsi aplikasi siManja untuk memberikan layanan ketenagakerjaan yang lebih baik;
5. Memaksimalkan fungsi aplikasi wajib lapor online yang saat ini belum semua perusahaan di Kabupaten Tanah Laut mendaftarkan perusahaannya di aplikasi ini.

Rencana Aksi Tahun 2022

Bahwa sesuai dengan saran dan solusi yang kami ajukan maka harapan kami kedepan pada tahun 2022 akan melaksanakan sebagai berikut :

1. Meminta kepada Badan Kepegawaian agar segera mengirimkan pejabat fungsional mediator untuk mengikuti diklat mediator di Kementerian Ketenagakerjaan;
2. Memanfaatkan dan mengolah data wajib lapor perusahaan di Kabupaten Tanah Laut;
3. Membuat sosialisasi ketenagakerjaan dengan nomenklatur terkait urgensi pencatatan PKWT yang dilaksanakan dan didanai penganggarnya melalui APBD tahun berjalan;

4. Memaksimalkan software Sistem Manajemen Norma Kerja (siManja) untuk mempermudah kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

1) Eselon IV (Kepala Seksi Persyaratan Kerja)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Memfasilitasi perlindungan hukum dan jamsostek	1 Jumlah Peraturan Perusahaan yg disahkan		8 Dokume	6 Dokumen	75%	48 Dokume	56,25%

Kinerja utama seksi Persyaratan Kerja adalah kepatuhan terhadap penerapan norma syarat – syarat kerja yang memiliki indikator jumlah perusahaan yang melakukan pencatatan PKWT dan Perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan yang sudah disahkan oleh Pejabat yang ditunjuk atau instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. Pada tahun 2021 terdapat 2516 (dua ribu lima ratus enam belas) tenaga kerja yang kontrak kerjanya tercatat.

Hal-hal yang berpengaruh dari tingkat kepatuhan terhadap pemenuhan norma syaker ini diantaranya durasi lama bekerja pekerja kontrak yang tidak terlalu lama sehingga Perusahaan enggan melakukan pencatatan kontrak. Selain daripada itu terdapat juga faktor lain yaitu berupa implikasi atau dampak terhadap tinggi rendahnya pengawasan di lapangan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Ketenagakerjaan di Provinsi terhadap para pelaku usaha di Kabupaten. Semakin tinggi ketidakpatuhan yang ditemukan oleh pengawas berbanding lurus dengan semakin tingginya pencatatan kontrak kerja dilaksanakan.

Dalam hal indikator jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan dan telah mensahkan PP tersebut di tahun 2021 terdapat 6 (enam) dokumen PP yang telah disahkan dari target sebanyak 8 (delapan) dokumen atau sebesar 75%.

Kewenangan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut berkurang sehubungan dengan terbitnya surat nomor : 566/204/Disnakertrans tanggal 1 Februari 2017 tentang penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan, sesuai Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga hal – hal yang berkaitan dengan penegakan hukum yang salah satunya misalnya adalah pengecekan terhadap pelaksanaan pencatatan kontrak kerja.

Capaian

Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 2516 (dua ribu lima ratus enam belas ribu) tenaga kerja yang tercatat kontraknya, sedangkan di tahun 2020 hanya 1918 (seribu sembilan ratus delapan belas) tenaga kerja yang tercatat kontrak kerjanya dalam hal ini terjadi peningkatan dari jumlah tenaga kerja dari tahun sebelumnya dan sebanyak 6 (enam) dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan atau tercapat sebesar 75%.

Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan seksi persyaratan kerja diantaranya masih kurangnya kesadaran akan administratif pencatatan kontrak kerja yang masih rendah dan karena masa berlaku berlakunya Peraturan Perusahaan paling lama 2 tahun maka Peraturan Perusahaan tidak setiap tahun disahkan, serta Perjanjian Kerja Bersama(PKB) tidak merupakan kewajiban suatu Perusahaan namun merupakan salah satu bentuk fasilitasi dari hasil perundingan antara pemberi kerja dan pekerja untuk menemukan kesepakatan terkait hal-hal yang lebih rinci dari Peraturan Perusahaan.

Rencana Aksi

Rencana aksi seksi persyaratan kerja tahun 2022 diantaranya :

1. Memasifkan kegiatan Pembinaan dan Penilaian Hubungan Industrial di Perusahaan.
2. Memaksimalkan software Sistem Manajemen Norma Kerja (siManja) untuk mempermudah kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.
3. Melaksanakan Himbauan dan Memanfaatkan serta mengolah Data Wajib Lapor Ketenagakerjaan bagi perusahaan, Badan Usaha, BUMD, UMKM, serta IKM yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Tanah Laut.
4. Memiliki alat yang berfungsi sebagai rekam jejak digital yang dikemas dalam bentuk register. Selain itu software ini juga berfungsi sebagai pengingat terhadap perusahaan ketika masa kontrak kerja akan berakhir.

2) Eselon IV (Kepala Seksi Pengupahan dan Jamsostek)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Memfasilitasi perlindungan hukum dan jamsostek	1 Jumlah peserta BPJS	21.084 Orang	16,000 orang	19.140 Orang	120%	17.000 orang	113%

Capaian

Fasilitasi Perlindungan Hukum dan Jamsostek, dengan indikator jumlah peserta BPJS dijelaskan di dalam tabel di atas bahwa Realisasi capaian tahun 2020 sebanyak 21.084 orang. Sementara pada tahun 2021 target kepesertaan BPJS sebesar 16.000 orang dan realisasi capaian kepesertaan sebesar 19.140 orang melebihi yang ditargetkan, atau sebesar 120%. Kenaikan ini dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Apresiasi yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal perlindungan tenaga kerja. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 62 tahun 2020 tentang Program Jaminan Sosial di Kabupaten Tanah Laut.
- 2) Pandemi *Covid-19* meningkatkan kesadaran baik dari pekerja maupun perusahaan untuk memberikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerjanya

Permasalahan

Untuk permasalahan yang dihadapi pada tahun 2021:

- 1) Kurang aktifnya pihak BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Tanah Laut dalam hal penyampaian pelaporan kepesertaan.
- 2) Belum terbentuknya Tim Percepatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- 3) Masih rendahnya kesadaran perusahaan untuk menyampaikan Surat Pernyataan Struktur dan Skala Upah pada perusahaan yang beraktivitas di Kabupaten Tanah Laut.

Rencana Aksi :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam hal penyampaian laporan bulanan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.
- 2) Seksi PJSTK berinisiasi untuk membentuk Tim Percepatan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Laut agar optimalisasi kepesertaan BPJS Tenaga kerja berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- 3) Memaksimalkan pembinaan tentang Kebijakan Pengupahan kepada perusahaan yang beraktivitas di Kabupaten Tanah Laut.

- 4) Optimalisasi Kinerja Dewan Pengupahan Kabupaten Tanah Laut Periode Tahun Anggaran 2021-2023.

3) Eselon IV (Kepala Seksi Hubungan Industrial)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan I	Capaian		
1.	Menyelenggaraan Hubungan Industrial yang Baik	1 Jumlah Kasus	9 kasus	9 kasus	5 Kasus	56%	48 kasus	52,08%

Capaian

Fasilitasi penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial merupakan kinerja utama dari seksi Hubungan Industrial dengan indikator tunggal yaitu jumlah kasus yang terfasilitasi prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang pada tahun 2021 menargetkan 9 kasus dan terealisasi sebanyak 5 kasus sedangkan pada tahun 2020 dengan target 9 kasus dan realisasi 9 kasus.

Terlihat adanya penurunan pada capaian penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial dimana tahun 2020 terealisasi 100% dari target 9 kasus dimana pada tahun 2021 juga menargetkan 9 kasus dan hanya terealisasi sebesar 56%, hal ini karena kondisi hubungan industrial di Kabupaten Tanah Laut dan perubahan aturan ketenagakerjaan setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Permasalahan atau Kendala

Kondisi hubungan industrial yang dimaksud di atas adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini sangat terpengaruh dengan adanya aduan atau laporan dari pihak pekerja atau perusahaan, sedangkan akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* tidak banyak aktivitas ketenagakerjaan yang dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan sedikit perselisihan yang terjadi. Begitu pula dampak dari perubahan aturan ketenagakerjaan setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pada tahun 2021 diterbitkan peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang mana merubah tata cara

dan perhitungan pesangon yang diberikan perusahaan kepada pekerja sehingga perselisihan yang sering terjadi akibat perbedaan menafsirkan pasal pada peraturan ketenagakerjaan sebelumnya dapat diminimalisir. Permasalahan lain pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut yaitu belum memiliki pejabat fungsional mediator yang telah melaksanakan diklat mediator sehingga masih memerlukan kerjasama dengan Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.

Saran dan Solusi

Berdasarkan kendala yang telah diterangkan di atas dapat disimpulkan dan disarankan beberapa hal sebagai solusi agar capaian terhadap kinerja utama yang telah ditargetkan sesuai indikator yang ditetapkan ditahun – tahun yang akan datang menjadi lebih baik, yaitu sebagai berikut :

1. Terkait penyelesaian perselisihan hubungan industrial perlu mengirimkan pejabat fungsional mediator untuk mengikuti diklat mediator di Kementerian Ketenagakerjaan;
2. Memaksimalkan fungsi aplikasi wajib lapor online yang saat ini belum semua perusahaan di Kabupaten Tanah Laut mendaftarkan perusahaannya di aplikasi ini;
3. Untuk mencegah timbulnya perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan maka perlu pemetaan kondisi hubungan industrial di Kabupaten Tanah Laut;
4. Membentuk dan memaksimalkan peran Lembaga Kerjasama Tripartit di Kabupaten Tanah Laut untuk meningkatkan pemahaman perusahaan dan pekerja terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;
5. Memaksimalkan fungsi aplikasi siManja untuk memberikan layanan ketenagakerjaan yang lebih baik.

Rencana Aksi Tahun 2022

Bahwa sesuai dengan saran dan solusi yang kami ajukan maka harapan kami kedepan pada tahun 2022 akan melaksanakan sebagai berikut :

1. Meminta kepada Badan Kepegawaian agar segera mengirimkan pejabat fungsional mediator untuk mengikuti diklat mediator di Kementerian Ketenagakerjaan;

2. Memanfaatkan dan mengolah data wajib lapor perusahaan di Kabupaten Tanah Laut;
3. Meningkatkan kegiatan monitoring dalam rangka deteksi dini permasalahan hubungan industrial dan mewujudkan peta kondisi hubungan industrial di Kabupaten Tanah Laut;
4. Menerbitkan Surat Keputusan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022;
5. Memaksimalkan software Sistem Manajemen Norma Kerja (siManja) untuk mempermudah kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut.

6. Eselon III (Kepala Bidang Perindustrian)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan I	Capaian		
1.	Meningkatnya teknologi, inovasi dan kreativitas pelaku industri	1. Persentase IKM yang mengembangkan inovasi dan kreativitas industri	40%	100%	79,23%	79%	100%	80%
2.	Menguatnya struktur industri	1. Cakupan fasilitasi tahapan pengembangan Kawasan Peruntukkan	42%	50%	83%	166,00%	65%	51%

Definisi rumus

1. Persentase IKM yang mengembangkan inovasi dan kreativitas industri dibagi jumlah IKM Unggulan
2. Tahapan Kawasan Industri yang telah dilaksanakan dibagi 6 tahapan Kawasan Industri

Capaian

1. Persentase IKM yang mengembangkan inovasi dan kreativitas industri dibagi jumlah IKM Unggulan= $(103/130) \times 100\% = 79,23\%$
2. Tahapan Kawasan Industri yang telah dilaksanakan dibagi 6 tahapan Kawasan Industri = $(5/6) \times 100\% = 83\%$

Permasalahan

1. Kurangnya anggaran dan pelatihan dalam hal pengembangan inovasi IKM

Rencana Aksi

1. Akan melaksanakan pelatihan yang melibatkan para IKM logam, posyantek dan TTG
2. Akan bersinergi dengan investor lokal Tanah Laut sebagai Badan Pengelola Kawasan Industri

1) Eselon IV (Kepala Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Mengoptimalkan Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Industri	1 Jumlah pelatihan dan Pemagangan IKM	135 IKM	84 IKM	104 IKM	100%	1580 IKM	24,0%
		2 Jumlah IKM yang meningkatkan kreatifitas desain produknya	-	20 IKM	28 IKM	140%	150 IKM	18,7%
		3 Jumlah IKM yang menggunakan inovasi teknologi dalam kegiatan produksi	30 IKM	10 IKM	24 IKM	240%	70 IKM	77,1%

Capaian

Pada tahun 2021, sebanyak 104 IKM dilatih melalui 5 Kegiatan Pelatihan dan 1 Kegiatan Pemagangan antara lain:

- a. Pelatihan Pengembangan Motif Sasirangan (Saringkel dan Bataringan) yang diikuti oleh 20 orang IKM Sasirangan se- Kabupaten Tanah Laut
- b. Pelatihan Teknis Pengembangan Motif Anyaman Purun yang diikuti oleh 20 orang IKM Anyaman Purun se – Kecamatan Bati - Bati
- c. Pelatihan Pembuatan Produk Fashion Berbahan Kulit Jagung yang diikuti oleh 20 orang IKM fashion se- Kecamatan Takisung
- d. Pelatihan Pengolahan Hasil Laut yang diikuti oleh 20 orang warga Desa Handil Maluka, Kecamatan Bumi Makmur.
- e. Pelatihan Penumbuhan Wirausaha Baru Sandang Berbasis Pondok Pesantren yang diikuti oleh 20 orang peserta yang berasal dari kalangan ustadz/ah, santriwan/wati serta wali santri di Ponpes Sirajul Huda Kabupaten Tanah Laut

- f. Magang Pengrajin Kulit di Balai Besar Kulit Karet dan Plastik Yogyakarta yang diikuti oleh 4 orang IKM Pengrajin Kulit dan Fashion di Kabupaten Tanah Laut.

Sehingga persentase IKM yang mengikuti pelatihan dan pemagangan sebesar
= $(104/84) \times 100\% = 124\%$

Adapun dalam rangka meningkatkan kreatifitas desain produk telah dilaksanakan Lomba Kreasi Desain dan Inovasi yang diikuti oleh 28 peserta lomba antara lain :

- a. Lomba Kreasi Desain Inovasi Motif Sasirangan yang diikuti oleh 17 IKM Sasirangan se- Kabupaten Tanah Laut
- b. Lomba Kreasi Desain Inovasi Produk Berbahan Alam dan Limbah yang diikuti oleh 11 IKM Pangan dan Kerajinan di Kabupaten Tanah Laut.

Sehingga persentase IKM yang meningkatkan kreatifitas desain produknya adalah sebesar = $(28/20) \times 100\% = 140\%$

Sedangkan dalam rangka mendorong inovasi pemanfaatan teknologi pada kegiatan produksi, telah dilaksanakan melalui Kegiatan Lomba Kreasi Desain Inovasi Mesin TTG Penunjang Produksi IKM dan kerjasama fasilitasi pendampingan penerapan teknologi pada IKM melalui Program DAPATI (Dana Kemitraan Peningkatan Teknologi Industri) 2021 serta APBD Provinsi Kalimantan Selatan melalui beberapa kegiatan antara lain :

- a. Lomba Kreasi Desain Inovasi Mesin TTG Penunjang Produksi IKM yang diikuti oleh 10 IKM Perbengkelan dan Permesinan di Kabupaten Tanah Laut
- b. Pendampingan Teknologi Pembuatan Hydrotiller (traktor apung) bagi 4 IKM Perbengkelan dan Permesinan di Kabupaten Tanah Laut
- c. Fasilitasi Penerapan Teknologi Industri Batik Sasirangan bagi 9 IKM Sasirangan Kabupaten Tanah Laut di Baristand Banjarbaru.
- d. Fasilitasi Penerapan Teknologi Industri Pengolahan VCO bagi anggota IKM BY-HAF di Desa Tirtajaya, Kecamatan Bajuin.

Sehingga persentase IKM yang menerapkan inovasi teknologi pada kegiatan produksinya sebesar = $(24/10) \times 100\% = 240\%$

Sebagai perbandingan pada tahun 2020, sebanyak 135 IKM dilatih melalui 7 Kegiatan Pelatihan antara lain:

- a. Pelatihan Sasirangan di Desa Bumi Asih Kecamatan Panyipatan
- b. Pelatihan Sasirangan di Desa Batu Tungku Kecamatan Panyipatan
- c. Pelatihan Sasirangan di Desa Asam – Asam Kecamatan Jorong
- d. Pelatihan Pembuatan Produk Mebeulair dari Aluminium di Desa Sukaramah Kecamatan Panyipatan
- e. Pelatihan Pengolahan Daging Sapi dengan peserta yang berasal dari KWT. Sekar Kemuning Desa Sumber Mulya Kecamatan Pelaihari dan KWT. Bina Keluarga Desa Sungai Pinang Kecamatan Tambang Ulang
- f. Pelatihan Pengembangan Motif Sasirangan Kombinasi Ecoprint dengan peserta yang berasal dari IKM Sasirangan se – Kabupaten Tanah Laut.
- g. Pelatihan Penyamakan Kulit Sapi dengan peserta dari unsur Posyantek, Peter-nak Sapi dan IKM Fashion di Kabupaten Tanah Laut.

Permasalahan

Permasalahan yang dialami pada tahun 2021 adalah tidak sebandingnya ketersediaan anggaran dana karena adanya pengurangan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada renja awal RPJMD yang dialokasikan untuk penanganan pandemi. Hal ini mengakibatkan kemungkinan pencapaian target hingga akhir renstra yaitu tumbuhnya 1.580 IKM baru dan stimulasi peningkatan kreatifitas desain produk di kalangan IKM sebanyak 150 IKM akan sulit untuk dicapai.

Rencana Aksi

Pada tahun 2022 mendatang, yang akan dilaksanakan dalam rangka penumbuhan industri kecil dan menengah di Kabupaten Tanah Laut dengan anggaran yang sangat minimalis adalah menganggarkan kegiatan pelatihan sebanyak 2 kali. Dan dalam rangka mengembangkan inovasi, kreatifitas desain dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktifitas IKM akan dilaksanakan 1 kali kegiatan temu konsultasi teknologi antara IKM di Kabupaten Tanah Laut dan pelaku Teknologi Tepat Guna yang berasal dari kalangan IKM Perbengkelan dan Permesinan. Adapun sebagai upaya untuk terus menumbuhkan wirausaha baru di bidang industri, akan ditempuh langkah kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dana Dekonsentrasi dan Program DAPATI Kementerian Perindustrian RI serta APBD Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembinaan serta fasilitasi pendampingan

teknologi yang bermanfaat untuk penumbuhan dan pengembangan IKM Kabupaten Tanah Laut.

2) Eselon IV (Kepala Seksi Sarana Prasarana Industri)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir Renstra
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Mengoptimalkan Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Industri	1 Jumlah Kebijakan Industri	-	1 Laporan	1 laporan	100%	2 laporan	50%
		2 Jumlah Klaster Industri	2 Klaster industri	2 Klaster industri	2 Klaster industri	100%	2 Klaster industri	100%
2.	Memfasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri lingkup kabupaten	1 Jumlah IKM dan Industri B	3378 IKM	3300 IKM & 50 Industri	3458 IKM & 50 Industri Besar	100%	13.500 IKM dan 60	26% dan 83,3%

Capaian

1. Pada Tahun 2021 jumlah kebijakan industr yang diikeluarkan ada 1 buah yaitu mengenai Perwilayahan Industri yaitu lokasi-lokasi Kawasan Peruntukan Industri yang ada di Tanah Laut.
2. Pada Tahun 2021 jumlah klaster / Sentra Industri masih sama yaitu 2 buah meliputi Sentra IKM Sasirangan di Desa Martadah Baru dan Sentra Hasil Laut di Desa Tanjung Dewa.
3. Data Industri Kecil Menengah (IKM) pada Tahun 2020 berjumlah 3378 IKM dan di Tahun 2021 menjadi 3458 Industri IKM

Permasalahan

Di Tahun 2020 Kurang maksimalnya petugas Pendataan Industri, sehingga walaupun pada tahun 2021 ini ada Aplikasi Gayatri, namun hasil yang didapat masih belum maksimal.

Rencana Aksi

Menggiatkan pendataan dengan memakai sistem pendataan berbasis IT

3) Eselon IV (Kepala Seksi Pemberdayaan Industri)

No.	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi Capaian Tahun Lalu	Target dan Capaian			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2021 Terhadap Target Akhir
				Target	Realisasi s.d Triwulan Ini	Capaian		
1.	Mengoptimalkan Penyusunan dan Evaluasi Pembangunan Industri	1 Jumlah pameran	4 Kali	3 kali	4 kali	133%	32 kali	13%
		2 Jumlah Mobil Toko		1 Unit	1 unit	100%	1 Unit	100%
		3 Jumlah Rumah Kemasan		1 Unit	1 unit	100%	1 Unit	100%
		2 Jumlah Laporan	-	2 Laporan	1 laporan	50%	6 Laporan	16.67%

Capaian

Pada tahun 2021 sebanyak 4 kali pameran telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

- Pameran Apkasi Expo di Jakarta
- Pameran Pasar Terapung di Banjarmasin
- Pameran Ajang UMKM di Banjarbaru
- Pameran Mini Expo di Balairung Pelaihari

Sedangkan pada tahun 2020, sebanyak 4 kali pameran telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

- Pameran Dalam Rangka MoU dengan Kanwil Kemenkumham di Hotel Golden Tulip
- Pameran Dalam Rangka memperingati Hari Kartini di Balairung
- Pameran Dalam Rangka lomba Panahan se Indonesia di RTH
- Pameran dalam Rangka Milad Muhammadiyah di Balairung

Permasalahan

Permasalahan yang dialami pada tahun 2021 adalah adanya pandemi Covid-19 sehingga tidak banyak even yang bisa diikuti.

Rencana aksi

Rencana aksi pada tahun 2022 akan memaksimalkan pemakaian Mobil Expo dan Rumah Kemasan

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.

1) Anggaran dan Realisasi APBD 2021

Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2021 :

Jumlah belanja untuk tahun anggaran 2021 setelah perubahan ditetapkan sebesar **Rp. 15.394.743.445,-** jumlah ini dipergunakan untuk membiayai program-program kegiatan dan Sub Kegiatan, yang terdiri atas 8 (delapan) program yang terdiri atas 25 (dua puluh lima) kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) Sub Kegiatan dengan realisasi sebesar **Rp. 11.327.431.259,98-** atau tercapai **73,57 %**.

Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2021 berdasarkan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada Tabel berikut :

A. DINAS

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	
				Keuangan	%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		9.876.109.723	6.556.311.171	66,39
	1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	74.934.258	72.687.386	97,00
		1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	74.934.258	72.687.386	97,00
	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.485.160	39.465.400	99,95
		1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	39.485.160	39.465.400	99,95
		2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	310.716.900	290.392.170	93,46
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.319.400	12.277.900	99,66
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.303.700	35.678.595	84,34
		3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.949.800	9.388.500	85,74
		4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.965.600	2.160.000	31,01
		5 Fasilitas Kunjungan Tamu	23.183.400	22.008.400	94,93

	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	214.995.000	208.878.775	97,16
	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	141.751.720	134.581.363	94,94
	1	Pengadaan Mebel	45.148.620	44.000.000	97,46
	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	96.603.100	90.581.363	93,77
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.151.668	207.666.823	82,03
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.433.076	25.637.701	90,17
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.895.916	145.535.772	77,46
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.445.000	5.280.000	96,97
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.377.676	31.213.350	99,48
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.640.431	285.993.197	96,74
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.673.376	106.626.300	97,22
	2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	143.281.115	140.936.237	98,36
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.445.000	19.600.000	87,32
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.240.940	18.830.660	93,03
	7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.755.537	43.623.950	60,80
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.999.700	6.793.700	67,94
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.999.676	31.830.250	90,94
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.756.161	5.000.000	18,69
	8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.688.674.049	5.481.900.882	63,09
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.632.506.573	5.430.499.632	62,91
	2	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	56.167.476	51.401.250	91,51
B	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		3.176.861.614	2.873.719.058	90,46
	1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.176.861.614	2.873.719.058	90,46
	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.915.136.209	1.851.015.039	96,65

	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	388.670.546	354.805.804	91,29
	3	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	8.484.800	7.506.000	88,46
	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	76.000.000	32.731.300	43,07
	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	788.570.059	627.660.915	79,59
C	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		193.999.586	149.254.546	76,94
	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	94.999.690	68.183.300	71,77
	1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	32.499.830	17.225.900	53,00
	2	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	62.499.860	50.957.400	81,53
	2	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	98.999.896	81.071.246	81,89
	1	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	98.999.896	81.071.246	81,89
D	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		49.999.700	40.398.200	80,80
	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	49.999.700	40.398.200	80,80
	1	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	49.999.700	40.398.200	80,80
E	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		494.203.352	379.172.816	76,72
	1	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	49.999.900	39.589.900	79,18
	1	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	49.999.900	39.589.900	79,18
	2	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-	
	1	Job Fair/Bursa Kerja	-	-	
	3	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	441.166.652	337.487.316	76,50
	1	Pelayanan antar Kerja	197.999.376	131.652.566	66,49
	2	Perluasan Kesempatan Kerja	193.167.576	166.183.850	86,03
	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	49.999.700	39.650.900	79,30

	4	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.036.800	2.095.600	69,01
	1	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	3.036.800	2.095.600	69,01
F	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		741.370.376	596.724.110	80,49
	1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	495.842.700	459.283.960	92,63
	1	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	95.852.800	78.695.900	82,10
	2	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	399.989.900	380.588.060	95,15
	2	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	150.430.000	94.569.700	62,87
	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	150.430.000	94.569.700	62,87
	3	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	95.097.676	42.870.450	45,08
	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	95.097.676	42.870.450	45,08
G	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		124.999.750	113.741.600	90,99
	1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	124.999.750	113.741.600	90,99
	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	124.999.750	113.741.600	90,99
Jumlah			14.657.544.101	10.709.321.501	73,06

UPT. BLK

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	
				Keuangan	%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		737.199.344	676.588.459	91,8
	1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.966.676	23.797.611	99,3
	1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	23.966.676	23.797.611	99,3
	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	122.872.650	112.673.300	91,7
	1	Penyediaan Komponen Instalasi	6.516.000	5.785.500	88,8

		Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.858.850	9.576.500	74,5
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.000.000	7.428.200	92,9
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.132.800	1.080.000	95,3
	5	Fasilitas Kunjungan Tamu	6.200.000	3.690.000	59,5
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.165.000	85.113.100	96,5
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		124.086.978	103.794.845	83,6
	1	Pengadaan Mebel	101.786.630	86.009.000	84,5
	2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.300.348	17.785.845	79,8
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		247.177.740	230.958.867	93,4
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.994.476	23.745.611	99
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.199.390	42.284.570	41
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.994.922	69.314.224	96,3
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	47.988.952	47.807.231	99,6
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		219.095.300	205.363.836	93,7
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63.567.500	62.090.336	97,7
	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.600.000	14.450.000	70,1
	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	124.979.800	119.646.000	84,5
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.948.000	9.177.500	92,3
Jumlah			737.199.344	676.588.459	91,8

2) Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

i. Sasaran 1 (Meningkatnya daya saing tenaga kerja)

Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja ditandai dengan Indikator “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)”. Tingkat partisipasi angkatan kerja (*labor force participation rate*) adalah proporsi angkatan kerja terhadap populasi usia kerja. Angkatan kerja terdiri dari individu yang saat ini sedang bekerja dan mereka yang belum bekerja namun secara aktif mencari pekerjaan. Sementara

itu, definisi populasi usia kerja mencakup individu yang berusia antara ≤ 15 dan 64 tahun.

Realisasi Anggaran

Pada tahun 2021 untuk mendukung capaian di atas dilaksanakan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan capaian meningkatnya kompetensi tenaga kerja sebesar 38.65% dari target 65% yang didukung dari dana APBD sebesar Rp. 741.370.376,- dengan realisasi sebesar Rp. 596.724.110,- atau 80.49%

Sebagaimana yang dapat disimak pada tabel di bawah ini:

NO.	SUB KEGIATAN	OUTPUT DALAM DPA	TARGET KINERJA	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI			
					FISIK	%	KEUANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pencari Kerja yang dilatih	500 orang	399.989.900,- -	416 orang	83.2	380.588.060,-	95.15
2.	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah pencari kerja yang di- ma- gangkan	10 orang	95.852.800,-	10 orang	100	78.695.900	82.10
3.	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah orang Jumlah Dokumen	70 Orang 1 Dokumen	150.430.000	80 Orang	114.2 9	94.569.700	62.87
4.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Orang/Pelaku Perusahaan Kecil, Mikro dan Menengah	20 Orang	95.097.676,-	18 orang	90	42.870.450,-	45.08

ii. Sasaran 2 (Meningkatnya Kesempatan Kerja)

Salah satu Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian adalah Tingkat Kesempatan Kerja. Peningkatan kesempatan kerja di lihat dari persentase sebesar 96,48% dari target 4%, di dapat dari jumlah penduduk bekerja sebesar 178.543 orang dan jumlah angkatan kerja sebesar 185.049 orang dengan rumus sebagai berikut :

$$TKK = \frac{a}{b} \times 100\%$$

Dimana:

a = Jumlah Penduduk Bekerja

b = Jumlah Angkatan Kerja

(Sumber data oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut)

Untuk mendukung capaian sasaran ini dilaksanakan beberapa program dan kegiatan yang disajikan dengan ulasan singkat sebagai berikut:

Realisasi Anggaran

Pada tahun 2021 Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja merealisasikan anggaran sebesar Rp. **1.016.295.126,-** atau 79,05 % yang mana pada kegiatan fisiknya telah dilaksanakan dengan capaian sebesar 228,75%. Sebagaimana yang dapat disimak pada tabel dibawah ini :

NO.	KEGIATAN	OUTPUT DA- LAM DPA	TARGET KINERJA	ANG- GARAN 2021 (Rp)	REALISASI			
					FISIK	%	KEU- ANGAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Antarkerja di Daerah Kabu- paten/ Kota dan kegiatan Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Dae- rah Kabupaten/ Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi pelayanan antarkerja di Kab. Tanah Laut	180 Orang 100 orang 4 kali	251.036.19 6	220 orang 100 orang 4 kali	122,22 100 100	173.399.066	69,07
2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK), Pelin- dungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Ka- bupaten/Kota dan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabu- paten/Kota	Terciptanya peningkatan wira usaha baru	10 Orang 0 dok 70 org 20 org	293.167.17 6	10 org 0 dok 80 org 18 org	100 0 114,29 90	246.171.950	83,97

iii. Sasaran 3 (Meningkatnya Harmonisasi Hubungan Industrial)

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut memiliki kinerja utama untuk menciptakan hubungan industrial harmonis dan kondusif dengan persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial sebesar 44 % dari 9 (sembilan) kasus pada Tahun 2020 menjadi 5 (lima) kasus di tahun 2021.

Realisasi Anggaran

Pada tahun 2020 Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja merealisasikan anggaran sebesar Rp. **149,254,546,-** atau 76,94 % dari pagu sebesar Rp. **193,999,586,-** yang mana pada kegiatan fisiknya telah dilaksanakan secara maksimal atau 83,66%. Sebagaimana yang dapat disimak pada tabel dibawah ini :

NO.	SUB-KEGIATAN	OUTPUT DALAM DPA	TARGET KINERJA	ANG-GARAN 2021 (Rp)	REALISASI			
					FISIK	%	KEU-AN-GAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Orang	16.000 orang	32.49 9.830	19.14 0 orang	12 0	17.22 5.900	53
2	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan	8 doku- men	62.49 9.860	6 doku- men	75	50.95 7.400	81,5 3
3	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus	9 kasus	98.99 9.896	5 ka- sus	56	81.07 1.246	81,8 9

iv. Sasaran 4 Pada Perjanjian Kerja (Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri)

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut memiliki kinerja utama pada Kontribusi pada Sektor Industri. Dari data BPS terlihat adanya kenaikan kontribusi di sektor Perindustrian. Kenaikan kinerja sektor industri ditandai dengan naiknya Persentase Peranan Industri pengolahan, dimana share PDRB tahun 2020 sebanyak 12,29, naik 0,9 poin menjadi 13,39 di Tahun 2021. Hal ini terjadi dikarenakan mulai stabilnya harga komoditas CPO di Dunia. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa sub kategori yang mendominasi kinerja industri di tanah laut adalah industri makanan dan minuman. Produksi industri makanan dan minuman rata-rata mencapai dari 60 persen dari total produksi industri pengolahan secara keseluruhan di Tanah Laut. Komoditas utama dari Industri Makanan minuman di tanah laut adalah Crude Palm Oil (CPO). Oleh karena itu, kinerja industri makanan dan minuman tanah laut tidak terlepas dari pengaruh dinamika perekonomian global. Di Tanah Laut Kinerja Industri CPO ini di dukung oleh Kinerja Subkategori perkebunan komoditas kelapa sawit yang terkonsentrasi di beberapa wilayah sentra produksi utama (Kecamatan Pelaihari, Jorong dan Kintap).

Program dan Kegiatan

Pada Bidang Perindustrian, ada 2 program dan 6 sub kegiatan antara lain sebagai berikut :

A.1 Program Pembangunan Sumber Daya Industri yang diampu oleh Seksi Pembangunan Sumberdaya Industri, dimana pada seksi ini terdiri dari 1 Sub Kegiatan, seperti tergambar pada tabel dibawah ini :

No.	Nama Sub Kegiatan	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Output dalam DPA	Target Kinerja	Jumlah Pagu	Realisasi	Fisik	Keu
1.	Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan	Persentase Kontribusi	Jumlah IKM yang menggunakan inovasi teknologi da-	10 IKM	Rp. 388.670.546,-	Rp. 354.805.804,-	240 %	91,29 %

	Pem- angunan Sumber Daya In- dustri	Sektor Indus- tri	lam kegiatan produksi					
			Jumlah IKM yang mengiku- ti pelatihan dan pemagan- gan bagi pelaku IKM Pangan dan Industri Kreatif	84 IKM			100 %	
			Jumlah IKM yang mening- katkan kreatifi- tas desain produknya	20 IKM			140 %	

A.2 Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri yang diampu oleh Seksi Sarana Prasarana Industri, dimana pada seksi ini terdiri dari 2 kegiatan, seperti tergambar pada tabel dibawah ini :

No.	Nama Sub Kegiatan	Kinerja Utama/ Sasaran Strat- egis	Output da- lam DPA	Target Kinerja	Jumlah Pagu	Realisasi	Fisik	Keu
	Fasilitasi Pengump- ulan, Pengolah- an dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupate	Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Jumlah IKM Jumlah In- dustri	3378 IKM 50 IB	Rp. 124.999.7 50	113.741.6 00	100 %	68%

	n/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)							
sub	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Jumlah Laporan	1 laporan	76.000.000	32.731.300		52%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Jumlah Klaster Industri Jumlah IKM penerima Hibah	2 klaster 9 IKM	788571809	627.660.915	100 %	66%

A.3 Program Pemberdayaan Industri Unggulan Daerah, dimana pada seksi ini terdiri dari 2 kegiatan, seperti tergambar pada tabel dibawah ini :

No.	Nama Kegiatan	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Output dalam DPA	Target Kinerja	Jumlah Pa- gu	Re- alisa si	Fisi k	Keu
Sub	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Persen- tase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB		Jumlah laporan 2 laporan	8484800	458 1.00 0		
sub	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Persen- tase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB		Jumlah Pameran 3 kali Rumah Kemasan 1 unit Moko 1 unit	191513620 9	181 180 754 2		

v. Sasaran 5 Pada Perjanjian Kerja (Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat)

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan , Disnakerind dalam pelayanan public dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.Salah satu upaya guna meningkatkann kualitas pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 2009 tentang Program Pembangunan Nasional perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

sebagai tolak ukur untuk meningkatkan tingkat kualitas Pelayanan Publik. Survey kepuasan Masyarakat bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari tingkat kinerja Disnakerind, mengetahui harapan dan kebutuhan secara kuantitatif dan kualitatif pendapat masyarakat dalam memperoleh Pelayanan Disnakerind, dan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan pada Disnakerind.

Berdasarkan hasil survey Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari 9 Unsur Pelayanan pada Disnakerind tahun 2020 Disnakerind mendapatkan Nilai 81,59 dengan kategori BAIK berada pada nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat (76,61 – 88,30). Pada tahun 2021 Disnakerind mendapatkan Nilai 87,72 dengan kategori BAIK berada pada nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat (76,61 – 88,30).

Salah satu upaya sasaran Perjanjian Kerja sasaran pada Perjanjian Kinerja dengan meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi Disnakerind Tahun 2021, yang berarti meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat. Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap system penyelenggaraan Pemerintahan terutama menyangkut aspek –aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur untuk menciptakan good governance menuju clean governance.

Penilaian Reformasi Birokrasi pada tahun 2021 masih dalam tahapan penilaian namun pada Tahun 2020 Disnakerind memperoleh nilai 34, 70 dengan Kategori **Sangat Istimewa** . Meningkatnya Nilai RB dari Tahun 2019 kategori cukup baik menjadi sangat Istimewa pada Tahun 2020 salah satunya didukung oleh meningkatnya Pelayanan terhadap masyarakat (Pelayanan Publik). Dan Sasaran ini juga dapat dilihat pada pencapaian nilai Sakip Disnakerind, untuk tahun 2021 masih dalam tahapan penilaian/ evaluasi sedangkan untuk nilai Sakip tahun 2020 memperoleh nilai 76,16 dengan kategori BB (Sangat Baik), Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang handal.

Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan dapat dilihat secara lengkap pada table berikut :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Anggaran	Realisasi	
				Keuangan	%
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		9.876.109.723	6.556.311.171	66,39
	1	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	74.934.258	72.687.386	97,00
		1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	74.934.258	72.687.386	97,00
	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	39.485.160	39.465.400	99,95
		1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	39.485.160	39.465.400	99,95
		2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	
	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	310.716.900	290.392.170	93,46
		1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.319.400	12.277.900	99,66
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42.303.700	35.678.595	84,34
		3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.949.800	9.388.500	85,74
		4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.965.600	2.160.000	31,01
		5 Fasilitas Kunjungan Tamu	23.183.400	22.008.400	94,93
		6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	214.995.000	208.878.775	97,16
	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	141.751.720	134.581.363	94,94
		1 Pengadaan Mebel	45.148.620	44.000.000	97,46
		2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	96.603.100	90.581.363	93,77
	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.151.668	207.666.823	82,03
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.433.076	25.637.701	90,17
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	187.895.916	145.535.772	77,46
		3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.445.000	5.280.000	96,97
		4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.377.676	31.213.350	99,48
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.640.431	285.993.197	96,74
		1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.673.376	106.626.300	97,22
		2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan			98,36

		Bangunan Lainnya	143.281.115	140.936.237	
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.445.000	19.600.000	87,32
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.240.940	18.830.660	93,03
7	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		71.755.537	43.623.950	60,80
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.999.700	6.793.700	67,94
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.999.676	31.830.250	90,94
	3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.756.161	5.000.000	18,69
8	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		8.688.674.049	5.481.900.882	63,09
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.632.506.573	5.430.499.632	62,91
	2	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	56.167.476	51.401.250	91,51
Jumlah			9.876.109.723	6.556.311.171	66,39

3) Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan 2021

- Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

- BELANJA TIDAK LANGSUNG

Realisasi anggaran belanja tidak langsung tahun 2020 :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Gaji dan tunjangan	4.223.871.255	2.598.065.086	61,51
2.	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	2.989.425.759	2.373.055.960	79,38

- BELANJA LANGSUNG

Jumlah belanja langsung untuk tahun anggaran 2020 setelah perubahan ditetapkan sebesar **Rp. 3.568.952.271,-** jumlah ini dipergunakan un-

tuk membiayai program-program dan kegiatan, yang terdiri atas 14 (empat belas) program yang terdiri atas 38 (tiga puluh delapan) kegiatan dengan realisasi sebesar **Rp. 2.979.683.731,-** atau tercapai 83,48 %.

Ringkasan Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2020 berdasarkan Program dan Kegiatan dapat dilihat pada Tabel berikut :

A. DINAS

No	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.093.274.797	995.884.943	91,09
1	Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran	260.441.680	223.506.761	85,82
2	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi, dan koordinasi	421.695.261	376.403.567	89,26
3	Penyediaan jasa penunjang Kinerja SKPD	411.137.856	395.974.615	96,31
2	Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia	517.155.411	483.573.844	93,51
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	198.353.925	189.546.000	95,56
5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	110.825.000	88.226.303	79,61
6	Pembangunan Gedung Kantor	44.940.000	43.998.402	97,90
7	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	156.636.486	155.403.139	99,21
8	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur	6.400.000	6.400.000	100
9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	0	0	-
3	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	20.998.660	19.213.800	91,50
10	Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD	6.999.600	6.771.800	96,75

11	Penyusunan laporan keuangan	6.999.360	6.764.200	96,64
12	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja	6.999.700	5.677.800	81,11
4	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	365.378.550	161.485.450	44,20
13	Pelatihan Tenaga Kerja Siap Pakai	239.975.250	76.989.350	32,08
14	Peningkatan Produktivitas kerja dan peningkatan kapasitas lembaga pelatihan kerja	29.152.560	12.885.400	44,20
15	Pengembangan Sistem Pelatihan Kerja	96.250.740	71.610.700	74,40
5	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	130.827.410	92.890.280	71
16	Pelayanan ketenagakerjaan, penyusunan database tenaga kerja dan penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	81.633.450	62.253.080	76,26
17	Fasilitasi perluasan kesempatan kerja	49.193.960	30.637.200	62,28
6	Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Harmonisasi Hubungan Industrial	111.373.060	108.055.000	97,02
18	Fasilitasi Pelayanan Persyaratan Tenaga Kerja	34.944.000	34.688.000	99,27
19	Fasilitasi Pelayanan Sistem Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga kerja	19.520.480	18.814.000	96,38
20	Fasilitasi dan Pelayanan Kelembagaan serta Penyelesaian Penelitian Hubungan Industrial	56.908.580	54.553.000	95,86
7	Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD	39.939.799	20.000.000	50,08
21	Pelaksanaan kegiatan Pameran Pembangunan	19.939.799	0	0
22	Pembuatan dan pemeliharaan sistem informasi SKPD	20.000.000	20.000.000	100

8	Program Pemberdayaan Industri Unggulan Daerah	84.895.900	67.876.780	79,95
23	Peningkatan kerjasama ,Promosi dan investasi Industri	84.895.900	67.876.780	79,95
9	Program Pembangunan Sumberdaya Industri	381.202.600	347.116.533	91,06
24	Pembinaan Industri Kecil dan Menengah terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Industri	320.468.000	299.219.033	93,37
25	Pengembangan Sistem Produksi, Inovasi dan Teknologi Industri	60.734.600	47.897.500	78,86
26	Pengembangan Kreativitas, Desain dan Jasa Industri	0	0	-
10	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri	251.759.200	194.478.400	77,25
27	Penyediaan sarana dan prasarana klaster industri	106.953.800	66.495.000	62,17
28	Pengembangan Sistem Informasi Data dan Standarisasi Industri	144.805.400	127.983.400	88,38
JUMLAH		2.996.805.387	2.490.575.030	83,11

B. UPT. BLK

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	REALISASI	
			Keuangan (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	365,477,716	271,711,215	74.34%
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	129,549,732	54,956,076	42.42%
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	11,175,300	7,967,050	71.29%
3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	3,600,000	130,000	3.61%

4	Penyediaan alat tulis kantor	8,983,600	6,629,000	73.79%
5	Penyediaan barang cetak dan penggantian	1,349,700	1,175,100	87.06%
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,696,600	2,241,000	83.10%
7	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	2,250,000	2,250,000	100.00 %
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1,800,000	1,680,000	93.33%
9	Penyediaan makanan dan minuman	2,250,000	270,000	12.00%
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	70,000,000	65,534,850	93.62%
11	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	131,822,784	128,878,139	97.77%
2	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1,073,571,910	463,494,700	43.17%
1	Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja	30,600,000	27,000,000	88.24%
2	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	45,000,000	45,000,000	100.00 %
3	Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana BLK	647,971,910	167,141,000	25.79%
4	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	350,000,000	224,353,700	64.10%
JUMLAH		1,439,049,626	735,205,915	51.09%

- Untuk Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2021 dapat dilihat pada point 1 di atas. Data tidak dapat dibandingkan per program dan kegiatan karena Pada Tahun 2020 karena di tahun 2021 terdapat Perubahan Nomenklatur Program, Kegiatan sampai dengan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sehingga jauh berbeda dengan Tahun 2020, namun dapat disajikan perbandingan ringkasan Realisasi Belanja tahun 2020 dan tahun 2021.

Ringkasan Realisasi APBD Tahun 2020 terhadap 2021

Perbandingan Realisasi Belanja Langsung
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Laut
Tahun Anggaran 2020 dan 2021

No	Uraian	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Peningkatan (%)
BELANJA		7.950.804.777	11.327.431.259	142,46

			,98	
1.	Belanja Pegawai	4.971.121.046	5.430.499.632	109,24
2.	Belanja Barang/ Jasa	2.465.843.190	3.823.414.324, 98	155,05
3.	Belanja Hibah	0	343.158.975	
4.	Belanja Modal	513.840.541	1.730.358.328	336,75

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2021. Sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik beserta target-targetnya adalah informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui LAPKIN ini.

Secara umum rata-rata pencapaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sesuai Rencana Stratejik Tahun 2018-2023 yang terdiri atas 5 (lima) sasaran dalam tahun 2021 telah mencapai target yang telah ditentukan walaupun ada 1 (satu) sasaran yang tidak tercapai 100 %, untuk lebih jelas nya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Kinerja Utama/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71 %	72,27 %	101,79%
2	Meningkatnya Kesempatan kerja	Tingkat kesempatan kerja	4 %	96,48 %	2412 %
3	Meningkatnya Harmonisasi Hubungan industrial	Persentase penurunan kasus perselisihan hubungan industrial	37,5 %	64 %	171,43%
4	Meningkatnya Produktivitas sektor industri	Persentase kontribusi sektor industri terhadap PDRB	14,87 %	13,19 %	89 %
5	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	100 %

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kab. Tanah Laut Tahun 2021, semoga memberikan informasi yang

berarti bagi yang memerlukan serta menjadi tolok ukur terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

1. Bidang Ketenaga kerjaan sebagai urusan wajib tentunya akan memperoleh perhatian dalam peningkatan kualitas SDM, anggaran, dan peralatan dalam rangka meminimalisasi peta kerawanan ketenaga kerjaan dan membekali calon tenaga kerja yang terampil dalam mempersiapkan memasuki dunia kerja di Kabupaten Tanah Laut.
2. Bidang Perindustrian
 - a. Sebagai urusan pilihan namun memiliki peran yang cukup strategis sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk industri kecil menengah dengan pembangunan Rumah Kemas.
 - b. Sebagai daerah yang termasuk dalam pembangunan proyek strategi nasional, pembangunan kawasan industri jorong terus didorong percepatan pembangunan dan pengelolaan nya.
3. Dalam rangka mewujudkan kebijakan pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan perindustrian, dilakukan melalui strategi :
 1. Penguatan kelembagaan dan personil
 2. Membangun jaringan kerja
 3. Pemanfaatan teknologi informasi

Pelaihari, 31 Januari 2022

Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Perindustrian
Kabupaten Tanah Laut,

MASTURI, S.STP
NIP. 19770705 199612 1 004

LAMPIRAN